



**PELANGGARAN HAM YANG TERJADI PADA PASCA
JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR
(Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**SRIE SUNARISASI, SH
B.4A.096082**

PEMBIMBING :

**Prof. DR. Yusriyadi, SH, MS
Ani Purwanti, SH, M.Hum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PELANGGARAN HAM YANG TERJADI PADA
PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR
(Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)**

Disusun Oleh :

Srie Sunarisasi, SH
NIM. B.4A.096082

**Dipertahankan di Dewan Penguji
Pada Tanggal :**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing
Magister Ilmu Hukum**

**enggan para Ketua Program
Ketua Program**

Prof. DR. Yusriyadi, SH, MS
NIP. 130 937 137

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

Ani Purwanti, SH, M.Hum
NIP. 131 689 629

KATA PENGANTAR

Sangat saya sadari bahwa penulisan Tesis ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dan dorongan banyak pihak yang diberikan kepada penulis. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga semoga berkat kemurahannya semua dapat terbalaskan dan tidak mungkin rasanya penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak, mohon maaf sekiranya ungkapan terima kasih yang sangat terbatas hanya tertuju kepada beberapa pihak tertentu saja. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH yang sangat kami hormati, yang telah lama dengan penuh kesabaran, dukungan dan keikhlasannya memberikan semua ilmu dan motivasi untuk mengembangkannya, sejak masa masih aktif menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro hingga selesai masa jabatan.
2. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini.
3. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH, MH yang telah memperkenalkan penulis melakukan penelitian dan memperoleh data dalam penulisan Tesis ini.

4. Prof. Dr. Yusriyadi, SH, MS selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran, ketekunan dan keikhlasan membimbing dalam penyelesaian Tesis ini.
5. Ibu Ani Purwanti, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan secara ikhlas bimbingan dan dukungan dalam penyelesaian Tesis ini.
6. Prof. Satjipto Rahardjo, SH yang telah memberikan semua ilmu untuk mengembangkannya.
7. Prof. Dr. I. S Susanto, SH (almarhum) kami akan selalu ingat, beliau begitu tulus dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dukungan yang akhirnya diselesaikan juga Tesis ini.
8. Prof. Dr. H. Muladi, SH yang telah memberikan kesempatan dan dukungannya untuk mengikuti program pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Diponegoro.
9. Bapak Hendardi dan Bapak Paskah Irianto dari PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang banyak membantu dengan diskusi dan masukan dari sejak awal penelitian.
10. Bapak Hakim Pengadilan Negeri Ad Hoc Jakarta Pusat, yang telah memberikan kemudahan dalam penelitian Tesis ini.
11. Bapak Ketua KOMNAS-HAM, khususnya perpustakaan, yang telah memberikan bantuan data-data dan dokumen untuk penyelesaian Tesis ini.
12. Saudaraku Eurico Guterres yang begitu tegas penuh semangat dalam perjuangannya dan memberikan masukan untuk melengkapi penyelesaian Tesis ini.

13. Bapak Jendral TNI (Purn) H. Wiranto, SH, S.Ip yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Tesis ini.

Ucapan khusus dan tulus rasa terima kasih kami, kepada pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu juga sahabat-sahabat dalam suka dan duka, atas perhatian serta dukungannya hingga selesainya Tesis ini.

Terima kasih penulis tujukan kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa sepenuh hati, khususnya kepada Ramanda dan Ibunda (Almarhum) dan Bapak Mertua (Almarhum) juga Ibunda Mertua tercinta.

Akhirnya penulis sampaikan terima kasih yang mendalam atas doa dan cinta kasih serta dukungan penuh atas perhatian dan pengertian suami tercinta Dr. Sidharta Darsoyono, SpB, SpBU, anakku tercinta Errine Dewayani, SH dan menantu R. Muliawan, ST, M.MT, Erriawan Wibowo, SE, MM, Indri Maharani, S.Psi, Ir. Andilo Reza Harahab, SP, MSC (menantu) dan yang terkecil Dhanang Ernawan Wijanarko yang lagi tekun dalam semangat studi di Fakultas Kedokteran Unair yang telah dengan sabar mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro.

Semoga segala amal dan budi baik bapak/ibu tersebut di atas mendapat balasan dari Allah SWT. Amien.

Semarang, 2008

Penulis

ABSTRAK

Jauh sebelum Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia, pada 17 Juli 1976, wilayah ini telah tercerai-berai oleh rentannya politik *divide et impera*. Akibatnya, selama 450 tahun Portugal mampu menancapkan kukunya di wilayah itu. Pada 25 April 1974 terjadi Revolusi Bunga di Portugal, rezim pemerintahan berganti. Kebijakan politik dekolonisasi mulai diterapkan, termasuk di Timor Timur. Keadaan politik dalam negeri Portugal pun mulai bergejolak. Puncaknya adalah Perang saudara 1975, yang dipicu kegagalan dekolonisasi. Portugal secara tidak bertanggungjawab akhirnya meninggalkan Timor Timur. Pada saat itu terdapat dua kelompok yang bersengketa, yang mempunyai aspirasi radikal untuk segera merdeka, lepas dari Portugal, sehingga sering disebut kelompok anti integrasi. Sedangkan kelompok mendukung integrasi dengan Indonesia (kelompok pro integrasi). Kedua kelompok ini saling bersengketa mengenai masa depan Timor Timur. Persoalan menjadi lebih rumit setelah perselisihan dan pertentangan antara dua kelompok berujung pada Perang Saudara. Situasi itulah yang akhirnya mendorong Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia, pada 17 Juli 1976. Dan keinginan berintegrasi ini diterima oleh banyak negara yang berdiri di belakang Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Secara resmi PBB belum mengakui integrasi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia. Selama 23 tahun berintegrasi, konflik antara kedua kelompok, pro integrasi dan anti integrasi tidak kenal henti. Majelis Umum PBB menyerahkan penyelesaian Timor Timur ke pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal dan Sekjen PBB. Penyelesaian politik menjadi lebih berat karena dikaitkan dengan isu-isu HAM.

Perubahan politik serta desakan Internasional yang makin menguat untuk segera menentukan nasib sendiri memunculkan dua opsi bagi Timor Timur yaitu *Otonomi Khusus* yaitu tetap menjadi bagian dari Indonesia atau *Merdeka*. Pada awalnya muncul Opsi 1, mengusulkan untuk memberikan otonomi khusus kepada Timor Timur yaitu pada akhir 1998, kemudian awal Januari 1999 muncul opsi 2 yang dua-duanya dibicarakan dalam *tripartit agreement*. Untuk itulah dilaksanakan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 yang diawasi oleh UNAMET sebagai perwakilan dari PBB. Pengumuman hasil jajak pendapat dipercepat dari tanggal 7 September 1999 menjadi 4 September 1999 memunculkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh panitia jajak pendapat dan UNTAET. Setelah pengumuman hasil jajak pendapat, secara spontan terjadi sikap yang emosional dan terjadi *chaos* maka muncul tindakan anarkis dan sporadis yang mengganggu KAMTIBMAS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran HAM berat pada pasca jajak pendapat di Timor Timur dan mengetahui peran peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur.

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis artinya melihat apa hukumnya dan sosiologis artinya melihat bagaimana kenyataannya. Dan ditunjang dengan beberapa pendekatan, yaitu

pendekatan historis-dokumenter, dan pendekatan yuridis-teoritis. Data utama utama penelitian menggunakan data sekunder, sedangkan data primer berfungsi sebagai penunjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Persidangan HAM berat ini merupakan ajang awal dimulainya gagasan baru dalam dunia peradilan di Indonesia, bahkan dalam tingkat regional, yang berkaitan dengan HAM. UU No. 26 Tahun 2000 menjadi dasar pembentukan Pengadilan HAM permanen untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU ini disahkan, instrumen ini juga menjadi dasar didirikannya Pengadilan HAM Ad Hoc. Yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat baik yang dilakukan di dalam maupun di luar batas teritorial wilayah negara Indonesia oleh warganegara Indonesia. Yurisdiksi pengadilan khusus ini harus dibatasi, karena ditetapkan bahwa pengadilan ini hanya bisa memeriksa perkara-perkara tindak kekerasan HAM berat yang terjadi pada masa sesudah *jajak pendapat* 30 Agustus 1999 yang artinya mengesampingkan ratusan tindak pidana HAM yang dilakukan sepanjang tahun itu. Yurisdiksi ini selanjutnya diperbaiki dan diperluas melalui Keppres kedua, Keppres No. 96 Tahun 2001. Karenanya Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur ini diberikan wewenang untuk memeriksa kasus-kasus yang terjadi antara April dan September 1999. Inilah pertama kalinya dalam sejarah peradilan di Indonesia, kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan perwira tinggi militer dan polisi, serta pimpinan sipil diajukan ke pengadilan (yang juga pertama di Indonesia), yaitu Pengadilan HAM Ad Hoc. Dakwaan untuk kedua belas berkas perkara dibagi menjadi dakwaan kumulatif dan alternatif serta campuran. Dakwaan dirumuskan pada pelanggaran secara *omission*, yaitu pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan bawahannya dengan tidak diambilnya tindakan yang seharusnya dilakukan, yaitu mencegah, menghentikan, dan menghukum bawahannya yang telah melakukan pelanggaran pidana. Dalam pengaturan tentang jangka waktu pemeriksaan untuk persidangan adalah 180 hari sesuai dengan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000. Terhadap hukuman minimal dimana untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan ini hukuman minimalnya adalah 10 tahun. Dari 12 terdakwa, hanya Eurico Guterres yang dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan terdakwa lainnya dinyatakan bebas. Dasar pertimbangan dari berbagai putusan majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan diperlukan penghukuman bagi pelaku sebagai sebuah keadilan bagi korban dan fungsi pencegahan melalui proses penjeraan, dalam menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM dan kemanusiaan universal sebagai fundamen utama dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur.

Kata kunci : Pelanggaran HAM, Jajak Pendapat, Peradilan HAM Ad Hoc

ABSTRACT

Before integrated with Republic of Indonesia, in July 17th 1976, East Timor was dispersed by politics *devide et impera*. As the consequence, Portuguese was able to colonize East Timor for 450 years. In April 24th 1974 Flower Revolution happened in Portuguese, the regime was changed. Politics of decolonization was applied, in East Timor also. Political condition in Portuguese started to flare up. The peak of it was the civil war in 1975 that is triggered by decolonization failed. Portuguese irresponsibly left East Timor. At that time, there were two groups in conflict; one of them had radical aspiration to be an independent country, released from Portuguese, called anti integration group. The other one wanted to integrate with Indonesia (called pro integration group). Both groups wanted to determine East Timor future. The problem became more complicated after the conflict and it causing civil war. Therefore, East Timor wanted to integrate with Indonesia, in July 17th 1976, and it accepted by many countries stood behind Indonesia, including United States of America and Australia. Legally, United Nations had not claimed East Timor integration to Republic of Indonesia yet. During 23 years of integration, the conflict of two groups, pro and anti integration still happened. General Assembly of UN assigned East Timor settlement in triangle discussion among Indonesia, Portuguese and general secretary of UN. Political settlement became more difficult because it was related to human rights issues.

Political changes and International pressures that getting stronger, force Indonesian government to let East Timor people determining their own destiny by two options; Special Autonomy and still be part of Indonesia, or becoming an Independent Country. The first option proposed, to give special autonomy for East Timor, by the end of 1998, and the second proposed in January 1999. Both options are discussed in *tripartit agreement*. After that, the situation in East Timor changes immediately because of the new different policy. Therefore, the referendum is conducted on 30 August 1999 and observed by UNAMET as the delegation of United Nation. The announcement of referendum result, that is quickened from 7 September 1999 to 4 September 1999, brings out assumption that the committee of referendum and UNTAET doing the referendum dishonestly. After the announcement, people become emotional and chaos happened spontaneously and, therefore, sporadic and anarchic action that irritating KAMTIBMAS is happened.

The purposes of this study are to know how the gross violation of human rights happened in East Timor after the referendum and to know the roles of human right court Ad Hoc in East Timor.

The method used in this study is socio-legal. Legal is used to find what the right law is and sociological is used to see the reality. The writer also uses some other approaches; those are historical documentary and legal theoretical. The primary data used in this study is the secondary data, whereas the primary data used as the supporting idea.

The result of the study shows that International parties insist the Indonesian government to judge some parties responsible for gross violation of

human rights in East Timor immediately. The gross violation of human rights court is the new idea in Indonesian jurisdiction, even in regional level, related to human rights. Law No. 26 Year 2000 is the principle of permanent human rights court to conduct cases of violation of human rights happened before this law is ratified. This instrument also becomes the principle for founding Human Rights Court Ad Hoc. The jurisdictions of this court are examining and making decisions for gross violation of human rights cases done by Indonesian citizens in or outside of Indonesian territory. The jurisdiction of this special court should be defined, and it is decided that the court examines only gross violation of human rights cases happened after the referendum on 30 August 1999. It means that another violation of human rights cases happened before are not examined in this court. The jurisdiction, later, improved and extended by the second President Decree Decision No. 96 Year 2001. Therefore, Human Rights Court Ad Hoc has authority to examine cases happened in period of April until September 1999. This is the first time in Indonesian jurisdiction history, cases of gross violation of human rights involving military officers, Indonesian polices and civil commander proposed to the trial (that is also first time formed in Indonesia), that is human right court Ad Hoc. Accusations for the twelve dossiers divided into cumulative, alternative and interference dossiers. The dossiers formulated to violation by omission that is the neglecting on violation done by subordinates with no actions that supposed to be done, those are preventing, stopping and punishing subordinates conducting the violations. The period of examination for the trial is 180 days based on Law No. 26 Year 2000. Minimal sentence for crimes against humanity in the forms of assassination and oppression is 10 years. From 12 defendants, only Eurico Guterres that is sentenced appropriate with the law and the other defendants is freed. Basic consideration of the adjudication shows that the defendant legally and surely doing the crimes against humanity and the punishment for the defendant is needed as the justice for the victims and preventing function by intimidation process (*deterrent rationale*), to make universal values and principles of human rights and humanity as main foundation in the context of crimes against humanity in East Timor.

Keywords : Gross Violation of Human Rights, Referendum, Human Rights Court Ad Hoc

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN.....	16
C. RUANG LINGKUP PENELITIAN	16
D. TUJUAN PENELITIAN.....	17
E. MANFAAT PENELITIAN.....	17
F. KERANGKA TEORI	18
G. METODE PENELITIAN.....	27
1. Metode Pendekatan	27
2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	29
3. Sampel dan Lokasi Penelitian.....	30
4. Rancangan Analisis.....	31
5. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN, SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN KONSEP TENTANG HAM.....	34
1. Pengertian dan Sejarah HAM.....	34
2. Perkembangan dan Konsep Tentang HAM	41
B. KEBERADAAN PERADILAN HAM DAN PERKEMBANGAN PERADILAN HAM DI INDONESIA.....	48
1. Perkembangan Melalui Instrumen Hukum dan Kelembagaan	48
a. Instrumen Hukum.....	48
b. Kelembagaan.....	51
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	51
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia	58
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc	59
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	59
2. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia	59
3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	64
4. Tempat Kedudukan dan Susunan Pengadilan Hak Asasi Manusia	66
a. Tempat Kedudukan	66
b. Susunan Majelis Hakim.....	67
5. Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	68

C. PELANGGARAN HAM BERAT SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA	73
---	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELANGGARAN HAM BERAT PADA PASCA PELAKSANAAN JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR	92
B. PERAN PERADILAN HAM AD HOC DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERJADI PADA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR.....	117

BAB IV : PENUTUP

A. KESIMPULAN	143
B. SARAN	149

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.
2. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI
MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT.
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI
DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG
BERAT.
4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KOMPENSASI,

RESTITUSI, DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT.

5. KAMUS ISTILAH PENTING HAM.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Ke Persidangan.....	124
Tabel 2. Perbandingan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dan Putusan Pengadilan HAM.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebelum berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1976, selama lebih dari empat abad Timor Timur merupakan jajahan Portugal. Fretilin (*Frente Revolucionaria de Timor Leste Independence*), partai yang anti integrasi, memproklamkan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1977. Fretilin yang dulunya bernama ASDT (*Associacao Popular Democratica Timorese*) merupakan partai revolusioner dan radikal dalam memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Dua hari kemudian, pada tanggal 30 November 1977, suatu koalisi parta-partai pro Indonesia terutama *Uniao Democratica Timorese* (UDT) dan *Associacao Popular Democratica* (Apodeti) juga memproklamkan kemerdekaan wilayah tersebut dan menyatakan ingin berintegrasi dengan Indonesia.¹ Deklarasi ini kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Balibo lalu disahkan oleh DPR tanggal 15 Juli 1976 dan ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 17 Juli 1976, sebagai Undang-Undang No. 7 Tahun 1976, yang isinya menrima Timor Timur sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia, dan menjadikannya sebagai propinsi ke-27. Dalam perkembangannya, MPR kemudian mengesahkannya melalui TAP MPR VI/MPR/1978 pada tahun 1978. Semenjak itulah *saga* tentang Timor Timur terus bergulir, agenda

¹ *Perserikatan Bangsa Bangsa dan Timor Lorosae*, Departemen Penerangan Publik PBB, New York, 2000, hlm. 3 – 4.

pembahasan masalah Timor Timur oleh Indonesia terus masuk dalam Sidang Umum PBB.

Desakan dan simpati Internasional agar Indonesia memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri (*rights to self determination*) menguat karenanya. Peristiwa ini menjadi momentum strategis bagi perjuangan kelompok Fretilin yang telah lama menginginkan kemerdekaan atas wilayah tersebut.

Menyusul perubahan politik drastis di Indonesia dan desakan dunia Internasional yang makin menguat, pemerintahan Habibie mengambil terobosan kebijakan untuk menyelenggarakan jajak pendapat yang akan menentukan masa depan Timor Timur. Terdapat dua opsi yang dapat dipilih oleh rakyat Timor Timur, yaitu otonomi khusus dengan tetap menjadi bagian dari Indonesia; atau merdeka. Jajak pendapat yang menawarkan kedua opsi tersebut pun diselenggarakan serentak di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999.

Pada tanggal 4 September 1999 hasil jajak pendapat tersebut diumumkan : 94.388 (21,5%) memilih usul otonomi khusus dan 344.580 (78,5%) merdeka.² Semenjak itulah Timor Timur resmi lepas dari kedaulatan Indonesia. Pasca pengumuman hasil jajak pendapat tersebut, kerusuhan dan kekerasan berkobar di Timor Timur. Milisi pro integrasi yang merasa kecewa dengan hasil jajak pendapat melakukan penyerangan terhadap kelompok anti integrasi. Akibat kerusuhan ini,

² Idi Subandi Ibrahim (ed), *Selamat Jalan Timor Timur, Pergulatan Menuak Kebenaran*, IDe Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 185.

Dili dan kota-kota di Timor Timur rusak berat, ratusan orang tewas, dan ratusan ribu orang mengungsi ke Nusa Tenggara Barat.

Semua perubahan mendadak itu menimbulkan kegamangan, baik di pihak pro integrasi maupun kelompok anti integrasi. Kekerasan yang bersifat massif di Timor Timur pasca referendum, kemudian dikaitkan dengan intervensi TNI sebagai pemegang otoritas keamanan di Timor Timur.

Hal lain yang menimbulkan kecurigaan adanya konspirasi Internasional yang terencana matang terdapat dalam isi pasal persetujuan New York. Contohnya ialah pasal yang menyatakan bahwa tanggung jawab keamanan berada di pihak Indonesia (TNI/Polri), sementara penyelenggara jajak pendapat ialah PBB. Pasal ini sangat tidak adil, karena segala akibat yang dilakukan penyelenggara jajak pendapat harus diamankan oleh Indonesia.

PBB kemudian membentuk UNAMET (*United Nation Assistance Mission for East Timor*) demi memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan jajak pendapat. UNAMET juga disinyalir kurang netral dalam perekrutan staf lokal di Timor Timur dengan cenderung memilih dari kalangan anti integrasi dibanding dari kalangan pro integrasi.³

Masalah keamanan menjadi batu sandungan bagi pemerintah Indonesia. Netralitas aparat militer dan kepolisian Indonesia dipertanyakan oleh banyak pihak, termasuk UNAMET. Sesuai dengan kesepakatan New York, Indonesia, yang bertanggung jawab atas keamanan menjelang dan selama jajak pendapat berlangsung, dituntut

³ Akhmad Kusaeni, *op cit.*, hlm. 58.

untuk bersikap netral terhadap kelompok yang bertikai. Ini merupakan hal yang sulit dilakukan. Selain kegagalan aparat keamanan Indonesia untuk bersikap netral kebencian dan rasa dendam yang luar biasa diantara kedua kelompok yang bertikai merupakan kendala besar dalam upaya menciptakan keamanan di Timor Timur.

Ketika PBB ingin melaksanakan jajak pendapat di Timor Timur untuk menyelesaikan problem kronis di wilayah itu, begitu banyak warga Timor Timur meminta agar jajak pendapat menuju kemerdekaan atau memperoleh otonomi khusus dalam pangkuan Indonesia ditunda dulu, sebelum semua orang Timor Timur secara tulus melaksanakan rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi harus dituntaskan dulu, sebelum melaksanakan jajak pendapat untuk memilih apakah ingin merdeka sebagai sebuah negara berdaulat atau otonomi khusus dalam pangkuan Indonesia. Tetapi usul-saran ini tidak digubris PBB karena tidak sejalan dengan pendapat mereka. Bagi PBB, jajak pendapat adalah jalan satu-satunya untuk menuntaskan persoalan Timor Timur yang kronis.

Pemerintah Indonesia dan Timor Timur yang menunjukkan itikad kuat untuk berekonsiliasi dan sepakat menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Timor Timur melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan (*Commision of Truth and Friendship*) yang mereka bentuk sendiri beberapa waktu kemudian.

Kunci penyelesaian persoalan Timor Timur bukan pertama-tama terletak pada memerdekakan rakyat Timor Timur melainkan pada rekonsiliasi yang tulus, tuntas dan bermartabat tanpa diboncengi kepentingan pribadi, kelompok, partai politik atau dicerai oleh

kepentingan negara-negara tertentu yang ingin menjajah Timor Timur dengan cara dan gaya baru – bukan menjajah secara teritorial seperti zaman lampau tetapi penjajahan ekonomi, politik dan kultur. Rekonsiliasi Timor Timur yang tuntas mengandaikan adanya penceriteraan kembali peristiwa konflik atau kekerasan masa lalu sejak pergolakan politik dan perang saudara 1974 hingga 1999, adanya pengakuan kesalahan, meminta maaf dan penyesalan, pengampunan yang tulus serta berjalan bersama lagi sebagai sesama anak Timor. Rekonsiliasi berarti kesediaan yang tulus untuk hidup dalam perbedaan, menerima dan menghargai sesama orang Timor Timur dalam perbedaannya, selaras hidup dengan Sang Pencipta, sesama warga kelahiran Timor Timur, diri sendiri dan alam ciptaan Tuhan.⁴

Menyangkut pelanggaran HAM berat, sebenarnya Pemerintah Timor Timur sebelumnya telah membentuk satu komisi yang diakuinya sebagai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan memperoleh mandat dari parlemen dan bekerja selama tiga tahun untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran HAM berat di tahun 1974-1999. KKR Timor Timur (*Comissao de Acolhimento, Verdado e Reconciliacao de Timor Leste/ CAVR*) dipimpin Jacinto Alves (mantan anggota gerakan bawah tanah Timor Timur) dan didampingi oleh penasehat Internasional berkebangsaan Australia, Kieran Dwyer.

Pada pertengahan tahun 2005, mandat KKR Timor Timur tersebut berakhir dan komisi tersebut menyampaikan laporan akhir

⁴ Peter Tukan, *Rekonsiliasi yang Tidak Tuntas Duri Kemerdekaan Timor Timur*, Verbum Publishing, Jakarta, 2007, hlm. xxv – xxvi.

disertai rekomendasi kepada pemerintah menyangkut tindakan yang perlu diambil guna menyelesaikan kasus **pelanggaran HAM berat di Timor Timur pasca jajak pendapat**. Tidak terpublikasikan secara jelas substansi laporan KKR Timor Timur tersebut. Namun yang jelas, berdasarkan perkembangan terbaru (kesediaan pemerintah Timor Timur bersama pemerintah Indonesia membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan, padahal sebenarnya mereka telah memiliki KKR sendiri). Mereka tidak mempermasalahkan lebih lanjut secara serius persoalan pelanggaran HAM berat yang dituduhkan kepada sebagian perwira militer Indonesia terkait peristiwa tahun 1999.

Kentalnya nuansa keterlibatan militer Indonesia dalam konflik Timor Timur, terutama pada peristiwa kerusuhan pasca jajak pendapat, mengantarkan pada keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 96/2001 tentang pembentukan peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Pada akhirnya semua perwira militer yang dituduh terlibat dalam tindak pelanggaran HAM berat di Timor Timur dibebaskan. Masalah yang kemudian muncul sebagai implikasinya adalah : ketidakpuasan publik Internasional, terutama PBB yang terwakili oleh sikap sekjennya, Kofi Anan, yang kemudian berkeras membentuk Komisi Ahli yang ditugaskan untuk mengusut lebih lanjut peristiwa pelanggaran HAM berat yang dituduhkan.

Menurut **Peter Baehr**, pelanggaran HAM berat akan menyangkut masalah-masalah yang meliputi,

*“The prohibition of slavery, the right to life, torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, genocide, disappearances and ‘ethnic cleansing’”.*⁵

Mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat, antara lain dapat kita temukan pula di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶

Adapun pelanggaran HAM berat dalam konteks Indonesia yang mengundang keterlibatan DK PBB adalah menyangkut tindak kekerasan yang terjadi di Timor Timur.

Kekerasan di Timor Timur terjadi setelah pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus. Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkannya hasil jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat.⁷

Tanggung jawab negara juga menyangkut hubungan antar-negara, yaitu timbul sebagai respons atas pelanggaran suatu hak Internasional yang bersifat subjektif dari negara lain.

Namun, penyelesaian pelanggaran HAM berat pada prinsipnya lebih mengutamakan tanggung jawab negara. Hal itu, karena instrumen-

⁵ Peter R. Baehr, *Human Rights Universality in Practice*, St. Martin's Press, New York, 1999, hlm. 20.

⁶ Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Istilah genosida merupakan terjemahan dari *genocide*.

⁷ Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur, disusun oleh Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

instrumen (hukum) HAM memiliki ciri yaitu berfokus pada negara sebagai pelaku utama yang memerlukan pengawasan secara eksternal.⁸

Instrumen hukum HAM Internasional, umumnya memberikan kewajiban kepada negara untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut melalui proses hukum di lingkungan nasional terlebih dahulu. Hal itu dikenal dengan istilah *exhaustion of local remedies*.

Sehubungan dengan lahirnya tanggung jawab negara, hukum kebiasaan Internasional menetapkan, sebelum diajukannya klaim tuntutan ke pengadilan Internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa (*local remedies*) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Tindakan ini dilakukan baik untuk memberikan kesempatan kepada negara itu untuk memperbaiki kesalahannya menurut sistem hukumnya dan untuk mengurangi tuntutan-tuntutan Internasional.⁹

Ketentuan yang mengatur masalah *exhaustion of local remedies* dinyatakan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR),¹⁰

"Each State Party to the present Covenant undertakes:... b. to ensure that any person claiming such a remedy shall have his rights there to determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy."

⁸ William R. Slomanson, *Fundamental Perspectives on International Law*, West, Wadsworth, 2000, hlm. 507.

⁹ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 1979, hlm. 437 dalam Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 188.

¹⁰ Pasal 3 (b) *International Covenant on Civil and Political rights* 1966.

Hal di atas juga dinyatakan dalam *Statuta International Criminal Court* (ICC). ICC pada dasarnya menganut prinsip komplementaris, artinya ICC bersifat pelengkap (komplemen) dari pengadilan nasional.¹¹

"An International Criminal Court ("the Court") is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall complementary to national criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute."

Prinsip tersebut menegaskan, jika terjadi kejahatan serius di negara yang bersangkutan, yurisdiksi pengadilan nasional harus didahulukan. Dapat dikatakan yurisdiksi pengadilan nasional memiliki hak preferensi dan yurisdiksi ICC sebagai *the last resort*.

Namun kemerdekaan tidak membebaskan Indonesia. Sebaliknya penolakan rakyat Timor Timur terhadap tawaran otonomi luas menyisakan serangkaian krisis baru yang menghambat upaya Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik. Masalah serius lain yang dihadapi Indonesia adalah tuduhan pelanggaran HAM menjelang dan setelah jajak pendapat. Masyarakat Internasional yang dimotori Amerika Serikat, Australia dan Portugal terus-menerus mendesak agar para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur, terutama Anggota TNI diadili oleh Pengadilan Internasional.

Mantan Menteri Kehakiman Muladi¹² mengatakan, pengadilan *Ad Hoc* yang telah dibentuk pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk di Timor Timur, sehingga

¹¹Pasal 1 *Rome Statute of the International Criminal Court 1998*.

¹² Gubernur Lemhanas, Guru Besar Hukum Pidana, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Ketua Program Magister Ilmu Hukum (S2) Universitas Diponegoro Semarang.

tidak perlu pengadilan Internasional. Banyak pihak meragukan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan pengadilan HAM yang jujur dan adil. Dewan Keamanan PBB sendiri mengancam akan membentuk Mahkamah Internasional bila Indonesia gagal menghukum mereka yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah di Timor Timur.

Tekanan dan ancaman itu memperkuat kecurigaan bahwa pengadilan HAM memang sarat dengan muatan politik. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap obyektivitas Sistem Peradilan Internasional yang ada dan lembaga pengadilan yang dibentuk di bawah naungan PBB. Itu sebabnya pembentukan Mahkamah Kriminal Internasional, untuk mengadili tersangka pelaku genosida, kejahatan perang, dan kejahatan atas kemanusiaan (HAM) diliputi kontroversi.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama setelah peristiwa Timor Timur, pemasalahan pelanggaran HAM banyak dibahas oleh para ahli. Selanjutnya dengan mengacu kepada UU No. 39 tahun 1999 dan UU No. 26 tahun 2000 (Pengadilan HAM), maka dikenal dua bentuk pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pengertian pelanggaran HAM terdapat dalam Pasal 1 butir 6 dan pengertian pelanggaran HAM berat terdapat dalam penjelasan UU No. 39 tahun 1999 yaitu dalam Pasal 104 ayat 1.

Pasal 1 butir 6 menyatakan :

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Di dalam penjelasan UU No. 39 tahun 1999 mengenai pengertian pelanggaran HAM berat diuraikan dalam **Pasal 104 ayat 1** menyatakan :

Pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis¹³ (systematic discrimination).¹⁴

Sebagai asas hukum Pasal 104 ayat (1) dari UU nomor 39 tahun 1999 ini, berbeda dengan pengertian pelanggaran HAM berat yang dimaksud dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam UU tersebut dijelaskan pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7). Uraian pengertian dari kedua hal tersebut terdapat dalam pasal 8 dan 9.

Pasal 8 menyatakan **genosida** adalah:¹⁵

Setiap perbuatan yang dinyatakan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok bangsa, dengan cara:

a. Membunuh anggota kelompok;

¹³Sistematis berarti benar-benar terorganisir atau terencana dan mengikuti suatu pola regular yang berdasarkan suatu kebijakan pejabat publik atau perorangan, dan kebijakan tersebut tidak diharuskan merupakan bagian dari kebijakan Negara. Paul Dalton, dalam makalah Konsep Serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, dalam seminar *Advanced Training for Indonesian Rights Courts: "Judging International Crimes Under Law 26/2000"* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI-Danish Institute for Human Rights, Medan 24 – 26 April 2005.

¹⁴Lihat UU No. 39 tahun 1999.

¹⁵Lihat UU No. 26 tahun 2000.

- b. Mengakibatkan penderitaan fisik/mental berat terhadap antar anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok lain atau;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9 menyatakan **kejahatan terhadap kemanusiaan** adalah:¹⁶

Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian atau serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan/perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum Internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Pengayaman terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, kebangsaan, ras agama, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa;
- j. *Kejahatan apartheid*.¹⁷

Perihal pelanggaran HAM berat kemudian semakin mengemuka

setelah adanya Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur. Pengadilan HAM

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Hal ini dalam Konvensi Internasional 1973 tentang Penindasan dan hukuman terhadap *Apartheid* menyatakan apartheid sebagai suatu pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Konvensi ini juga mendeskripsikan *apartheid* sebagai sebuah rangkaian tindakan perikemanusiaan yang dilakukan untuk membangun dan mempertahankan dominasi kelompok ras tertentu terhadap kelompok ras lainnya dan secara sistematis melakukan penindasan terhadap mereka. Konvensi ini juga menyatakan bahwa *apartheid* sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa *apartheid* digolongkan sebagai pelanggaran yang serius atau berat (*Grave breaches*). Lihat dalam buku *Crimes of War, What the Public Should Know*, Editor: Roy Gutman dan David Rieff, Program Pelatihan Jurnalistik Televisi (PJTV-Internews Eropa), 2004, hlm. 30.

Ad Hoc ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 53 tahun 2001 yang kemudian disempurnakan dengan Keppres nomor 96 tahun 2001. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UU nomor 26 tahun 2000 ada dua bentuk Pengadilan HAM, yaitu Pengadilan HAM permanen (biasa) dan Pengadilan HAM Ad Hoc. Keduanya berada di bawah lingkungan Peradilan Umum. Sampai saat ini ada empat Pengadilan HAM permanen yang telah dibentuk, yaitu di Medan, Jakarta, Surabaya dan Ujung Pandang yang masing-masing telah diatur wilayah yurisdiksinya.

Adapun Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk khusus untuk kasus tertentu yang terjadi sebelum diterbitkannya UU No. 26/2000. Dengan demikian Pengadilan HAM Ad Hoc ini mengecualikan prinsip non-retroaktif.¹⁸ Menurut UU 26/2000, Pengadilan HAM Ad Hoc ini dibentuk oleh Keppres berdasarkan saran dari DPR.

Kasus-kasus yang diperiksa dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur adalah kejahatan yang disebut dengan pelanggaran HAM berat. Terdakwa yang diadili antara lain Mayjend. TNI Adam Damiri (Panglima KODAM IX/Udayana yang juga membawahi Timor Timur pada waktu itu), Brigjend TNI Noer Muis (yang pada waktu itu menjabat sebagai Danrem di Timor Timur), Brigjend (Pol) Timbul Silaen (yang pada waktu itu menjabat sebagai KAPOLDA Timor Timur), Gubernur Timor

¹⁸Prinsip non-retroaktif adalah prinsip yang berlaku secara umum di dalam hukum pidana. Menurut prinsip ini hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Ketentuannya antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Hal ini kemudian juga ditetapkan dalam amandemen UUD 1945. Namun dalam praktek kemudian ada beberapa kasus yang mengecualikan prinsip non-retroaktif ini. Di lingkungan Internasional misalnya Pengadilan Nuremberg dan Tokyo mengecualikan prinsip non-retroaktif. Begitu juga dalam pengadilan ICTY dan ICTR. Di lingkungan nasional pengecualian prinsip non-retroaktif ini diterapkan dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur dan Tanjung Priok.

Timor Abilio Soares dan Eurico Guterres (Pimpinan Pasukan Milisi pro-Indonesia).

Sejak dimulainya pemeriksaan kasus-kasus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur maka khasanah tentang pelanggaran HAM berat banyak dibahas dan didiskusikan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Hal ini dapat dipahami karena persoalan mengenai pelanggaran HAM berat ini relatif merupakan sesuatu yang baru dalam dunia hukum di Indonesia.

Disamping persoalan tentang pelanggaran HAM berat, sebenarnya ada satu kejahatan lagi yang juga kemudian dibahas para ahli, yaitu kejahatan perang (*war crimes*). Meskipun kejahatan perang tidak termasuk yurisdiksi dari Pengadilan HAM, namun masalah ini banyak dibicarakan karena hal ini diatur di dalam *Statuta International Criminal Court* (ICC). Sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya yurisdiksi Pengadilan HAM Ad Hoc adalah mengikuti yurisdiksi Pengadilan ICC, hanya saja untuk kejahatan perangnya kemudian ditiadakan untuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Sedangkan di lingkungan Internasional, yaitu di pengadilan *International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia* (ICTY) dan pengadilan *International Criminal Tribunal for The Former Rwanda* (ICTR), kejahatan perang termasuk di dalam yurisdiksinya. Banyak ahli yang mempertanyakan mengapa UU No. 26/2000 mengecualikan kejahatan perang dalam yurisdiksi Pengadilan HAM Ad Hoc, terutama untuk kasus Timor Timur. Sebagian ahli berpendapat bahwa yang terjadi di Timor

Timor adalah sengketa non Internasional (antara Indonesia melawan Fretilin).

Ditinjau dari aspek perkembangan hukum HAM dan hukum humaniter yang terjadi dewasa ini, baik di tingkat Internasional maupun nasional, maka ada beberapa hal substansial yang belum terwadahi di dalam KUHP. Misalnya di dalam KUHP yang berlaku sekarang belum juga memasukkan kejahatan-kejahatan berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Permasalahan pelanggaran HAM berat, antara lain genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diuraikan sebelumnya, merupakan permasalahan yang banyak dibahas oleh berbagai kalangan dewasa ini. Dalam konteks Internasional dapat dilihat misalnya persoalan ini mengemuka dalam peradilan di Mahkamah Tribunal Ad Hoc eks-Yugoslavia dan Mahkamah Tribunal Ad Hoc Rwanda.

Dalam kasus Timor Timur, prinsip tanggung jawab juga dijadikan dasar penuntutan oleh jaksa terhadap terdakwa Abilio Soares (Gubernur Timor Timur) dan Eurico Guterres (Pimpinan Milisi di Timor Timur).

Ketentuan-ketentuan yang berkembang di lingkup Internasional diadopsi dan diberlakukan di dalam hukum pidana di beberapa negara. Indonesia adalah salah satu negara yang kemudian mengadopsi ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam hukum nasionalnya, yang dalam hal ini adalah UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Ternyata dalam prakteknya banyak penerapan konsep-konsep hukum Internasional tersebut di dalam hukum nasional Indonesia tidak berlangsung mulus.

B. PERMASALAHAN

Dari gambaran dan latar belakang masalah, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah pada pasca pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur terjadi pelanggaran HAM berat.
- b. Bagaimanakah peran Peradilan HAM Ad Hoc dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada pasca jajak pendapat di Timor Timur.

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan seperti yang diutarakan di muka dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka diperlukan pembatasan ruang lingkup masalah. Sebagaimana diterangkan di atas, permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pelanggaran HAM.

Pengertian HAM mempunyai lingkup yang luas, oleh karena itu dalam penelitian ini hanya dibicarakan **Pelanggaran HAM berat pada pasca jajak pendapat di Timor Timur dan peran peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur.**

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini secara keseluruhan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana terjadinya pelanggaran HAM berat pada pasca pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur.
2. Untuk mengetahui peran Peradilan HAM Ad Hoc dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada pasca jajak pendapat di Timor Timur.

E. MANFAAT PENELITIAN

Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori-teori di bidang Hukum, terutama yang menyangkut HAM. Selain itu, data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam menganalisis persoalan-persoalan yang menyangkut upaya penegakan HAM di Indonesia, baik melalui tindakan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya Pengembangan HAM di Indonesia.

F. KERANGKA TEORI

Di dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi,¹⁹ perkembangan itu akan diikuti oleh perkembangan lainnya, antara lain di bidang hukum. Perubahan yang terjadi akibat perkembangan itu akan mengakibatkan perubahan nilai.

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai :

Pembaharuan hukum merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.²⁰

a. Keberlakuan yuridis

¹⁹Modernisasi diartikan sebagai proses penyesuaian diri dengan keadaan kontelasi dunia pada waktu ini. Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 27.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm. 31 – 32.

1. Apabila penentuan berlakunya didasarkan hierarki norma hukum yang tingkatnya lebih tinggi seperti *teori Hans Kelsen*.
2. Apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan, seperti dalam *teori W. Zevebergen*.

b. Keberlakuan secara sosiologis

1. Apabila kaidah hukum itu diberlakukan atas dasar kekuasaan umum terlepas dari diterima atau tidaknya oleh masyarakat (*Macht-teory*).
2. Apabila kaidah hukum tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh warga masyarakat (*Anerkennungs-teory*).

c. Keberlakuan secara filosofis

Suatu kaidah hukum itu dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila kaidah itu sesuai atau tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat itu. Dalam hal falsafah hidup masyarakat Indonesia, misalnya yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam ilmu hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dalam Perundang-undangan pidana nasional pada saat ini, belum ada rumusan yang memadai yang mengatur kualifikasi “Tindak Pidana” dari konsep-konsep yang ada dan berkembang dalam Hukum Pidana Internasional. Antara lain dalam hal ini adalah tentang pelanggaran HAM berat. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat mencakup dua “Tindak

Pidana”, yaitu kejahatan genosida ²¹ dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Penegasan sikap” demikian jelas mengandung arti, bahwa **perlindungan HAM bukan sekedar asas/pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi “tugas yang harus dilaksanakan” dan menjadi “tujuan yang harus dicapai”**. Pendirian demikian tentunya bukan main-main, karena mengandung konsekuensi dan beban tugas yang cukup berat dalam pelaksanaannya.

Satjipto Rahardjo menganjurkan perlu adanya keberanian dari para pembuat putusan-putusan hukum untuk menciptakan “prosedur luar biasa” (*extra-ordinary measures*) dan membangun kultur kebersamaan (*corporate culture*) dalam bidang peradilan, terutama di antara para hakim, jaksa, dan advokat. Cara-cara *extra-ordinary measures* ini tampaknya bisa juga ditempuh, karena dari pengamatan sepintas terlihat adanya oknum-oknum dari jajaran legislatif, yudikatif, maupun eksekutif yang memiliki keberanian untuk tidak mau dikalahkan begitu saja oleh kata-kata yang tertulis secara “hitam-putih” dalam perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai konsep pelanggaran HAM berat terdapat beberapa kategori tindak pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Oleh beberapa ahli pelanggaran HAM berat (*grave breaches of human rights*) ini disebutkan dengan istilah *Gross, Systematic Violations of Human Rights* atau *Consistant Pattern of Human*

²¹Berasal dari *Raphael Lemkin*, istilah “*genocide*” berasal dari bahasa Yunani “*Genos*” yang berarti ras/suku, dan “*cide*” (Latin) “pembunuhan”. Hal itu sama artinya dengan “*Ethocide*” (Etho=bangsa dan Cide=pembunuhan), Diane F. Orentlicher, *Crimes of War What The Public Should Know*, PJTV – Internews, Europe, 2004, hlm. 189.

Rights Violations.²² Tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah:

- Penghilangan orang
- Penyiksaan
- Pembunuhan sewenang-wenang

Adapun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengkategorikan beberapa tindak pidana di bawah ini sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu :²³

- Pembunuhan sewenang-wenang
- Penyiksaan
- Penghilangan orang
- Diskriminasi sistematis

Sedangkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengkategorikan dua tindak pidana sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu :

- Genosida
- Kejahatan terhadap kemanusiaan

Persoalan HAM sudah menjadi suatu persoalan praktis yang struktural sifatnya, terpatneri dalam realitas sosial dan politik, sehingga tidak bisa dilihat secara normatif saja.

Untuk itu, dalam penelitian yang menyangkut HAM dan pelaksanaannya diperlukan analisis secara yuridis sosiologis. Menggunakan Ilmu Sosiologi akan berusaha untuk memahami dan

²²Lihat antara lain dalam Rudi Rizki pada Presentasi “*Catatan Tentang HAM*”.

²³Lihat dalam Penjelasan Pasal 104 UU No. 39 tahun 1999.

mengungkapkan perilaku orang-orang, apa motifnya dan apakah arti perilaku tersebut bagi masing-masing. Hal itu akan dapat dicapai dengan cara :

1. Mengamati perilaku manusia dan memahaminya.
2. Mengadakan identifikasi terhadap motif dari perilaku tersebut.

Kerangka teoritis yang biasa digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, dapat juga digunakan dalam penelitian hukum yang empiris atau sosiologis, namun harus didasarkan pada kerangka acuan hukum. Penyusunan **kerangka teoritis** dapat juga dilakukan dengan **metode klasifikasi**, dengan cara memilih ruang lingkup yang akan diteliti, kemudian melakukan inventarisasi terhadap ruang lingkup tersebut, dan pada akhirnya menyusunnya secara sistematis. Seperti juga halnya dalam penyusunan kerangka teoritis dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, konsep-konsep yang dipakai perlu dijelaskan atau dijabarkan dalam kerangka teoritis tersebut.

Teori atau **kerangka teoritis** mempunyai beberapa kegunaan bagi suatu penelitian, yakni:

1. Mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi;
3. Memberikan suatu ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti;

4. Memberikan kemungkinan pada prediksi, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang;
5. Memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Dengan demikian melalui kajian sosiologis akan diungkapkan **mengapa terjadi pelanggaran HAM berat pada pasca jajak pendapat di Timor Timur, apa yang menjadi motif tindakan tersebut, dan apa yang menjadi latar belakangnya.**

Menurut teori Sosiologi, setiap tindakan yang dilakukan manusia bukanlah tanpa sebab. Dengan pendapat Weber²⁴ yang menyatakan bahwa sejalan dengan asumsi mengenai kekuasaan, wewenang dan konflik, maka timbul konsepsi bahwa setiap perbuatan atau aksi manusia mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan mempunyai arti-arti tertentu bagi dirinya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan melalui perbuatan tertentu, yang dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin bertentangan dengan sistem ketertiban yang ada. Menurut teori-teori Psikologi, pertentangan ini disebabkan karena salah satu karakteristik perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensialnya. Maksudnya satu stimulus (rangsangan) dapat menimbulkan lebih dari satu tanggapan (respons) yang sama.

Selanjutnya, respons hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi

²⁴Lawrence M Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Publication, New York, 1975, hlm. 8.

individual. Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap obyek sikap.

Selain Weber, masih ada sarjana lain yang juga ikut berbicara tentang hukum. Terutama yang berkaitan dengan otonomi hukum dalam konteks kekuasaan, yaitu Philippe Nonet dan Philip Selznick.²⁵ Menurut kedua sarjana ini, hukum yang otonom dapat meredam kekuasaan. Secara historis, hal itu sudah terbukti lewat apa yang disebut "*Rule of Law*". Kelahiran *Rule of Law* sesungguhnya merupakan reaksi terhadap kesewenangan yang terjadi di abad lalu. Yang menarik untuk dicermati pendapat kedua sarjana ini adalah bahwa hukum harus terpisah dari politik. Artinya, harus ada pemisahan yang tegas antara fungsi judisial dengan fungsi legislatif. Kemudian aturan hukum harus menjadi barometer bagi semua tindakan para pejabat hukum yang berkuasa. Oleh karena itu yang menjadi tujuan utama dari hukum yang otonom adalah meletakkan dasar-dasar yang jelas bagi apa saja yang dilakukan penguasa kepada masyarakatnya, demikian juga sebaliknya. Jadi tindakan apa pun yang dilakukan penguasa kepada masyarakatnya, harus didasarkan pada ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian, semua pihak diminta untuk secara jujur melaksanakan

²⁵Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: toward Responsive Law*, Harper & Row Publishers, New York, 1978, hlm. 53 - 72

ketentuan yang berlaku sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Karena itu moral yang mendasari seluruh bekerjanya hukum yang otonom itu merupakan moralitas konstitusi.

Dalam sebuah dialog Socrates dan Meno, Socrates mengatakan bahwa pendapat yang benar, sebagaimana juga pengetahuan, dapat menjadi petunjuk yang baik dalam mencapai tujuan untuk bertindak secara benar. Plato berkeyakinan bahwa dengan metode dialektik Sokratik, mampu membawa manusia kepada pengetahuan lewat dialog-dialog dan percakapan dengan maksud untuk membawa partner bicara menuju pengertian yang benar.

Metode dialog ini diikuti oleh murid Plato, Aristoteles (384 – 322)²⁶ hingga abad 18 bermakna sebagai sebuah proses dialektis sebuah teknik investigasi untuk mendapatkan kebenaran lewat bertanya dan menjawab. Bahkan cara ini dianggap sebagai metode dan disiplin ilmu pengetahuan dan filsafat untuk membedakan kebenaran dari kesalahan. Cara ini pula dipakai untuk mencari jawaban atas sejumlah persoalan yang masih bersifat hipotetis untuk kemudian dianalisis agar dapat menghasilkan satu atau lebih prinsip-prinsip umum.

Kemudian konsep ini dikembangkan oleh sarjana-sarjana sesudah Aristoteles. Peter Sange²⁷ misalnya, memberikan uraian bahwa dialog adalah sebuah komunikasi, sebuah pertukaran pertanyaan dan jawaban untuk mencapai refleksi bersama.

²⁶Kessel, *op.cit.*, hlm. 60

²⁷*Ibid.*, hlm. 55

Pandangan keadilan Michael Walzer²⁸ yang mengatakan bahwa keadilan itu ditentukan secara konkret, menurut masing-masing wilayah permasalahan, sesuai dengan tuntutan intrinsik dan khas bidang masing-masing dalam kerangka nilai-nilai dan keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Begitu pula Michael Sandel mengatakan bahwa itu sangat tergantung subyeknya yang selalu terjadi dalam sebuah masyarakat dengan nilai-nilai tertentu.

Untuk lebih jelas bahwa tindakan manusia itu tidak semata-mata merupakan reaksi atas stimulus yang diterimanya, dapat digunakan teori dari Herbert Blumer.²⁹

Interaksi antar individu, diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi, atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing. Jadi dalam proses interaksi, manusia itu bukan suatu proses dimana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan atau respons. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respons yang terjadi sesudahnya, diantarai oleh proses interpretasi oleh si aktor, yang merupakan proses berfikir yang merupakan kemampuan yang khas yang dimiliki manusia.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

²⁸ Walzer, Michael., op.cit., hlm. 20 – 26

²⁹Teori Interaksi Simbolik modern dikatakan bahwa manusia saling menterjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain tetapi didasarkan atas “makna” yang diberikan terhadap tindakan orang lain.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ³⁰ bersifat **Yuridis Sosiologis**. Yuridis artinya melihat apa hukumnya (*law in the book*) dan sosiologis artinya melihat bagaimana kenyataannya (*law in action*). Pendekatan Yuridis Sosiologis (*Socio-Legal Research*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga sosial yang lain.

Penelitian ini mencoba menelusuri secara mendalam (*in depth*) dan nyata terhadap sebuah fenomena penerapan hukum pidana dari konteks sosial.³¹

Untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya aspek-aspek hukumnya serta mencoba mempelajari realitas empiris dalam masyarakat. Dalam hubungan ini karakteristik khusus dari analisis-analisis hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dan perilaku sosial.³²

Di dalam studi keilmuan hal yang demikian lazim digunakan dalam “*paradigmatic point of view*”. Seluruh penelitian kualitatif mempunyai kecenderungan untuk mendeskripsikan dan membuat jelas fenomena sosial yang penuh makna oleh cara pandang atau paradigma.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (Cet II)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 6

³¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10. Lihat Barda Nawawi Arief, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, makalah pada Penataran Metodologi Penelitian Hukum di UNSOED, Purwokerto, 1995, hlm. 4. Lihat juga Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 164 – 165. Lihat juga Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 16.

³²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³³

Adapun pertimbangan menggunakan metode kualitatif didasarkan atas pertimbangan, yaitu :

1. Penyesuaian penelitian kualitatif lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini mengajukan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.
3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi.

Sifat deskriptif penelitian ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberi gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu evaluasi dan interpretasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum.

Di samping bersifat deskriptif analisis, penelitian ini juga bersifat eksplanatoris, karena peneliti akan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa.

³³Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Y. A3, Malang, 1990, hlm. 2.

2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

Data primer :

- a. Wawancara tidak berstruktur atau “*unstructured interview*” yaitu pertanyaan diajukan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dengan tujuan agar arahnya lebih terbuka dan bisa didapatkan informasi yang lebih luas serta wawancara dapat berlangsung secara luwes. Tujuan wawancara adalah untuk melacak lebih jauh pemikiran para praktisi hukum yang tertuang dalam dokumen peradilan politik. Oleh karena itu wawancara akan dilakukan setelah pengumpulan data sekunder (dokumen) sudah selesai dilakukan.
- b. Data sekunder didapatkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumentasi-dokumentasi atau catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan (observasi) di lapangan.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dikumpulkan, diseleksi, dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian.

3. Sampel dan Lokasi Penelitian

Pengambilan sampel akan digunakan *metode purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu.

Penelitian ini akan mengambil lokasi di wilayah DKI Jakarta. Alasan pemilihan lokasi di Jakarta adalah karena Lembaga KOMNAS HAM berpusat di Jakarta. Informan yang dipilih adalah berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan karakteristik kualitatif, pengambilan sampel/informan berikutnya dan pilihan sampel akan berakhir. Setelah didapat indikasi “tak munculnya” variasi informan baru. Dibentuk Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc yang telah menyidangkan pelanggaran HAM berat di Timor Timur, di Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat.

4. Rancangan Analisis

Untuk menganalisis data dipergunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dipergunakan untuk kajian yang bersifat empiris (sosiologis).

Informasi atau data yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Sumber informasi lainnya yang akan diperoleh dari artikel maupun berita-berita mass media, hasil-hasil penelitian maupun tulisan terdahulu, kebijakan pemerintah, data statistik, dan sebagainya, juga akan dianalisis melalui studi kepustakaan.

Menurut McCall dan Simmons,³⁴ suatu usaha penelitian dengan menggunakan beberapa metode yang tujuannya pengamatan terlibat adalah deskripsi analitik (*analytic description*). Mereka berpendapat,

³⁴ McCall dan Simmons, 1969, hlm. 3.

deskripsi analitik lebih dari sekedar uraian jurnalistik, melainkan: **pertama**, menggunakan konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan generalisasi empiris dari suatu teori ilmiah sebagai panduan dasar dalam menganalisis dan menyajikan laporan penelitian; **kedua**, menggunakan koleksi, klasifikasi, dan laporan fakta yang menyeluruh dan sistematis; **ketiga**, menghasilkan generalisasi empiris yang baru (dan mungkin konsep dan proposisi juga) berdasarkan data tersebut. Pengujian teori dapat dilakukan dengan membandingkan deskripsi analitik berbagai kasus yang kompleks jika tersedia secara memadai dalam jumlah dan ragamnya.

Peneliti juga akan mempelajari karakteristik populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut dan akan membuat generalisasi berdasarkan data yang diperhatikan.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Teori
- G. Metode Penelitian

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian, Sejarah, Perkembangan dan Konsep Tentang HAM.
- B. Keberadaan Peradilan HAM dan Perkembangan Peradilan HAM di Indonesia.
- C. Pelanggaran Berat HAM sebagai Tanggung Jawab Negara.

Bab III : PEMBAHASAN

- A. Pelanggaran HAM Berat Pasca Pelaksanaan Jajak Pendapat Di Timor Timur.
- B. Peran Peradilan HAM Ad Hoc Dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM Berat Yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor Timur.

Bab IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN, SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN KONSEP TENTANG HAM

1. Pengertian dan Sejarah HAM

Hak-hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang sekadar karena orang itu adalah manusia. Gagasan yang sepintas tampak sederhana ini memiliki akibat-akibat politik dan sosial yang mendalam.

Hak-hak Manusia, karena hak-hak itu berdasarkan tak lebih daripada adanya sebagai manusia, bersifat universal, merata, dan tak dapat dialihkan. Hak-hak tersebut dimiliki oleh seluruh umat manusia, secara universal. Setiap masyarakat memiliki pengertian mengenai keadilan, kejujuran, martabat, dan rasa hormat.

Gagasan hak-hak asasi manusia pada awalnya berkaitan dengan kelas-kelas menengah. Melawan tuntutan-tuntutan asal-usul derajat kebangsawanan serta hak-hak istimewa tradisional, kaum borjuis yang menanjak di Eropa modern awal mengajukan tuntutan-tuntutan politis yang didasarkan pada persamaan kodrati manusia serta hak-hak kodrati yang tak dapat dipindahtangankan.

Persetujuan Internasional tentang hak-hak asasi manusia telah diselesaikan dalam bulan Desember 1966. Bersama dengan Deklarasi

Universal, piagam-piagam itu mewakili suatu pernyataan berwibawa tentang hak-hak asasi manusia yang diakui secara Internasional.

Sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang beradab dan sebagai anggota PBB, bangsa Indonesia perlu mengkaji berbagai keputusan PBB mengenai HAM. Setiap bangsa tidak dapat menutup mata terhadap fenomena maraknya isu Internasional mengenai HAM, tidak terkecuali bangsa dan pemerintah Indonesia.

Mulai tahun 1990-an, persoalan hak-hak asasi manusia (HAM) semakin marak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan anggota masyarakat, baik individual maupun kolektif terhadap pelanggaran HAM yang dialaminya.

Secara umum, apa yang dinamakan HAM adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia”, atau dalam bahasa Inggrisnya *human rights*, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah “hak-hak asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam

bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, di samping dipergunakan istilah *human rights*, dipakai juga istilah *civil rights*.³⁵

Dalam pengertian universal, HAM diartikan sebagai hak kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Sementara itu, dalam buku “*ABC, Teaching of Human Rights*” yang dikeluarkan oleh PBB, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia, dan tanpa itu tidak dapat hidup layaknya seorang manusia (*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live a human being*).

Terhadap pengertian HAM itu sendiri, terdapat beberapa batasan yang berbeda-beda, meskipun pada intinya mengandung makna yang sama. Miriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.³⁶ Miriam menambahkan, secara umum diyakini bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Gunawan Setiardja mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat

³⁵Ramdlon Naning, *Cita dan Citra HAM di Indonesia*, LKUI, Jakarta, 1983, hlm. 7.

³⁶Miriam Budiardjo, 1994, *HAM di Indonesia*. Karangan dalam “*Esei Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM di Indonesia*”, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1994, hlm. 429.

yang dimiliki manusia sebagai manusia.³⁷ Dan apabila ditinjau secara obyektif, Gunawan Setiardja menyatakan bahwa HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh pemerintah. Oleh karenanya, HAM apabila ditinjau secara obyektif berhubungan dengan kodrat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi, sehingga landasan HAM ada dua, yaitu:

1. Landasan yang langsung dan pertama : kodrat manusia.
2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam : Tuhan sendiri yang menciptakan manusia.³⁸

Arief Budiman, seorang sosiolog berpendapat bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung HAM itu melekat pada dirinya sebagai manusia, dalam hal ini HAM berdiri di luar undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan antara hak warga negara dan HAM.³⁹

Hampir senada dengan pendapat Arief Budiman, Ramdlon Naning mendefinisikan HAM sebagai hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut

³⁷Gunawan Setiardja, *HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 73.

³⁸Gunawan Setiardja, 1993, hlm. 74.

³⁹Suara Merdeka, 21 Desember 1992.

kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.⁴⁰

Terlepas dari berbagai pendapat mengenai definisi HAM dalam penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi Negara setempat. Perbedaan struktur sosial antara bangsa-bangsa dalam upayanya untuk memajukan HAM di negeri masing-masing. **Satjipto Rahardjo**⁴¹ mengemukakan,

*“Barangkali faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat boleh diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya menentukan kualitas penegakan HAM di suatu negeri. Bolehlah kiranya dibuat postulat, bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan suatu bangsa, semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM di situ”.*⁴²

Sehubungan dengan struktur sosial bagi penegakan HAM, **Satjipto** menambahkan:

*“...maka menjadi penting usaha untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi memajukan HAM. Dalam hubungan ini, maka peranan pendidikan dan penciptaan kesadaran HAM menjadi usaha yang sangat strategis. Pendidikan dan lainnya itu ditujukan terhadap sekalian lapisan dan golongan masyarakat, tetapi barang tentu dengan prioritas kepada golongan atau pihak-pihak yang secara lebih potensial berada pada posisi untuk melakukan pelanggaran HAM.”*⁴³

Penciptaan struktur sosial yang kondusif ini hendaknya juga dikembangkan di kalangan Internasional, sehingga tidak terjadi saling menyerang dan menunjuk kekurangan negara lain dalam penegakan HAM. Apabila masing-masing negara menyadari bahwa penerapan

⁴⁰Ramdlon Naning, 1983, hlm. 8.

⁴¹Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Beliau juga mengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan termasuk anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

⁴²Kompas, 26 Desember 1995.

⁴³Kompas, 26 Desember 1995.

HAM itu harus memperhatikan struktur sosial dan budaya setempat, maka saling menuduh antar negara itu tidak akan terjadi.

Indonesia yang mengukuhkan diri sebagai negara hukum mempunyai prinsip tersendiri. Berdasarkan berbagai pendapat yang berkembang, secara teori konstitusional, sebagai negara hukum Indonesia harus memiliki empat prinsip, yaitu:

- Setiap perbuatan warga negaranya harus sesuai hukum;
- Pembagian kekuasaan negara yang jelas dalam negara;
- Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas;
- Adanya pengakuan terhadap HAM.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai negara hukum, yang salah satu cirinya adalah mengakui adanya HAM, maka pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam masalah HAM ini. HAM di Indonesia merupakan pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kesatuan dengan sila-sila lainnya.

Di samping faktor-faktor internal, maka banyak pula faktor eksternal yang mendorong bangsa Indonesia untuk memperhatikan masalah-masalah HAM secara lebih sungguh-sungguh. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain adalah banyaknya negara maju yang selalu berusaha untuk mengkaitkan politik luar negerinya, khususnya bantuan luar negerinya dengan masalah perlindungan HAM di suatu negara.

Konsepsi tentang HAM dewasa ini telah berkembang pesat dari sekedar merupakan wujud sempit dari paham liberal dan individualis

menuju ke arah paham kemanusiaan yang lebih luas dan lebih mendasar. Itulah yang menyebabkan mengapa HAM ini semakin lama semakin mendapatkan dukungan luas, baik dalam konteks hubungan Internasional maupun perkembangan dalam negeri suatu negara.

Dalam tahap perkembangannya sekarang, pemantauan dan penegakan HAM telah didukung oleh perangkat yang lengkap, yang meliputi instrumen dan mekanisme HAM Internasional, regional dan nasional, yang saling menunjang satu sama lain. Negara yang mengabaikan kenyataan ini akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungan luar negerinya, padahal hubungan luar negeri ini semakin lama semakin penting dalam abad 21 mendatang.

Kondisi penghayatan dan penegakan HAM di Indonesia masih belum memuaskan karena berbagai faktor, yang pada hakekatnya bermuara pada masalah sentral, yaitu belum adanya interpretasi kolektif yang padu (*uniform collective interpretation*) antara anggota masyarakat, baik yang bergerak di lingkungan infrastruktur, suprastruktur maupun transtruktur. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah adanya kecenderungan beberapa kelompok anggota masyarakat untuk berfikir secara dikhotomis (*dichotomy thinking*) seperti Sipil – ABRI, Infra – Suprastruktur, penguasa – masyarakat, dan sebagainya, yang membahayakan integrasi nasional.⁴⁴

⁴⁴Muladi, *Pemasyarakatan HAM Melalui Pendidikan Formal*, Makalah Lokakarya Nasional II HAM, Deplu – KOMNAS, Jakarta, 1994.

2. Perkembangan dan Konsep Tentang HAM

Masalah konsepsi HAM masih diperdebatkan dalam forum Internasional. Menurut N. Hassan Wirajuda, perdebatan ini berkisar pada : **pertama**, apakah nilai-nilai HAM bersifat universal, yang berarti berlaku di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja, ataukah implementasinya perlu memperhitungkan kekhasan (*particularity*) dari suatu negara atau kawasan dengan memperhatikan segi-segi tradisi, agama, budaya, serta tingkat pembangunan suatu bangsa. **Kedua**, apakah penonjolan HAM hanya dari satu sisi hak sipil dan politik, ataukah melihat HAM sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam berbagai aspeknya, yakni hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. **Ketiga**, dipersoalkan manakah yang benar, pandangan yang melihat HAM hanya dari segi hak, atau yang melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban. **Keempat**, apakah hanya melihat kedudukan manusia individu atau juga sebagai warga masyarakat dan negara.⁴⁵

Pada prinsipnya, sebenarnya semua negara di dunia ini menjunjung tinggi konsep HAM. Meskipun demikian, pelaksanaan konsep tersebut telah menjadi persoalan besar bukan saja pada tingkat politik dalam negeri tetapi juga pada tingkat hubungan Internasional. Tampaknya konsep HAM yang dianut oleh negara-negara Barat berbeda dengan konsep yang dianut oleh negara-negara Dunia Ketiga (negara Timur).

⁴⁵Bambang W. Soeharto, *HAM Menurut Pancasila dan UUD 1945 Serta Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Bawahnya*, (Makalah Seminar), FH Trisakti – ICRC, Cipayung, 1996.

Perbedaan konsep Barat dan Timur terlihat jelas pada konferensi dunia mengenai HAM yang diselenggarakan oleh PBB di Wina, Austria, pada bulan Juni tahun 1993. Sebelum konferensi itu berlangsung, telah diselenggarakan konferensi regional di Bangkok untuk menghasilkan suatu deklarasi bersama di antara negara-negara Asia mengenai masalah itu. Deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok itu mencerminkan sebagian besar “Pandangan Timur” mengenai HAM walaupun sebenarnya pernyataan yang termuat di dalamnya merupakan hasil kompromi antara pandangan negara-negara seperti Jepang dan Filipina yang lebih mementingkan hak-hak individu ala Barat di satu pihak, dengan pandangan mayoritas yang mengutamakan hak komunal, yaitu hak masyarakat secara keseluruhan di pihak yang lain.

Menurut pandangan Timur, pelaksanaan hak-hak asasi tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan politik. Setiap negara mempunyai kebudayaan sendiri, sehingga apa yang dianggap baik dan biasa di suatu negara belum tentu baik dan biasa di negara lain. Kebudayaan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan kebudayaan Barat lebih mementingkan kepentingan individu. Berbeda dengan doktrin liberal Barat, pendekatan Timur lebih mengarah kepada konsep negara yang integralistik (*integralistic state*) dimana setiap bagian masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing.

Konsep tentang HAM menurut Barat secara formal dapat dibaca dalam Deklarasi Kemerdekaan 13 negara bagian Amerika Juli 1776,

yang pada intinya adalah bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh penciptanya dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, kemerdekaan dan kebebasan untuk mengejar kebahagiaan.⁴⁶

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara umum merumuskan konsep modern tentang hak asasi sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.⁴⁷ Dengan demikian, hak asasi manusia dikonsepkan sebagai suatu standar umum bagi kehidupan manusia.

Bangsa Indonesia juga mengakui keberadaan HAM ini, serta mempunyai konsep sendiri tentang HAM, diantaranya dapat dilihat dari rumusan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Wanhankamnas merumuskan HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan universal, dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak atas hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.⁴⁸

Timbulnya HAM juga tidak dapat dipisahkan dari konsepsi absolutisme yang diterapkan dalam beberapa negara Eropa. Hal ini terjadi di Inggris dan Perancis. Dalam kedua negara yang pemerintahannya menganut sistem kerajaan itu semua cabang

⁴⁶Masyhur Efendi, *HAM : Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18

⁴⁷United Nations, *Human Rights: Questions and Answer*, 1987, hlm. 4.

⁴⁸Bambang W. Soeharto, 1996, hlm. 8.

kekuasaan, yaitu yang menurut teori Trias Politica Montesquieu meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial berada di tangan seorang raja.⁴⁹ Dengan demikian raja di kedua negara tersebut memegang dan melaksanakan sekaligus kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Konsepsi inilah yang kemudian memunculkan teori pemisahan kekuasaan dari John Locke dan Montesquieu. Timbulnya teori tentang pemisahan kekuasaan ini juga membawa pengaruh terhadap berkembangnya sistem politik demokrasi dan keharusan adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.

Di dunia Barat, pemikiran mengenai HAM berawal dari abad XVII dengan timbulnya konsep mengenai Hukum Alam serta hak-hak alam. Dalam tulisan beberapa filsuf pada Masa Pencerahan (*Enlightenment*) yang menganut liberalisme seperti Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632 – 1704), Montesquieu (1689 – 1755) dan J.J. Rousseau (1712 – 1778) nampak adanya bayangan akan adanya suatu keadaan dimana manusia hidup dalam keadaan alam (*state of nature*). Manusia dalam keadaan alam ini sama derajat (*equal*), semua tunduk kepada Hukum Alam, dan semua memiliki hak-hak alam.

Pada suatu saat, manusia dengan memakai akalnya (rasio) sampai kepada kesimpulan, bahwa untuk menjamin terlaksananya hak-hak alam itu, perlu meninggalkan keadaan alam tersebut, dan mengganti dengan kehidupan bernegara berdasarkan suatu kontrak

⁴⁹Sri Soemantri Martosoewignjo, *HAM Dalam Hukum Positif Indonesia*, Makalah Penataran Dosen Hukum Humaniter se-Indonesia, FH Trisakti, Cipayung, 1996, hlm. 1.

sosial antara penguasa dan masyarakat. Inilah yang dinamakan Teori Kontrak Sosial.⁵⁰ Hak asasi manusia pada tahap ini masih terbatas pada hak-hak di bidang politik seperti hak atas kebebasan, hak atas kesamaan derajat, dan hak untuk menyatakan pendapat.

Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh Rousseau ini dianut oleh negara-negara Eropa dan Amerika, sehingga meningkatkan pergerakan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang asasi. Ajaran Rousseau dan juga John Locke ini dipegang teguh oleh kaum revolusioner di Amerika dan Perancis, sehingga ditetapkan "*Declaration of Rights 1776*" Virginia.

Declaration of Independence yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian dalam Revolusi Amerika merupakan Piagam HAM juga. Perkembangan ini berlanjut dengan diterimanya UUD AS tanggal 17 September 1787 yang mulai berlaku tanggal 4 Maret 1789. Di Perancis, perkembangan ini melahirkan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* tahun 1789. Akhirnya pada tahun 1791 semua hak-hak asasi manusia dicantumkan dalam Konstitusi Perancis, juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795.

Dicantumkannya hak-hak asasi manusia di dalam konstitusi seperti di Amerika dan Perancis ini diikuti pula oleh Belgia pada tahun 1831, Jerman 1919, Australia dan Cekoslowakia 1920, dan Uni Soviet tahun 1936. Dengan adanya *Declaration of Independence*, Amerika

⁵⁰Miriam Budiardjo, *Konsepsi Barat dan Non Barat Mengenai HAM*, Makalah Penataran Dosen Hukum Humaniter, FH Trisakti – ICRC, Cipayung, 1996, hlm. 143.

Serikat dianggap sebagai negara pertama yang memberi perlindungan dan jaminan HAM dalam konstitusinya.⁵¹

Perkembangan pemikiran tentang konsepsi HAM itu menuntut perlindungan terhadap hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, bukan hanya hak-hak yang bersifat yuridis politis saja. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi yang mencakup bidang yang lebih luas lagi itu, Presiden Amerika, Franklin D. Roosevelt pada tahun 1941 merumuskan empat macam hak asasi, yang dikenal dengan sebutan "*The Four Freedom*", yaitu kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*), dan kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*).⁵²

Setelah Presiden Franklin D. Roosevelt merumuskan "Empat Kebebasan", muncullah Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional sebagai bagian dari integral Empat Kebebasan tersebut, yang disahkan pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco. Dalam *Charter of the United Nations 1946 Pasal 55* digariskan bahwa PBB (UNO) diperintahkan untuk menganjurkan agar hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya ditaati.

Mulai tahun 1946, yaitu setelah usainya Perang Dunia II, disusunlah rancangan Piagam HAM oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi PBB yang terdiri dari 18 anggota. Sidangnya dimulai

⁵¹Ramdlon Naning, 1983, hlm. 11.

⁵²Miriam Budiardjo, 1994, hlm. 144.

bulan Januari 1947 yang dipimpin oleh Ny. Eleanor Roosevelt. Dua tahun kemudian, Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Paris pada tanggal 10 Desember 1948 menerima baik hasil kerja panitia tersebut. Lahirlah *Universal Declaration of Human Rights* yang terdiri dari 30 pasal yang sarat dengan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia. Dari 58 negara yang hadir, 48 negara menyatakan persetujuannya.

Majelis umum PBB memproklamirkan Pernyataan Sedunia tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) itu sebagai “*a common standart of achievement for all people and nations*”, yaitu suatu tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaksud dalam pernyataan tersebut. Meskipun UDHR ini hanya berupa pernyataan, dan bukan berbentuk perjanjian (*convention*), namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban mematuhi dan menerapkannya.

Dalam deklarasi tersebut, manusia mendapat posisi sentral, dimana harkat dan martabat manusia, hak-hak dan kebebasan asasinya dijunjung tinggi dengan tidak ada pengecualian apapun seperti bangsa, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, keyakinan politik, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lainnya.

Pada alinea pertama Mukadimah Pernyataan Sedunia tentang HAM tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa sesungguhnya hak-hak

kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu setiap manusia berhak akan kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadinya.

B. KEBERADAAN PERADILAN HAM DAN PERKEMBANGAN PERADILAN HAM DI INDONESIA

1. Perkembangan Melalui Instrumen Hukum dan Kelembagaan

a. Instrumen Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat lima pasal yang mengatur tentang HAM, yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 31. Apabila hal ini kita bandingkan dengan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, ternyata kedua konstitusi yang disebut terakhir, lebih maju dalam mengatur HAM, karena kedua konstitusi ini sudah mengaturnya secara rinci dalam banyak pasal. Konstitusi RIS 1949 mengaturnya dalam 35 pasal, yaitu Pasal 7 sampai dengan Pasal 41, sedangkan UUDS 1950 mengatur dalam 37 pasal, yaitu Pasal 7 sampai dengan Pasal 34. Perkembangan ini adalah merupakan akibat dari dideklarasikannya "*Universal Declaration of Human Right*" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, yang telah mempengaruhi kedua konstitusi tersebut.

Dalam HAM 1998 – 2003, telah ditetapkan program kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan beberapa perangkat (instrumen) Internasional hak asasi manusia yang perlu mendapat prioritas untuk segera diratifikasi berdasarkan rekomendasi dari institusi pemerintah dan LSM.

2. Harmonisasi perundang-undangan nasional.

Sesuai dengan tahapan-tahapannya, sebagian dari program kegiatan ini sudah jalan, terbukti diratifikasinya beberapa Konvensi Internasional tentang HAM dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Harmonisasi perundang-undangan nasional di bidang HAM, dilakukan antara lain dengan merevisi perundang-undangan yang berlaku dan merancang undang-undang yang baru sesuai isi instrumen Internasional HAM yang telah diratifikasi.

Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan amandemen kedua atas Undang-Undang Dasar 1945, berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, dengan menambahkan Bab XA dengan judul hak asasi manusia. Bab ini terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

2. Menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain memuat sebagai berikut:

- a. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat.
 - b. Menugaskan kepada Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera meratifikasi berbagai instrumen Internasional tentang hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 4. Mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b. Kelembagaan

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Dalam pemberian perlindungan terhadap HAM selain diperlukan instrumen hukum, baik instrumen hukum Internasional (berupa konvensi) maupun instrumen hukum nasional (berupa peraturan perundang-undangan), juga diperlukan instrumen yang bersifat kelembagaan.

Melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993, pada tanggal 7 Juni 1993, telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Tujuan dibentuknya KOMNAS HAM adalah untuk:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁵³

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas KOMNAS HAM melaksanakan beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengkajian.
- b. Penelitian.
- c. Penyuluhan.
- d. Pemantauan.
- e. Mediasi tentang hak asasi manusia.⁵⁴

Selanjutnya, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa KOMNAS HAM dalam melaksanakan fungsi-fungsinya bertugas dan berwenang melakukan hal-hal berikut:

a. Fungsi Pengkajian dan Penelitian

Dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, KOMNAS HAM bertugas dan berwenang atas hal-hal berikut:

⁵³Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁵⁴Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

1. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen Internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.
2. Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian.
4. Melakukan studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia.
5. Melakukan pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
6. Melakukan kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun Internasional dalam bidang hak asasi manusia.

b. Fungsi Penyuluhan

Dalam melaksanakan fungsi penyuluhan, KOMNAS HAM bertugas dan berwenang atas hal-hal berikut:

1. Melakukan penyebaran wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.

2. Melakukan peningkatan upaya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia, melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.
3. Melakukan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional maupun Internasional dalam bidang hak asasi manusia.

c. Fungsi Pemantauan

Dalam melaksanakan fungsi pemantauan, KOMNAS HAM, bertugas dan berwenang atas hal-hal berikut:

1. Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
2. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
3. Melakukan pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban, maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
4. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
5. Melakukan peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
6. Melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau

menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya, dengan persetujuan ketua pengadilan.

7. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan.
8. Melakukan pemberian pendapat berdasarkan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat KOMNAS HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

d. Fungsi Mediasi

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, KOMNAS HAM, bertugas dan berwenang atas hal-hal berikut:

1. Melakukan perdamaian kedua belah pihak.
2. Melakukan penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negoisasi, konsiliasi, dan penilai ahli.
3. Melakukan pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
4. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah.
5. Melakukan penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

KOMNAS HAM dibentuk di Jakarta dan dapat mendirikan perwakilan di daerah. Pendirian perwakilan KOMNAS HAM ini sebaiknya diprioritaskan di daerah-daerah yang rawan terhadap pelanggaran HAM, seperti di daerah Aceh, Maluku, Irian jaya, dan lain-lain.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, anggota KOMNAS HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang, yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas usulan dari KOMNAS HAM dan diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Masa jabatan anggota KOMNAS HAM selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. KOMNAS HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari anggota.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota KOMNAS HAM, adalah sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya.
3. Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara atau pengemban profesi hukum lainnya.

4. Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.⁵⁵

Dengan adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM harus dijabat oleh seorang pegawai negeri,⁵⁶ dalam pelaksanaannya bisa mengurangi independensi dari KOMNAS HAM sendiri. Karena hal ini akan membuka peluang bagi pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam urusan rumah tangga KOMNAS HAM, setidaknya dalam bidang administrasi dan keuangan. Apalagi bila diingat bahwa jabatan Sekretaris Jenderal dalam suatu organisasi merupakan motor penggerak, sehingga bisa berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh KOMNAS HAM.

Oleh karena itu, untuk menjaga independensi KOMNAS HAM, sebaiknya Sekretaris Jenderal KOMNAS HAM dipilih dari dan oleh anggota KOMNAS HAM, sama halnya dengan Ketua dan Wakil Ketua KOMNAS HAM.

Menurut ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang atau sekelompok orang berhak mengajukan laporan dan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMNAS HAM, apabila memiliki alasan yang kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar. Pengaduan tersebut hanya akan dilayani apabila disertai identitas pengadu yang benar dan

⁵⁵Pasal 84 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

⁵⁶Pasal 81 ayat (3).

disertai keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

Apabila pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang dilanggar Hak Asasinya, kecuali untuk pelanggaran HAM tertentu berdasarkan pertimbangan KOMNAS HAM. Pengaduan melalui perwakilan KOMNAS HAM dilakukan melalui prosedur yang sama dengan yang berlaku di KOMNAS HAM di Jakarta.

Pemeriksaan atas pengaduan dapat dihentikan apabila:

- a. Tidak memiliki bukti awal yang memadai.
- b. Materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Pengaduan diajukan dengan etiket buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu.
- d. Terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan, atau
- e. Sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵⁷

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pihak pengadu, korban, saksi atau pihak lainnya yang terkait dalam pelanggaran HAM wajib memenuhi permintaan KOMNAS HAM. Apabila pihak-pihak tersebut di atas tidak memenuhi pemanggilan atau menolak memberi keterangan, maka KOMNAS HAM dapat meminta ketua

⁵⁷Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc

Berhubung Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat, di luar Pengadilan HAM, yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dibentuk dengan undang-undang.

2. Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Dalam masyarakat Internasional hak asasi manusia telah diakui secara resmi, dengan dideklarasikannya "*Universal Declaration of Human Rights*" (Pernyataan Sejangat tentang Hak Asasi Manusia) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948. Lebih lanjut, hak-hak asasi manusia tersebut dijabarkan dalam berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk Konvensi Internasional tentang HAM.

Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) RI melalui Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM, menugaskan kepada semua lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh warga masyarakat dan segera meratifikasi berbagai instrumen berbagai instrumen PBB tentang

HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁸

Perlindungan terhadap HAM sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, selain menggunakan instrumen hukum, dapat pula dilakukan melalui instrumen dan kelembagaan, baik yang bersifat nasional maupun Internasional. Perlindungan HAM melalui kelembagaan dapat dilakukan melalui Komisi HAM PBB, Mahkamah Internasional dan secara nasional melalui KOMNAS HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pembentukan KOMNAS HAM telah dilakukan sebelum ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, melalui Keppres Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 7 Juli 1993, sedangkan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia, tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara nasional, tetapi juga memenuhi tuntutan masyarakat Internasional. Kebijakan PBB dalam upaya perlindungan terhadap HAM secara universal melalui beberapa instrumennya memberi kewenangan kepada PBB untuk terlibat secara langsung dalam suatu negara yang berdaulat, dengan alasan untuk melindungi HAM. Beberapa contoh campur tangan PBB melalui pasukan multinasional, di negara-negara yang diduga telah

⁵⁸Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

melakukan pelanggaran HAM berat, seperti di Bosnia, Kosovo dan Serbia. Apabila Komisi HAM PBB, melihat suatu negara tidak mampu melindungi hak asasi warga negaranya dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara bersangkutan, maka Komisi HAM PBB dapat merekomendasikan campur tangan PBB dan mengadili para pelakunya di Pengadilan Internasional.

Seperti dikemukakan oleh **Frederick Julius Stahl**, suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 (empat) unsur penting, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan.
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari hal ini jelas bagi kita bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur pertama bagi suatu negara hukum.

Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi kita, yaitu:

“mewujudkan suatu Indonesia Baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum.”

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan terhadap keberadaan Pengadilan HAM di Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan HAM, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “*extra ordinary crimes*” dan berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun Internasional, dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam penanganan hak asasi manusia berat adalah sebagai berikut:
 - a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim Ad Hoc, penyidik Ad Hoc, penuntut umum Ad Hoc, dan hakim Ad Hoc.
 - b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.
- d. Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi.
- e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.⁵⁹

3. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan penugasan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai badan legislatif menetapkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (*Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 165*). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, melalui Pasal 104 memerintahkan pembentukan Pengadilan HAM, dengan rumusan sebagai berikut:

Ayat (1) : “Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum”.

Ayat (2) : “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.”

Ayat (3) : “Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kasus-

⁵⁹Penjelasan UU. No. 26 Tahun 2000.

kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.”

Menurut ketentuan pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut di atas, Pengadilan HAM tersebut harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sesudah Undang-undang ini diundangkan.

Disamping itu, tidak kalah pentingnya, dengan semakin cepat dibentuknya Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc, semakin cepat pula perkara-perkara pelanggaran HAM berat bisa diselesaikan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyatakan sebagai berikut.

Ayat (1) : “Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di daerah kabupaten, atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.”

Ayat (2) : “Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Hak Asasi Manusia berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan negeri yang bersangkutan”.

Berhubung Pengadilan HAM ini berada di lingkungan peradilan umum, maka dasar hukum pembentukannya tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Republik Indonesia*

Tahun 1970 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147*) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20*).

4. Tempat Kedudukan dan Susunan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

a. Tempat Kedudukan

Menurut ketentuan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian Pengadilan HAM bukanlah merupakan sistem peradilan yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari Pengadilan Negeri.

Pengadilan HAM berkedudukan di setiap kabupaten atau kota, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menurut ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makasar yang daerah khususnya meliputi:

- 1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat*, meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Banten, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Lampung, Propinsi Bengkulu, Propinsi Kalimantan Barat, dan Propinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Surabaya*, meliputi Propinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Propinsi Bali, Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Makasar*, meliputi Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Maluku, Propinsi Maluku Utara, dan Propinsi Irian Jaya.
- 4. Pengadilan Hak Asasi Manusia Medan*, meliputi Propinsi Sumatera Utara, daerah Istimewa Aceh, Propinsi Riau, Propinsi Jambi, dan Propinsi Sumatera Barat.

b. Susunan Majelis Hakim

Susunan majelis Hakim Pengadilan HAM terdiri atas 5 (lima) orang hakim yang berasal dari hakim Pengadilan HAM yang bersangkutan 2 (dua) orang dan 3 (tiga) orang hakim Ad Hoc. Untuk setiap Pengadilan HAM diangkat 12 (dua belas) orang hakim Ad Hoc. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim Ad Hoc diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Menurut penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, hakim Ad Hoc adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia.

5. Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Penentuan kompetensi Pengadilan HAM sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan HAM dengan Pengadilan Pidana.

Pembunuhan atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang (hak untuk hidup) dan perbuatan ini dapat dijera melalui pasal 340 KUHP, dan diadili oleh Pengadilan Pidana dan bukan oleh Pengadilan HAM.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Dari ketentuan pasal ini, jelas bagi kita bahwa tidak semua pelanggaran HAM dapat diadili oleh Pengadilan HAM tetapi terbatas pada “pelanggaran HAM berat”. Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Pelanggaran HAM berat meliputi:

- a. Kejahatan genosida.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok,
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya,
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok,

5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁶⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan **kejahatan kemanusiaan** adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal berikut:

1. Pembunuhan.
2. Pemusnahan.
3. Perbudakan.
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum Internasional.
6. Penyiksaan.
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional.

⁶⁰Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000.

9. Penghilangan orang secara paksa.

10. Kejahatan apartheid.⁶¹

Pengadilan HAM menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, disamping berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*asas teritorialitet*), juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar teritorial wilayah Kesatuan Republik Indonesia (*asas nasionalitet*). Tujuan dimuatnya ketentuan ini adalah untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di luar negeri, karena dengan ketentuan ini mereka dapat diadili dan dihukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pasal 6 memberikan pengecualian berkenaan dengan **Wewenang Pengadilan HAM** sebagai berikut.

“Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.”

Hal ini berarti bahwa seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran HAM berat tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan oleh Pengadilan HAM.

⁶¹Pasal 9 UU. Nomor 26 Tahun 2000.

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dinyatakan bahwa dalam kewenangan memeriksa dan memutus yang dimiliki Pengadilan HAM, termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan HAM hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pelanggaran HAM berat itu terdiri dari:

1. Kejahatan genosida,
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan untuk dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya serangan yang meluas atau sistematis.
2. Diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
3. Serangan itu sebagai kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Apabila kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka perbuatan itu digolongkan pada tindak pidana biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), diadili oleh Pengadilan Pidana dan bukan oleh Pengadilan HAM.

C. PELANGGARAN HAM BERAT SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA

Penerapan prinsip tanggung jawab negara (*the principle of state responsibility*) dengan masalah pelanggaran HAM berat melalui studi komparatif. Bentuk penyelesaian negara hukum atas pelanggaran HAM berat yang dipraktikkan di berbagai negara, seperti di bekas Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, Indonesia dan Timor Timur.

Berbagai bentuk penyelesaian yang dapat dianggap sebagai model penyelesaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, di tingkat Internasional dilakukan dengan cara membentuk Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc (*International Ad Hoc Tribunal*) berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY), tahun 1993 dan *International Criminal Tribunal of Rwanda* (ICTR). Kedua, di tingkat nasional dilakukan dengan cara membentuk Pengadilan HAM Permanen yang dilakukan di Indonesia, ada pula yang dilakukan dengan cara membentuk pengadilan “campuran” (*hybrid tribunal*), seperti yang dipraktikkan di Sierra Leone dan Timor Timur.

Model penyelesaian dengan cara membentuk Pengadilan HAM Permanen di tingkat nasional dapat dikatakan merupakan suatu hal yang baru dalam rangka menegakkan norma HAM. Pembentukan

Pengadilan HAM di Indonesia secara institusional telah meletakkan dasar bagi upaya perlindungan dan penghormatan HAM.

Sementara itu, pembentukan pengadilan campuran juga merupakan model penyelesaian yang belum lama dipraktikkan. Dikatakan “campuran”, karena para personil yang bertugas di dalamnya (seperti hakim, jaksa, dan pengacara) merupakan orang yang berasal dari berbagai kebangsaan (lokal dan Internasional). Disamping itu, hukum yang diterapkan dalam proses pengadilan juga bersifat “campuran”, yaitu hukum nasional dan Internasional seperti berbagai Konvensi HAM Internasional.

Berbagai instrumen hukum HAM Internasional mewajibkan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM setiap individu.

Namun, keberadaan instrumen tersebut tidak dengan sendirinya dapat mengakhiri maupun mencegah pelanggaran HAM di berbagai negara. **Dinah Shelton** menyatakan,⁶²

“there are close to one hundred human rights treaties adopted globally and regionally. Nearly all states are parties to some of them and several human rights norms have become part of customary international law. Yet, like all law, human rights law is violated. It has not ended governmental oppression and by itself cannot prevent or remedy all human rights abuses.”

Dalam berbagai kasus, penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM seringkali tidak berpihak kepada korban, namun justru dilakukan untuk melindungi para pelaku. Antara lain seperti dengan cara memberikan amnesti.

⁶²Dinah Shelton, *Remedies in International Human Rights Law*, Oxford University Press, New York, 1999, hlm. 14.

Tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan HAM dikembangkan dari hukum tanggung jawab negara yang mengatur perlakuan terhadap orang asing. Di dalamnya terkandung aturan mengenai cara bagi orang asing untuk mengajukan tuntutan akibat dari perlakuan yang salah dari negara terhadap dirinya.

Dari hal tersebut di atas, kemudian dikembangkan prosedur dalam hukum HAM Internasional yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM untuk mengajukan tuntutan secara langsung terhadap negara. **Dinah Shelton** menjelaskan,⁶³

“International human rights law has developed innovative procedures to allow victims of human rights violations to bring complaints directly against the offending state. Prior to development of these procedures, violations of international law –including those involving the mistreatment of individuals –were met with responses under the law of state responsibility. This traditional body of law, particularly the part of it that concerns the mistreatment of aliens, contains useful precedents for evaluating the nature and scope of remedies afforded in state practices.”

Hukum tanggung jawab negara juga mewajibkan suatu negara untuk melakukan pemulihan manakala negara tersebut gagal untuk melaksanakan, dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dapat diatribusikan kepadanya, suatu kewajiban menurut hukum Internasional.

Hukum tanggung jawab negara dapat diterapkan terhadap pelanggaran HAM, sebab hal itu menimbulkan pelanggaran terhadap kewajiban Internasional.

⁶³*Ibid*, hlm. 93.

Konsep tanggung jawab sesungguhnya telah dikenal dalam setiap sistem hukum, baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum Internasional. **C. de Rover** menyatakan,⁶⁴

"In any legal system there must be liability for failure to observe obligations imposed by its rules. Municipal law distinguishes between civil and criminal liability based upon deliberate or neglect acts or omissions that constitute an offence under that law. In international law such liability is known as responsibility. Responsibility arises for the breach of any obligation owed under international law."

Masalah tanggung jawab negara hingga saat ini masih merupakan bidang yang belum diatur secara jelas di dalam hukum Internasional.⁶⁵ Pembahasan tentang tanggung jawab negara sebenarnya telah dilakukan oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) sejak sesi pertama (1949) hingga telah memasuki sesi ke-53 (2001). Oleh karena itu, sumber-sumber hukum Internasional lainnya seperti hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan Mahkamah Internasional (IJC) yang berkaitan dengan penerapan prinsip tanggung jawab negara dapat digunakan sebagai dasar hukum bagi penyelesaian masalah pelanggaran HAM.

Dilaksanakannya proses hukum secara tuntas bagi para pelaku pelanggaran HAM berat di lingkup nasional oleh negara pelanggar merupakan bentuk tanggung jawab negara yang diatur dalam hukum HAM Internasional. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka selanjutnya mekanisme Internasional akan bertindak.

⁶⁴C. de Rover, *To Serve and to Protect human Rights and Humanitarian Law for Police and Security Forces*, ICRC, Geneva, 1998, hlm. 48.

⁶⁵Robert L. Bledsoe dan Boleslaw A. Boczek, *The International Law Dictionary*, ABC-Clio. Inc, California, 1987, hlm. 57

Mekanisme Internasional pada dasarnya lebih bersifat sebagai pelengkap dan akan diberlakukan apabila mekanisme nasional tidak dilaksanakan. Dapat dikemukakan misalnya prinsip komplementer yang dimuat dalam **Statuta ICC**.⁶⁶

“The ICC should also act as a catalyst for national prosecution. The statute makes the Court’s jurisdiction “complementary” to that of national courts. The basic principle is that the ICC will complement – and not replace – national courts, and will prosecute only those cases that are not dealt with by national courts or for which national investigation is a sham. A case will only be admissible if the prosecution can show that the national courts are unable or unwilling to investigate. This recognizes that ICC can never be the primary trial court for “rank and file” offenders, and that duty to prosecute should lie first with national courts.”

Istilah pelanggaran HAM berat yang telah dikenal dan digunakan pada saat ini belum dirumuskan secara jelas, baik di dalam resolusi, deklarasi, maupun dalam perjanjian HAM. Hal itu dinyatakan oleh **H. Victor Conde** sebagai berikut.⁶⁷

“Gross violation(s) of human rights: a term used but not well defined in human rights resolutions, declarations, and treaties but generally meaning systematic violations of certain human rights norms of a more serious nature, such as apartheid, racial discrimination, murder, slavery, genocide, religious persecution on a massive scale, committed as a matter of official practice. Gross violations result in irreparable harm to victims.”

Namun, hukum HAM Internasional, khususnya yang dikembangkan dalam lingkup PBB, sesungguhnya telah mengakui adanya pelanggaran HAM yang berkategori berat dan sistematis

⁶⁶Anne F. Bayefsky dan Joan Fitzpatrick (ed), *Human Rights and Forced Displacement*, Martinus Nihoff Publishers, The Hague, 2000, hlm. 167-168.

⁶⁷H. Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, University of Nebraska Press, Lincoln, 1999, hlm. 52.

sebagaimana yang diatur dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial (ESOSOC) No. 1503, seperti dinyatakan oleh **Dinah Shelton**.⁶⁸

“International human rights law, especially as developed within United Nations, recognizes a category of situations of gross and systematic violation of human rights. Though never exactly defined, it constitutes the jurisdictional threshold for consideration of human rights complaints submitted pursuant to ECOSOS Resolution 1530.”

Menurut **Peter Baehr**, pelanggaran HAM berat akan menyangkut masalah-masalah yang meliputi,

*“The prohibition of slavery, the right to life, torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, genocide, disappearances and ‘ethnic cleansing’.”*⁶⁹

Mengenai bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat, antara lain dapat kita temukan pula di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁷⁰

Pembentukan komisi kebenaran ternyata merupakan suatu respons umum dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM berat di beberapa negara yang mengalami masa transisi politik.

*“Truth commissions are a common response during transitions and may be international, e.g. El Salvador, or national, e.g. Chile and Argentina.”*⁷¹

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat menyangkut genosida dan kejahatan kemanusiaan juga terjadi di Bekas Yugoslavia dan Rwanda. Di Bosnia-Herzegovina antara tahun 1991 – 1995, 20.000 orang telah hilang dan sebagian besar adalah laki-laki muslim Bosnia yang

⁶⁸Dinah Shelton. *op. cit.*, hlm. 320.

⁶⁹Peter R. Baehr, *Human Rights Universality in Practice*, St. Martin's Press, New York, 1999, hlm. 20.

⁷⁰Pasal 7 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Istilah genosida merupakan terjemahan dari *genocide*.

⁷¹Dinah Shelton, *op. cit.*, hlm. 328.

merupakan korban-korban dari operasi ‘pembersihan etnis’ yang dilakukan oleh kelompok-kelompok paramiliter Serbia dan angkatan bersenjata Serbia Bosnia. Sekitar 5.000 orang juga hilang di Kroasia.⁷²

Salah satu faktor dibentuknya Mahkamah Internasional di Rwanda adalah karena sistem peradilan nasional dan infrastruktur di negara tersebut tidak dapat berfungsi secara efektif. Hal itu terjadi karena sebagian besar hakim dan jaksa telah dibunuh, diasingkan, atau dipenjara.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di bekas Yugoslavia dan Rwanda dilakukan melalui keterlibatan Dewan Keamanan PBB (*Security Council*). Berdasarkan kewenangannya, seperti yang diatur dalam Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan PBB selanjutnya membentuk Mahkamah Internasional yang bersifat **Ad Hoc** untuk mengadili para pelaku.

Pelanggaran HAM berat dalam konteks Indonesia yang mengundang keterlibatan DK PBB adalah menyangkut **tindak kekerasan yang terjadi di Timor Timur**.

Kekerasan di Timor Timur terjadi setelah pemerintah RI mengeluarkan dua opsi pada tanggal 27 Januari 1999 menyangkut masa depan Timor Timur, yaitu menerima atau menolak otonomi khusus. Sejak opsi diberikan, terlebih setelah diumumkan hasilnya

⁷²*Ibid.*, hlm. 30.

jajak pendapat, berkembang berbagai bentuk tindak kekerasan yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat.⁷³

Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 15 September 1999 DK PBB mengeluarkan Resolusi 1264. Resolusi ini mengutuk tindakan kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur. Resolusi juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengadili mereka yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan.⁷⁴

Negara adalah subjek hukum Internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum Internasional.⁷⁵ Sebagai subjek hukum, negara memiliki personalitas Internasional. Personalitas Internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban Internasional sehingga negara harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum Internasional.⁷⁶

Sebagai subjek hukum Internasional, negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum Internasional. Namun demikian, terdapat prinsip yang juga berlaku bahwa di dalamnya terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena

⁷³Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM di Timor Timur, disusun oleh Komisi Penyidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) yang dibentuk oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

⁷⁴Sumaryo Suryokusumo, *Pengadilan Ad Hoc Bagi Pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Tim-Tim, Suara Pembaruan*. [Jakarta]. 7 Maret 2002, dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 234

⁷⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 70.

⁷⁶Hazem Atlam, *National Liberation Movements and International Responsibility*, dalam Marina Spinedi dan Bruno Simma (edit), *United Nations Codification of State Responsibility*, Oceana Publications Inc, New York, 1987, hlm. 39 – 40.

itu, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang melawan hukum atau atas kelalaiannya.⁷⁷

Adapun yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum Internasional, yaitu tidak ada satu negara pun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Setiap pelanggaran terhadap hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara tersebut harus mempertanggungjawabkannya.⁷⁸

Keharusan untuk menghormati hak-hak negara lain dalam pergaulan Internasional tersebut didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan. Prinsip tersebut, misalnya tercermin dalam Piagam PBB, bahwa PBB sebagai suatu organisasi didasari oleh prinsip persamaan kedaulatan dari seluruh anggotanya.⁷⁹

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum Internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antarnegara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban Internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian Internasional maupun hukum kebiasaan Internasional.⁸⁰

⁷⁷Hingorani, *Modern International Law*, edisi ke-2, 1984, hlm. 241, dalam Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 173.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB 1945.

⁸⁰Mieke Komar Kantaatmadja, *Tanggung jawab Negara dan Individu dalam Hukum Internasional*, (makalah yang disampaikan pada Penataran Tindak Lanjut Dosen Hukum Humaniter Internasional Indonesia Bagian Barat, di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 24-25 Juli 2000), hlm. 3.

Dalam setiap sistem hukum telah dikenal tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban yang diatur berdasarkan ketentuan hukumnya. Tanggung jawab tersebut dalam hukum Internasional dikenal sebagai **responsibility**, seperti dinyatakan **Ian Brownlie** bahwa:

*“In any legal system there must be liability for failure to observe obligations imposed by its rules. Such liability is known as responsibility.”*⁸¹

Tetapi, sampai saat ini belum ada ketentuan-ketentuan hukum Internasional yang secara tegas mengenai tanggung jawab negara. Meskipun demikian, para ahli hukum Internasional telah mengakui bahwa tanggung jawab negara ini merupakan suatu prinsip fundamental (dasar) hukum Internasional.⁸²

Menurut M. N. Shaw, yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab (negara) bergantung pada faktor-faktor dasar seperti: adanya suatu kewajiban hukum Internasional yang berlaku antara dua negara tertentu; adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum Internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.⁸³

Dalam doktrin hukum Internasional terdapat dua teori tentang kesalahan negara yang membahas tentang apakah tanggung jawab negara terhadap tindakannya yang melanggar hukum atau kelalaiannya itu mutlak atau apakah perlu adanya pembuktian kesalahan atau

⁸¹D.J. Harris, *Cases and Material on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1998, hlm. 484.

⁸² Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 1979, hlm. 431, dalam Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 174.

⁸³M.N. Shaw, *International Law*, 1986, hlm. 406 dalam *Ibid.*, hlm. 174 – 175.

niat/kehendak dari tindakan pejabat atau agen negara. Teori pertama, yaitu **teori objektif** atau disebut juga **teori resiko**. Menurut teori ini tanggung jawab negara adalah mutlak (*strict*). Jika seorang pejabat atau agen negara telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, negaranya bertanggung jawab menurut hukum Internasional tanpa dibuktikan apakah tindakan tersebut dilaksanakan dengan maksud baik atau jahat.⁸⁴ Teori kedua adalah **teori subjektif** atau **teori kesalahan**. Menurut teori ini, tanggung jawab negara ditentukan oleh adanya unsur kesalahan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) pada pejabat atau agen negara yang bersangkutan.⁸⁵

Tanggung jawab timbul atas pelanggaran terhadap kewajiban menurut hukum Internasional. Negara bertanggung jawab, antara lain, atas pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain.

Pelanggaran HAM pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam norma-norma hukum HAM Internasional. Menyangkut hal tersebut, **H. Victor Conde** menjelaskan, pelanggaran dalam konteks HAM adalah⁸⁶

“a failure of a state or othe party legally obligated to comply with an international human rights norm. Failure to fulfill an obligation is a violation of that obligation. A violation gives rise to domestic or international remedies for such state conduct.”

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 187.

⁸⁵*Loc. cit.*

⁸⁶H. Victor Conde, *op. cit.*, hlm. 156.

Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum Internasional akan mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk melakukan pemulihan.⁸⁷

Tanggung jawab negara juga menyangkut hubungan antar-negara, yaitu timbul sebagai respons atas pelanggaran suatu hak Internasional yang bersifat subjektif dari negara lain, sebagaimana dijelaskan oleh

Karl Zemanek,⁸⁸

"In accordance with the relativity of international rights and duties, which is one of the characteristics of international law as a decentralized system, responsibility of States arises in response to the violation of a subjective international right of another State."

Masalah perlindungan HAM merupakan kewajiban negara yang terkait dengan kepentingan hukum dari masyarakat Internasional secara keseluruhan. Adapun dasar hukum tanggung jawab negara atas pelanggaran HAM bersumber dari pelanggaran terhadap perjanjian Internasional HAM atau norma HAM sebagai hukum kebiasaan Internasional.⁸⁹

Penyelesaian pelanggaran HAM pada prinsipnya lebih mengutamakan tanggung jawab negara. Hal itu, karena instrumen-instrumen (hukum) HAM memiliki ciri yaitu berfokus pada negara sebagai pelaku utama yang memerlukan pengawasan secara eksternal.⁹⁰

⁸⁷ "The law of state responsibility requires a state to make reparations when it fails to comply, through an act or omission attributable to it, with an obligation under international law". Lihat B. Cheng dalam Dinah Shelton, hlm. 93.

⁸⁸ Rudolf Bernhardt, *Encyclopedia of Public International Law*, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 1987, hlm. 364.

⁸⁹ Dinah Shelton, *op. cit.*, hlm. 47

⁹⁰ William R. Slomanson, *Fundamental Perspectives on International Law*, West, Wadsworth, 2000, hlm. 507.

Instrumen hukum HAM Internasional, umumnya memberikan kewajiban kepada negara untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut melalui proses hukum di lingkup nasional terlebih dahulu. Hal itu dikenal dengan istilah *exhaustion of local remedies*.

Sehubungan dengan lahirnya tanggung jawab negara, hukum kebiasaan Internasional menetapkan, sebelum diajukannya klaim tuntutan ke pengadilan Internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa (*local remedies*) yang tersedia atau yang diberikan oleh negara tersebut harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Tindakan ini dilakukan baik untuk memperbaiki kesalahannya menurut sistem hukumnya dan untuk mengurangi tuntutan-tuntutan Internasional.⁹¹

Ketentuan yang mengatur masalah *exhaustion of local remedies* dinyatakan dalam ICCPR.

Hal yang sama juga dinyatakan dalam Statuta ICC. ICC pada dasarnya menganut prinsip komplementaris, artinya ICC bersifat pelengkap (komplemen) dari pengadilan nasional.

Prinsip tersebut menegaskan, jika terjadi kejahatan serius di negara yang bersangkutan, yurisdiksi pengadilan nasional harus didahulukan. Sehingga dapat dikatakan yurisdiksi pengadilan nasional memiliki hak preferensi dan yurisdiksi ICC sebagai *the last resort*. Dapat dikatakan yurisdiksi ICC harus menjadi *ultimatum remedium*.⁹²

⁹¹Ian Brownlie, *Principles of Public International Law (3rd edition)*, Oxford University Press, Oxford, 1979, hlm. 437 dalam Huala Adolf, *op. cit.*, hlm. 188.

⁹²Romli Atmasasmita, *International Criminal Court: Prospek dan Tantangan*. (Makalah yang disampaikan pada Seminar ICC Tantangan dan Harapan dalam Hukum Internasional, di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 28 Agustus 2001), hlm. 1 – 2.

Apabila kemudian terdapat indikasi, pengadilan dari negara pelanggaran HAM berat tidak ingin atau tidak mampu melakukan penyelesaian, maka ICC akan ‘mengambil alih’ dari yurisdiksi pengadilan nasional.

Kriteria untuk menetapkan bahwa pengadilan nasional tidak menunjukkan keinginan ialah, **pertama**, proses peradilan dilaksanakan hanya untuk menutupi atau melindungi para pelaku kejahatan serius sehingga terhindar dari penghukuman. **Kedua**, proses peradilan ditunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, proses peradilan tidak dapat dilaksanakan secara independen dan tidak memihak.⁹³

Sedangkan kriteria untuk menetapkan adanya ketidakmampuan pengadilan nasional, adanya situasi sistem peradilan nasional yang sedang kolaps atau tidak berfungsi efektif. Sehingga peradilan tidak dapat menghadirkan tersangka atau saksi-saksi dan tidak dapat memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan, jadi peradilan tidak dapat dilaksanakan. Tidak dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas menyebabkan yurisdiksi ICC tidak dapat diberlakukan terhadap kejahatan serius yang telah terjadi di suatu negara.⁹⁴

Tidak adanya keinginan, terlihat juga dari fakta tidak dilakukannya tindakan hukum terhadap para pelaku, sebaliknya para pelaku justru diberikan amnesti melalui proses legislasi yang didesain untuk hal tersebut. Praktek demikian, misalnya terjadi di Chile semasa Jenderal

⁹³*Ibid.*, hlm. 2.

⁹⁴*Ibid.*

Pinochet berkuasa menggunakan penyiksaan sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah pada waktu itu.⁹⁵

Sedangkan suatu ketidakmampuan dapat terjadi karena sistem peradilan nasional dan infrastruktur di suatu negara tidak berfungsi lagi, hal itu disebabkan sebagian besar hakim dan jaksa telah dibunuh, dipenjara atau diasingkan seperti yang terjadi di Rwanda.⁹⁶

Faktor timbulnya ancaman yang membahayakan perdamaian dan keamanan dunia sebagai akibat dari pelanggaran HAM berat dapat menyebabkan keterlibatan Internasional untuk turut campur dalam penyelesaian masalah. Hal tersebut misalnya dilakukan oleh DK PBB.⁹⁷

“The Security Council comes into the picture when violations of human rights are so gross, extensive and persistent as to endanger world peace. The members of the Security Council recognized this at the special high-level meeting held on 31 January 1992, when they are agreed that ‘non military sources of instability... have become threats to peace and security.’”

Berdasarkan preseden, adanya kedua faktor di atas dalam suatu kasus pelanggaran HAM berat dapat menyebabkan norma hukum Internasional dan institusi Internasional ‘mengambil alih’ yurisdiksi nasional suatu negara. Hal tersebut terjadi dalam proses penyelesaian terhadap kasus di Bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Adapun sarana yang dipilih, kebijakan untuk merespons pelanggaran HAM yang bersifat berat dan sistematis seluruhnya secara umum mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mencegah terjadinya

⁹⁵ Rachel Swain, *A Discussion of the Pinochet Case (House of Lords Decision of 24 March 1999) Noting the Juxtaposition of International Relations and International law Perspectives*, 2000, dalam Nourdic Journal of International Law. Vol. 69, No. 3, hlm. 240.

⁹⁶ *Supra*, catatan kaki no. 3.

⁹⁷ Sydney D. Bailey, *The UN Security Council and Human Rights*, St. Martin's Press Inc, New York, 1994, hlm. 125.

pengulangan pelanggaran dan untuk memulihkan kerusakan yang telah ditimbulkan seluas mungkin. Hal di atas dinyatakan oleh **J. Zalaquett** sebagai berikut,

“Whatever the means chosen, policies to respond to gross and systemic human rights abuses generally have two overall objectives: to prevent the recurrence of the violations and to repair the damage that they caused, to the extent possible.”⁹⁸

Karena, pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai universal yang merupakan norma hukum HAM Internasional, negara pelaku tidak dapat lagi berlindung di balik kedaulatannya untuk menghindari tanggung jawab kepada masyarakat Internasional.

Menyangkut hal tersebut di atas, **Hector Gros Espiell** menegaskan,

“The question of human rights is no longer the preserve of the domestic jurisdiction of states, but is now recognized as being governed by internal law and international law, against which special internal law cannot be invoked.”⁹⁹

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ, prinsip hukum umum merupakan salah satu sumber hukum Internasional. Tanggung jawab negara sebagai suatu prinsip hukum umum yang dikenal dalam hukum Internasional juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum Internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antarnegara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban Internasional untuk berbuat

⁹⁸ J. Zalaquett, *Confronting Human Rights Violations Committed by Former Governments: Principles Applicable and Political Constraints*, Aspen Inst., *State Crimes: Punishment or Pardon*, 1989, dalam Dinah Shelton, *op. cit.*, hlm. 321.

⁹⁹ Hector Gros Espiell, *Humanitarian Law and Human Rights* dalam Janusz Symonides (ed), UNESCO, Paris, 2000, hlm. 349 – 350.

sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian Internasional maupun hukum kebiasaan Internasional.¹⁰⁰

Menurut hukum Internasional, pertanggung jawaban negara timbul ketika suatu negara merugikan negara lain. Pertanggung jawaban negara dibatasi pada pertanggung jawaban atas perbuatan yang melanggar hukum Internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum Internasional, tidak menimbulkan pertanggung jawaban negara.

Menurut hukum Internasional, setiap negara memiliki kedaulatan. Dengan adanya kedaulatan, negara memiliki sejumlah kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan. Namun demikian, di dalam kedaulatan terkandung suatu kewajiban untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Penyalahgunaan kedaulatan berupa tindakan salah secara Internasional dan hal tersebut menimbulkan tanggung jawab negara.

Tanggung jawab negara menurut hukum Internasional juga memiliki perbedaan dengan tanggung jawab negara menurut hukum nasional. Menurut hukum Internasional, tanggung jawab negara timbul akibat dari pelanggaran terhadap hukum Internasional. Walaupun hukum nasional menganggap suatu perbuatan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun apabila hukum Internasional menentukan

¹⁰⁰*Supra*, catatan kaki no. 43.

sebaliknya anak negara harus tetap bertanggung jawab. Hal tersebut oleh **F. Sugeng Istanto** dijelaskan,¹⁰¹

“Pertanggung jawaban negara menurut hukum Internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum Internasional. Pertanggung jawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum. Perbedaan itu mungkin disebabkan oleh karena perbuatan itu oleh hukum nasional negara tersebut tidak ditetapkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau karena pelaku perbuatan tersebut tidak menimbulkan pertanggung jawaban negara.”

Akibat dari perbedaan antara pertanggungjawaban negara menurut hukum Internasional dan hukum nasional ialah, suatu negara tidak dapat menghindari pertanggungjawaban Internasionalnya berdalihkan kebenaran menurut hukum nasionalnya.¹⁰²

Mengenai doktrin imputabilitas, **F. Sugeng Istanto** berpendapat,¹⁰³

“Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban negara atas kejahatan Internasional itu dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara (“the doctrine of imputability” atau “attributability”). Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara. Karena pembebanan itu, kejahatan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggung jawaban negara.”

Dengan demikian tanggung jawab negara akan muncul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparturnya. Pada dasarnya hanya tindakan yang memiliki unsur pemerintahan yang akibatnya dapat dipertanggungjawabkan kepada negara. Suatu tindakan yang tidak memiliki keterkaitan dengan negara (pemerintah) maka negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

¹⁰¹F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 78.

¹⁰²*Loc. cit.*

¹⁰³F. Sugeng Istanto, *op. cit.*, hlm. 81.

Mengenai hal di atas, pada bagian **commentary** dari **draft ILC** dinyatakan,

“Thus the general rule is that the only conduct attributed to the State at the international level is that of its organs of government, or of others who have acted under the direction, instigation or control of those organs, i.e., as agents of the State.”¹⁰⁴

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELANGGARAN HAM BERAT PADA PASCA PELAKSANAAN JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Timor Timur akhirnya merdeka. Mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas yang ditawarkan Presiden Habibie dalam jajak pendapat yang diselenggarakan pada 30 Agustus 1999. Namun, kemerdekaan mereka tidak membebaskan Indonesia. Sebaliknya, penolakan rakyat Timor Timur terhadap tawaran otonomi luas

¹⁰⁴The United Nations, *op. cit.*, hlm. 80.

menyisakan serangkaian krisis baru yang menghambat upaya Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik yang melanda negeri ini.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia merupakan kekalahan bagi Indonesia. Negara besar ini terpuruk oleh kegigihan sekelompok kecil masyarakat untuk memperoleh kemerdekaan. Keputusan rakyat Timor Timur untuk merdeka tidak terlepas dari tindak-tanduk TNI di bekas provinsi Indonesia ke-27 itu. Pelanggaran HAM oleh anggota TNI merupakan alasan yang paling sering dikemukakan untuk menjelaskan keputusan rakyat Timor Timur tersebut. Selain dianggap bertanggungjawab atas lepasnya Timor Timur dari Indonesia, TNI juga menghadapi tuduhan melakukan pembunuhan massal, pembakaran, penjarahan, serta berbagai tindak kekerasan lain sesuai jajak pendapat pada 30 Agustus 1999.

Masyarakat Internasional (Barat) melakukan berbagai upaya untuk membawa tersangka pelanggar HAM di Timor Timur ke pengadilan Internasional. Salah satu syarat bagi digelarnya pengadilan Internasional ialah skala perbuatan (kejahatan) yang dilakukan.

Menurut **Nathan Hancock** dalam artikelnya, *A War Crimes Tribunal for East Timor?*, akan ada keraguan mengenai fakta yang diperlukan untuk mendukung pengadilan Internasional (bagi pelaku kejahatan di Timor Timur). Dia menulis,¹⁰⁵

*“...mungkin tidak ada konflik bersenjata yang melatarbelakangi (kejadian di Timor Timur) dan tindak (kekerasan yang terjadi) mungkin tidak dalam skala yang cukup besar untuk bisa dimasukkan ke dalam kategori kejahatan kemanusiaan”.*¹⁰⁶

¹⁰⁵ Law and Bill Digest Group, 19 Oktober 1999, Parliament of Australia.

¹⁰⁶ Sebagai perbandingan, pengadilan kriminal Internasional yang digelar bagi tersangka pelaku *genocide* (pemusnahan massal) dan pelanggaran serius lain terhadap hukum

Sungguh naif untuk menimpakan semua kesalahan atas apa yang terjadi di Timor Timur pada TNI seperti terlihat dalam upaya membawa pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur ke pengadilan.¹⁰⁷ Peradilan terhadap tersangka pelaku pelanggaran HAM seakan mengecilkan masalah Timor Timur hanya sebatas masalah HAM. Kegagalan pemerintah sipil untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur serta demokratis dan maraknya praktik korupsi dan kolusi merupakan faktor utama lain yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat di Timor Timur. Semua ketidakpuasan itu diperparah oleh berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.

Tidaklah mengherankan bila kelompok anti integrasi, yang selama 23 tahun tidak pernah berhenti melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita mereka melepaskan diri dari Indonesia, memperoleh dukungan yang semakin besar dari kalangan masyarakat Timor Timur.

*“...dari sisi geografis saja Indonesia berada di pihak yang dilematis menghadapi apa pun hasil jajak pendapat bagi masyarakat Timor Timur”.*¹⁰⁸

humaniter yang terjadi di Rwanda antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994 menyangkut nyawa. Diperkirakan dalam waktu kurang dari empat bulan, antara 500.000 hingga satu juta orang terbunuh dalam kampanye pemusnahan massal yang dilancarkan oleh suku Hutu terhadap suku Tutsi. Pengadilan kriminal Internasional untuk Rwanda merupakan pengadilan Internasional pertama yang dilakukan untuk mengadili pelaku *genocide*.

¹⁰⁷ Chris Donnelly, Penasihat Khusus NATO untuk Masalah Eropa Tengah dan Timur, dalam artikelnya, *Defence transformation in the new democracies: A framework for tackling the problem*, mengatakan bahwa angkatan bersenjata merupakan cermin dalam membentuk jati dirinya dibandingkan dengan potensi ancaman. Walau bahasan Donnelly difokuskan pada Eropa Tengah dan Timur, namun ia juga mengatakan bahwa di dalam masyarakat mana pun, sejarah dalam negeri dan kebudayaan nasional merupakan faktor yang biasanya berperan dalam menentukan besar kecil dan bentuk angkatan perang. *NATO Review*, Web Edition, No. 1 – Jan. 1997, Vol. 45 – pp 15 – 19.

¹⁰⁸ *Antara*, 6 Mei 1999.

Ketidakberdayaan rakyat Timor Timur terhadap kepentingan politik jelas terlihat ketika N. Parameswaran, kepala staf UNTAET, mengundurkan diri dari jabatannya awal Januari 2002.

Parameswaran yang berasal dari Malaysia mengatakan UNTAET telah menjadi “misi yang sangat putih”, “misi Timur dengan wajah Barat”. Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Parameswaran juga menuduh bahwa upayanya untuk mendorong rekonsiliasi dan pengembalian pengungsi ke Timor Timur dihalangi oleh McNamara yang berkebangsaan Selandia Baru, serta beberapa orang lain. McNamara ditunjuk menjadi wakil Sergio Vieira De Mello, pemimpin UNTAET yang juga Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB.

Tuduhan Parameswaran bahwa UNTAET didominasi oleh orang kulit putih untuk kepentingan politik orang kulit putih, yang dibantah oleh badan PBB dan Ramos Horta, tidaklah mengejutkan. Kalau dulu, pada era integrasi, Timor Timur “dikuasai” oleh Indonesia, maka setelah jajak pendapat ada empat “negara” yang “memerintah” di sana, yaitu Portugal, Australia, Amerika Serikat, dan “PBB”.¹⁰⁹ Ini kenyataan dan inilah buah kemerdekaan Timor Timur.¹¹⁰

Opsi Kedua Habibie, yang secara resmi diumumkan pada 27 Januari 1999 oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, menimbulkan berbagai

¹⁰⁹Direktur Yayasan HAK, Aniceto Guterres Lopes, yang juga anggota Dewan Nasional (Timor Timur), mengingatkan dalam diskusi dua mingguan yayasan tersebut, agar rakyat Timor Timur bersikap kritis terhadap kepentingan jangka pendek dan jangka panjang PBB. Dalam jangka pendek bermain kepentingan staf PBB yang dengan misinya di sini (Timor Timur) ingin kariernya naik. Buat mereka, rakyat Timor Timur tidak menjadi pertimbangan penting. “Bagi mereka yang penting program berjalan lancar sesuai dengan rencana mereka.” Lihat *Direito*, Dwi Mingguan Hak Asasi Manusia, 4 Juni 2001.

¹¹⁰Dalam laporannya pada 10 Januari 2000, Pusat Studi dan Pengkajian Yayasan HAK yang berkantor pusat di Dili mengatakan bahwa kini Timor Timur menghadapi operasi baru, yaitu “operasi kemanusiaan”.

reaksi baik di dalam maupun di luar negeri, mulai dari ungkapan tidak percaya hingga kepanikan, baik di kalangan pro maupun anti integrasi.

Memasuki periode 1999, sebagian masyarakat Indonesia seolah telah kehilangan kesabaran atas tekanan Internasional karena masalah Timor Timur dan ingin pemerintah segera melepaskan Timor Timur, bukan karena rakyat Timor Timur layak mendapatkan kemerdekaan mereka, namun karena masyarakat Indonesia merasa Timor Timur-lah yang menyebabkan pemerintah Indonesia terus-menerus mendapatkan tekanan dari kalangan Internasional, terutama berkaitan dengan berbagai pelanggaran HAM di daerah itu. **Gus Dur** menegaskan,

“Indonesia bisa hidup tanpa Timor Timur, tapi Timor Timur tidak bisa hidup tanpa Indonesia.”¹¹¹

Mantan Panglima ABRI Jenderal Wiranto menolak tuntutan kehadiran pasukan perdamaian PBB. Ia menegaskan bahwa semua masalah di Timor Timur merupakan masalah dalam negeri Indonesia.

Merasa ditinggalkan, baik oleh pemerintah Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia, termasuk media massa Indonesia, kelompok bersenjata pro integrasi melakukan serangkaian aksi teror dan intimidasi, satu-satunya cara yang mereka ketahui, untuk mempertahankan diri.

Sidney Jones, direktur eksekutif Satuan Tugas Asia, *Human Rights Watch* mengatakan,

“Militer Indonesia mengendalikan semua milisi, kecuali mungkin Besi Merah Putih di Liquica. Di sana pun pengaruh militer kuat. Namun demikian, tidak jelas apakah militer dapat menghentikan

¹¹¹ Antara, 13 Desember 1999.

kekerasan semudah mereka memulainya, bahkan bila mereka memiliki keinginan untuk itu sekalipun.”¹¹²

Tuduhan itu bisa dipahami, namun aparat bukannya sama sekali tidak berupaya meredam aksi kekerasan atau memberikan perlindungan kepada seluruh warga Timor Timur tanpa kecuali. Ketika terjadi bentrokan antara kelompok pro integrasi dan anti integrasi di Dili pada 18 April 1999 yang menewaskan kira-kira 20 orang¹¹³, dua pemimpin CNRT, Manuel Viegas Carrascalao dan Leandro Isaac, meminta perlindungan dari Kepolisian setempat. Pada hari kedua bentrokan itu, mereka mengungsi ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Timor Timur di Dili bersama 96 warga kota lain. Sehari sebelumnya, Manuel Viegas Carrascalao dan Leandro Isaac mengungsi ke kediaman Uskup Belo.

Namun demikian, tuduhan bahwa TNI dan Polri berpihak, bahkan mendukung kelompok milisi, memang beralasan. Keterkaitan, bahkan kerja sama, antara militer formal dan milisi bukanlah sesuatu yang baru atau hanya terjadi di Timor Timur.

Pada awal Perang Saudara di Timor Timur, partai politik di sana membentuk kelompok bersenjata. Dari ketiga partai terbesar yang muncul pada 1974, yaitu *Uniao Democratica Timorese* (UDT), *Associacao Social Democratica Timorese* (ASDT), yang kemudian berganti nama menjadi *Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente* (Fretilin) dan *Associacao Popular Democratica Timorese* (Apodeti), milisi Fretilin-lah

¹¹² *Who are the Militias?* Brooke Shelby Biggs, *Mojo Wire*.

¹¹³ Menurut Kapolda Timor Timur Kol. Timbul Silaen, 12 korban pembunuhan ditemukan di rumah Manuel Carrascalao, lima yang lain ditemukan di rumah David Ximenes, wakil ketua CNRT, sementara tiga lagi ditemukan di jalan.

yang memiliki kekuatan terbesar, antara lain karena dukungan Portugal, termasuk dukungan senjata dan amunisi.

Perebutan kekuasaan di Timor Timur setelah gubernur yang terakhir, Kolonel Mario Lemos Pires, lari ke Pulau Atauro dan dengan demikian mengakhiri kekuasaan Portugal atas bekas koloninya itu, melibatkan milisi yang dibentuk oleh masing-masing partai, termasuk milisi pro integrasi yang didukung TNI.

Seperti halnya di banyak negara, milisi memang merupakan bagian dari sistem pertahanan nasional Indonesia yang menganut konsepsi perlawanan rakyat semesta untuk menghadapi setiap bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara, yang penyelenggaraannya disusun dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Dalam sistem ini, seluruh potensi dan kekuatan nasional dikerahkan dalam upaya pertahanan keamanan negara. Seluruh potensi dan kekuatan nasional tersebut disusun dalam dua kategori besar kekuatan, yaitu kekuatan untuk melaksanakan perlawanan bersenjata dan kekuatan untuk melaksanakan perlawanan tidak bersenjata. Meskipun mempunyai sifat yang berbeda, kedua kekuatan tersebut, dalam upaya pertahanan keamanan negara, dikerahkan untuk mencapai satu tujuan yang sama.

Tidak seperti di banyak negara lain, di Indonesia pertahanan tidak terpisah dari keamanan. Pertahanan dan keamanan (hankam) merupakan kesatuan dalam rangka pembelaan negara, yang berarti pembelaan kemerdekaan, kesatuan, keutuhan wilayah serta persatuan

dan kesatuan bangsa. Berdasarkan sistem tatanan rakyat semesta, struktur kekuatan pertahanan keamanan terdiri atas empat komponen kekuatan pertahanan keamanan negara, yaitu:

1. Rakyat terlatih sebagai komponen dasar.
2. Perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus.
3. Angkatan Bersenjata sebagai komponen utama.
4. Komponen pendukung, yang terdiri atas segenap sumber daya, prasarana, dan sarana nasional wilayah negara.

Sifat kewilayahan dari perlawanan rakyat semesta menempatkan ABRI sebagai pembina ketahanan wilayah di bidang hankam. Dalam konteks ini kompetensi ABRI ialah menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang sebagai persyaratan keberhasilan pertahanan wilayah. Karena itu, ABRI memiliki kekuatan pembinaan teritorial di samping kekuatan tempur yang tersebar sampai ke pedesaan. Jumlah ideal personel pembina teritorial di pedesaan dua kali jumlah desa.

Sebagai komponen dasar kekuatan pertahanan keamanan, rakyat terlatih dapat didayagunakan, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang, bila keadaan memerlukan. Karena itu, rakyat terlatih memiliki empat fungsi, yaitu fungsi Ketertiban Umum, Perlindungan Rakyat, Keamanan Rakyat, dan Perlawanan Rakyat. Keanggotaan dalam rakyat terlatih itu hak dan kewajiban setiap warga negara yang diatur oleh undang-undang. Anggota rakyat terlatih direkrut, dilatih, dan didayagunakan secara selektif, bergilir, dan berkala.

Sebagai penyelenggara fungsi Ketertiban Umum, rakyat terlatih membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam

pemeliharaan ketertiban umum. Sebagai penyelenggara fungsi Perlindungan Rakyat, rakyat terlatih membantu pemerintah dalam penanggulangan kejahatan. Sebagai penyelenggara fungsi Keamanan Rakyat, rakyat terlatih membantu menanggulangi subversi atau kegiatan lain yang membahayakan keamanan dalam negeri. Sebagai penyelenggara fungsi Perlawanan Rakyat, rakyat terlatih dimobilisasi sebagai kekuatan petempur untuk berjuang bersama-sama dengan angkatan bersenjata.

Ketegangan antara kubu pro dan anti integrasi meningkat kembali menyusul dikeluarkannya Opsi Kedua. Pada awal Februari 1999, misalnya, massa dari Front Pembela Kemerdekaan Nasional melancarkan aksi demonstrasi dengan membawa bendera Fretilin dan meneriakkan yel-yel dan sebagian membawa ikat kepala bertuliskan Metal (Merdeka Total). Aksi ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut.

Bila kelompok pendukung kemerdekaan lebih memilih jalur politik untuk mendukung gerakan mereka, pihak pro integrasi membentuk kelompok milisi yang terdiri atas:

1. Tim Alfa (Lautem), dipimpin Joni Marques.
2. Saka/Sera (Baucau), dipimpin Serka (Sersan Kepala) Kopassus Joanico da Costa.
3. Pedjuang 59 – 75 Makikit (Viqueque), dipimpin Martinho Fernandes.
4. Ablai (Manufahi), dipimpin Nazario Corterel.
5. AHI (Aileu), dipimpin Horacio.
6. Mahidi (Ainaro), dipimpin Cancio de Carvalho.

7. Laksaur (Covalima), dipimpin Olivio Mendoca Moruk.
8. Aitarak (Dili), dipimpin Eurico Guterres.
9. Sakunar (Oecussi), dipimpin Simao Lopes.
10. BMP (Besi Merah Putih) (Liquica), dipimpin Manuel de Sousa.
11. Halilintar (Bobonaro-Maliana), dipimpin Joao de Tavares.
12. Dadurus (Bobonaro), dipimpin Natalino Monteiro.
13. Jati Merah Putih (Lospalos), dipimpin Edmundo de Conceicao Silva.
14. Darah Merah Integrasi (Ermera), dipimpin Lafaek Saburai.

Tidak mengherankan bila kemudian istilah milisi di Timor Timur mengandung makna negatif, terutama jika dikaitkan dengan tindak-tanduk mereka. Barangkali salah satu penyebabnya ialah motivasi yang mendorong orang Timor Timur menjadi milisi. Cukup banyak dari mereka masuk milisi karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang lain dan bukan karena keyakinan politik mereka. Selain itu, sebagian masuk karena unjuk kekuatan yang dilakukan oleh kelompok milisi.

Selain itu, para milisi juga mengatakan mereka khawatir jajak pendapat akan berakhir dengan kemenangan kelompok anti integrasi dan bila ini terjadi, mereka yakin tanpa dukungan militer Indonesia mereka akan dibunuh oleh Falintil.¹¹⁴

Strategi perjuangan yang dipilih kelompok pro integrasi, yang memilih jalur kekerasan, jelas merupakan kesalahan, lebih-lebih dalam suasana global yang menuntut pendekatan tanpa kekerasan melalui jalur diplomasi, disertai suara yang meneriakan penegakan HAM serta demokratisasi. Dalam suasana demikian, tindak kekerasan dan teror

¹¹⁴ *Who are the Militias?* Brooke Shelby Biggs, *Mojo Wire*.

yang dilakukan milisi pro integrasi, untuk alasan apa pun, tidak dapat diterima, apalagi dibenarkan.

Eurico Guterres menjelaskan bahwa kasus Liquica hanyalah usaha untuk mempertahankan diri.

“BMP¹¹⁵ tidak akan melakukan tindakan pembalasan seandainya pihak anti integrasi yang dipimpin kepala desa Dato, Yacinto, tidak melakukan perusakan dan pembakaran rumah masyarakat pro integrasi.”¹¹⁶

Ia mengatakan, pihaknya selama ini sudah menahan diri, meskipun sudah banyak masyarakat yang menjadi korban kejahatan mereka. Kejadian di Liquica pada 5 dan 6 April lalu, katanya, bermula dari perbuatan brutal kelompok anti integrasi yang menyebabkan tujuh rumah hancur dan dua yang lain terbakar habis.

“Kami hanya mempertahankan diri. Dan serangan balasan yang dilakukan terhadap para tokoh serta rumah kediamannya semata-mata untuk mempertahankan diri.”

Mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares memberikan penjelasan serupa dengan keterangan Eurico Guterres, bahwa peristiwa Liquica terjadi sebagai reaksi atas aksi milisi anti integrasi, yang melakukan intimidasi dan teror terhadap kelompok pro integrasi. Bahkan, lanjutnya, pihak anti integrasi telah membentuk “pemerintahan bayangan”, seperti mengangkat kepala desa dan camat, sehingga mengakibatkan aksi teror terhadap warga lain.

Tuduhan Abilio bukannya tanpa dasar. Kelompok anti integrasi pun tidak bebas dari tuduhan melakukan intimidasi, teror, dan penyerangan. Pada bulan Nopember 1998, Human Rights Watch

¹¹⁵BMP, Besi Merah Putih, kelompok milisi Liquica, yang terbentuk akhir 1998 sebagai upaya pertahanan terhadap kemungkinan penyerangan oleh Falintil.

¹¹⁶ Antara, 7 April 1999.

menurunkan laporan tentang aksi kekerasan di Timor Timur dan meminta kedua belah pihak menghormati HAM. Permintaan Human Rights Watch itu dikeluarkan setelah lembaga itu menerima laporan mengenai pelanggaran terhadap hukum humaniter, baik oleh TNI maupun kelompok anti integrasi, di Manufahi.

Masalah di suatu wilayah akan cepat menjadi agenda pembicaraan masyarakat dunia jika sudah semakin banyak mengambil korban jiwa, karena kasusnya berkembang menjadi masalah perlindungan HAM.

Noam Chomsky, guru besar bahasa di Institut Teknologi Massachusetts (MIT) Amerika Serikat, mengatakan,

“Perlindungan HAM, apalagi menyangkut kedaulatan suatu wilayah, yang telah mengambil banyak korban jiwa, mempercepat arus pemberitaan bagi masyarakat dunia. Dengan kondisi semacam itu, semua pihak akan menyatakan berkepentingan ikut menanggulangnya.”¹¹⁷

Pada Juli 1991, misalnya, federasi LSM Internasional didirikan dengan nama *International Federation for East Timor* (IFET). IFET didirikan dengan tujuan membantu rakyat Timor Timur menggunakan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dan untuk mengupayakan jaminan (perlindungan) HAM bagi semua yang terlibat dalam proses dekolonisasi di wilayah itu.

Kegiatan IFET mencakup antara lain kampanye mengenai prinsip dekolonisasi dalam kerangka PBB serta secara khusus menyebarluaskan informasi mengenai dekolonisasi Timor Timur, mengumpulkan serta menyebarluaskan data mengenai kondisi HAM di Timor Timur, dan, bila

¹¹⁷ Antara, 29 Desember 1999.

diperlukan, melakukan kampanye untuk melindungi masyarakat (Timor Timur) dari pelanggaran HAM, serta menyediakan dukungan bagi berbagai kegiatan guna memperbaiki kondisi rakyat Timor Timur dalam rangka mempersiapkan mereka untuk menggunakan hak penentuan nasib sendiri.

Selain dukungan lembaga swadaya yang memiliki jaringan Internasional, kelompok anti integrasi serta pendukung mereka juga aktif menerbitkan buku. Hingga saat ini paling tidak tercatat 29 buku mengenai Timor Timur, termasuk beberapa buku panduan untuk mempelajari bahasa Tetun.

Jaringan IFET, yang didukung oleh berbagai media *online* di Internet, berhasil menggalang opini dunia akan nasib yang menimpa rakyat Timor Timur yang menghendaki kemerdekaan dari Indonesia serta mengungkapkan berbagai bentuk penindasan serta kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya TNI.

Malam menjelang pengumuman hasil jajak pendapat di Timor Timur, Sekjen PBB Kofi Annan menghubungi Presiden B.J. Habibie melalui telepon. Menurut pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) Indonesia, dalam pembicaraan melalui kabel itu, Annan memberitahu Habibie bahwa 64 persen memilih memutuskan untuk menolak paket otonomi yang ditawarkan pemerintah Indonesia, sementara 36 persen yang lain menerima.

Dalam percakapan itu, Annan juga bertanya apakah Habibie akan menerima hasil tersebut atau mengajukan keberatan. Habibie berhak mengajukan keberatan apabila ada laporan mengenai

kecurangan dan dapat menuntut agar laporan itu diselidiki terlebih dahulu sebelum PBB menerima hasil akhir. Habibie menyatakan menerima hasil tersebut dan tidak akan menggunakan haknya untuk menuntut penyelidikan atas tuduhan kecurangan.

Pada malam yang sama, setelah Annan, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton juga menghubungi Habibie, ujar pejabat Deplu tersebut. Clinton mengatakan hasil pemungutan suara ialah 78,5 persen untuk merdeka dan 21,5 persen untuk otonomi. Clinton menekankan bahwa bila Indonesia tidak menerima hasil tersebut, maka IMF tidak akan mengucurkan bantuannya. Indonesia yang sedang dilanda krisis memang sangat membutuhkan pinjaman Internasional yang termasuk dalam paket pinjaman IMF senilai 50 miliar dolar AS. Penundaan pencairan bantuan IMF tidak hanya berdampak pada pemulihan ekonomi melainkan juga bagi kelangsungan pemerintahan Habibie serta kemungkinan terpilihnya Habibie dalam pemilu berikutnya.

Habibie, seperti yang telah kita ketahui, tunduk pada “ancaman” Clinton. Maka, pada tanggal 4 September 1999, PBB mengumumkan bahwa 344.580 atau 78,5 persen rakyat Timor Timur menolak tawaran otonomi, sementara 94.388 atau 21,5 persen menerimanya.

Kekecewaan Indonesia juga bersumber pada harapan yang besar, bahwa paling tidak 55 persen rakyat Timor Timur akan memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Jauh sebelum jajak pendapat, angka itu bahkan lebih tinggi lagi, dengan dasar pemikiran bahwa paling tidak pegawai negeri sipil dan orang yang menikmati hidup layak, bahkan berkecukupan, selama masa integrasi dipastikan memilih otonomi.

Harapan tinggi itulah yang memicu rasa kekecewaan luar biasa ketika hasil jajak pendapat diumumkan PBB.

Pakar hukum Internasional Indonesia mengatakan Kesepakatan New York menunjukkan bahwa jajak pendapat Timor Timur tidak lebih dari konspirasi Internasional. **Boedi Harsono** menjelaskan,

*“Dari ‘persetujuan’ New York, sudah terlihat adanya konspirasi Internasional tersebut.”*¹¹⁸

Boedi Harsono menyoroti penggunaan istilah “persetujuan” dalam Kesepakatan Tripartit 5 Mei 1999, bukannya “perjanjian”. Penggunaan istilah tersebut memang telah disengaja sejak awal, agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dapat meminta pertanggung jawaban pemerintah (presiden). Beliau mengatakan,

“Di sini DPR dibungkam, pemerintah sepertinya memanipulasi hukum, karena kalau menggunakan istilah “perjanjian” maka sesuai dengan Pasal 11 UUD’45, DPR harus dimintai persetujuannya terlebih dahulu.”

Hal lain yang menimbulkan kecurigaan adanya konspirasi Internasional yang terencana matang, menurut Boedi, terdapat dalam isi pasal Persetujuan New York tersebut. Contohnya ialah pasal yang menyatakan bahwa tanggung jawab keamanan berada di pihak Indonesia (TNI/Polri), sementara penyelenggara jajak pendapat ialah PBB. Menurut Boedi, pasal ini sangat tidak adil, karena segala akibat yang dilakukan penyelenggara jajak pendapat harus diamankan oleh Indonesia.

Menurut Letkol Inf. Burhanuddin Siagian, salah satu perwira TNI yang diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus pelanggaran HAM di Timor

¹¹⁸ Antara, 23 Mei 1999.

Timor pasca jajak pendapat, ia mendapatkan informasi yang menyebutkan bahwa pro integrasi hanya mendapatkan 30 persen suara kalangan mahasiswa. Ini sesuai dengan isi kontrak yang ditandatangani penduduk Timor Timur yang direkrut menjadi staf lokal UNAMET. Salah satu isi kontrak menyebutkan bahwa para relawan harus mendatangi masyarakat dan meminta mereka memilih anti integrasi, lanjutnya.

Juga merupakan kenyataan bahwa rakyat Timor Timur sendiri tidak dilibatkan dalam kesepakatan tersebut. Rakyat Timor Timur tidak lebih dari sekedar penonton dan nasib mereka ditentukan oleh Portugal, Indonesia, dan PBB.

UNAMET dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mempersiapkan dan melaksanakan jajak pendapat. Misi ini diketuai Ian Martin yang berkebangsaan Inggris, yang juga merangkap sebagai Utusan Khusus PBB untuk Jajak Pendapat di Timor Timur. UNAMET berkedudukan di Dili dan memiliki tujuh kantor cabang di daerah, dengan 5000 staf, termasuk 241 anggota staf Internasional, 420 relawan, 280 polisi sipil, dan 4000 staf lokal.

Kehadiran UNAMET dalam rangka jajak pendapat sebetulnya diharapkan mampu meredam ketegangan, tapi pada kenyataannya justru menimbulkan ketegangan baru antara kedua kelompok. UNAMET, misalnya, secara sepihak mengumumkan penundaan pelaksanaan jajak pendapat. Pemerintah Indonesia menyesalkan pengumuman PBB mengenai penundaan pelaksanaan jajak pendapat yang dilakukan secara sepihak melalui media massa.

Keputusan yang dikeluarkan PBB tersebut ditanggapi oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan yang tidak adil, terlebih bila masalah keamanan dijadikan alasan. **Alatas** mengatakan,

“Indonesia mengharapkan PBB memberikan alasan yang logis, jujur dan fair, dalam arti bukan alasan kondisi keamanan di Timor Timur. Pada prinsipnya, Indonesia akan bersikap rasional terhadap penundaan penentuan pendapat, sejauh tidak menggunakan alasan kondisi keamanan.”¹¹⁹

Hal serupa disampaikan pula oleh **Panglima PPI Joao Tavares**,

“Seharusnya UNAMET tidak menggunakan alasan keamanan atas penundaan itu, tapi karena persiapan UNAMET belum rampung.”¹²⁰

Selain kegagalan aparat keamanan Indonesia untuk bersikap netral, kebencian dan rasa dendam yang luar biasa di antara kedua kelompok yang bertikai merupakan kendala besar dalam upaya menciptakan keamanan di Timor Timur.

FPDK secara rinci menyebutkan pelanggaran yang telah dilakukan UNAMET. Dalam siaran pers, FPDK menyebutkan bahwa UNAMET :

- Telah melakukan kegiatan kemanusiaan yang seharusnya tidak boleh dilakukan,
- Meremehkan pemda setempat dengan tidak mengikutkan pemda dalam setiap urusan sosial,
- Telah melakukan kegiatan pengawalan yang seharusnya dilakukan oleh Polri,

¹¹⁹ *Kompas*, 24 Juni 1999.

¹²⁰ *Ibid.*

- Terbukti membawa pemuda bersenjata tradisional di atas mobil UNAMET saat peristiwa Liquica.

Ketika menjawab pertanyaan wartawan pada 1 September 1999,

Wiranto mengatakan,

“Ketidakpuasan itu kan wajar, dan itu diekspresikan dalam bentuk tindakan yang spontan.”¹²¹

Ironisnya, sehari sebelum bentrokan terjadi, kedua belah pihak yang bertikai bersepakat mengamankan hasil jajak pendapat. Kesepakatan ini diambil dalam pertemuan kelompok pro integrasi dan anti integrasi dengan Menhankam/Pangab Wiranto dan UNAMET.

Mantan Gubernur Timor Timur Jose Abilio Soares mengatakan bahwa rakyat Timor Timur marah karena menurut pendapat mereka, hasil jajak pendapat telah direayasa pihak UNAMET dan kelompok anti integrasi. Rakyat Timor Timur, lanjut Abilio, lalu melampiaskan kemarahan mereka melalui tindak kekerasan. Abilio juga menegaskan bahwa Timor Timur tetap merupakan bagian dari Indonesia hingga MPR mensahkan hasil jajak pendapat.¹²²

Kemungkinan pertumpahan darah juga telah ditengarai oleh Australia. Pada bulan Januari, ketika menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pecahnya perang saudara di Timor Timur, **Downer** menyatakan,

“Bila anda mengira bahwa solusi untuk masalah Timor Timur itu penyelenggaraan referendum, saya hanya bisa mengatakan bahwa... itu hanya akan menimbulkan lebih banyak pertumpahan darah daripada solusi.”

¹²¹ Kompas, 2 September 1999.

¹²² Antara, 7 September 1999.

Ian Martin, ketua UNAMET, mengakui bahwa aksi kekerasan pasca jajak pendapat dipicu oleh kekecewaan luar biasa yang dirasakan pihak pro integrasi. UNAMET sendiri merasa bahwa menjelang jajak pendapat, Indonesia telah mulai menerima kenyataan bahwa usul otonomi akan ditolak. Hasil jajak pendapat, menurutnya, ternyata merupakan kejutan luar biasa bagi cukup banyak orang Indonesia, termasuk TNI, yang sampai saat itu yakin bahwa pilihan terbanyak akan jatuh pada otonomi.

Mengenai pelanggaran HAM, **Wiranto** menegaskan,

“Bagaimana bisa (kita) dituduh merencanakan pelanggaran HAM, lha wong kita malah mengundang orang asing untuk ikut menyaksikan di sana?”

Wiranto juga mengemukakan bahwa kerusuhan yang terjadi bukan akibat kegiatan jajak pendapat yang berhasil diamankan oleh aparat keamanan, tetapi dipicu oleh merebaknya rasa kecewa kelompok pro integrasi atas hasil penghitungan suara yang dianggap buah perlakuan tidak adil pihak UNAMET.

Akibat keputusan Habibie, sejumlah anggota TNI dan Polri diadili dengan tuduhan pelanggaran HAM berat sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur. Pihak Kejaksaan Indonesia telah menetapkan 18 tersangka. Mereka adalah:

1. Mayjen Adam Damiri (Pangdam Udayana),
2. Brigjen Timbul Silaen (Kapolda Timor Timur),
3. Abilio Jose Osario Soares (gubernur Timor Timur),
4. Brigjen F.X. Tono Suratman (Danrem Dili),
5. Kol. (sekarang Brigjen.) M. Noer Muis,

6. Eurico Guterres, wakil panglima PPI/pemimpin laskar Aitarak,
7. Letkol (sekarang Kol.) Yayat Sudradjat (komandan Satgas Tribuana),
8. Letkol Endar Priyatno (Dandim Dili),
9. Letkol Soejarwo (Dandim Dili),
10. Letkol Hulman Gultom (Kapolres Dili),
11. Letkol Asep Kuswandi (Dandim Liquica),
12. Letkol Adios Salova (Kapolres Liquica),
13. Leonito Martins (bupati Liquica),
14. Kol. Herman Sedyono (bupati Covalima),
15. Letkol Liliek Koeshadianto (Dandim Suai),
16. Letkol Gatot Subiaktoro (Kapolres Suai),
17. Kapten Achmad Syamsudin (kepala staf Dandim Suai),
18. Letnan Sugito (komandan sektor militer Suai).

Pemerintah memutuskan untuk menggelar pengadilan HAM Timor Timur setelah mendapatkan desakan dan tekanan, terutama dari negara donor dan organisasi HAM asing. Tercatat paling tidak 39 anggota IFET, ditambah 89 organisasi dan individu dari 39 negara, meminta Sekjen PBB Kofi Annan membentuk pengadilan Internasional untuk para tersangka pelaku kejahatan di Timor Timur.

Sejarah memang membuktikan bahwa tuduhan pelanggaran HAM/ kejahatan perang dan pengadilan atas tersangka pelaku kejahatan perang atau pelanggaran HAM berat hanya berlaku bagi mereka yang kalah dan Indonesia merupakan pihak yang “kalah” dalam persoalan Timor Timur. Penggelaran pengadilan HAM bagi tersangka

pelaku kekerasan di Timor Timur berdampak negatif terhadap prajurit TNI. Setelah Timor Timur lepas, mereka sering ragu-ragu dalam bertindak, khawatir bahwa apa yang mereka lakukan hari ini atas perintah negara akan berbuntut pengadilan HAM di kemudian hari.

HAM seharusnya tidak menjadi masalah bagi angkatan bersenjata yang profesional karena profesionalisme mencakup penghormatan HAM. TNI sendiri mengajarkan nilai yang bersifat sangat universal dan tercermin antara lain dalam Sumpah Prajurit, Sapta Marga, serta Delapan Wajib TNI, yang intinya adalah penghormatan atas HAM.

Namun demikian, karena istilah HAM berasal dari “luar”, terdapat kesenjangan pendapat, seolah-olah HAM itu sesuatu yang asing dan cenderung disiasati dengan sikap curiga, bahkan penolakan.

Selain itu, karena profesionalisme masih merupakan cita-cita bagi TNI, pemahaman tentang HAM di luar konsep ke-Indonesiaan yang ditawarkan Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI, masih jauh dari yang diinginkan.

Berbagai upaya telah dilakukan TNI dalam rangka meningkatkan kesadaran prajurit akan perlunya menegakkan HAM. Salah satu upaya itu dilakukan melalui kerja sama dengan Palang Merah Internasional (ICRC) dalam memberikan pelatihan tentang Hukum Humaniter Internasional melalui seminar dan sarasehan. Selain itu, TNI juga menambah jam pelajaran bermuatan hukum humaniter dan hal yang berkaitan dengan HAM.

Pengadilan bagi tersangka pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur memang sarat dengan muatan politik. Sebagai contoh, Kiki Syahnakri dan Brigjen M. Noer Muis yang diperiksa oleh Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) di Timor Timur. Keduanya lalu menawarkan diri untuk diperiksa dengan alasan, sangatlah aneh bila mereka tidak termasuk dalam daftar orang yang diperiksa KPP HAM. Jelaslah, bahwa Komisi tidak benar-benar berkeinginan menegakkan keadilan dan mencari kebenaran, melainkan untuk memojokkan orang tertentu.

Indonesia sendiri bersikeras mengadili kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timor Timur di dalam negeri dan mendapatkan dukungan dari PBB yang menghendaki pengadilan yang jujur dan adil.

Mantan Menteri Kehakiman Muladi mengatakan bahwa pengadilan HAM Ad Hoc yang telah dibentuk pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk di Timor Timur, sehingga tidak perlu pengadilan Internasional.

Berbagai macam tekanan dan ancaman memperkuat kecurigaan bahwa pengadilan HAM memang sarat dengan muatan politis. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran terhadap objektivitas sistim peradilan Internasional yang ada dan lembaga pengadilan yang dibentuk di bawah naungan PBB. Itu sebabnya pembentukan Mahkamah Internasional¹²³ untuk mengadili tersangka pelaku genosida,

¹²³ ICC berbeda dengan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ ICJ*), yang merupakan organ utama peradilan PBB yang berkedudukan di Peace Palace, Den Haag,

kejahatan perang, dan kejahatan atas kemanusiaan (HAM) diliputi kontroversi.¹²⁴

Mahkamah Kriminal Internasional diperlukan untuk mengadili orang yang tidak bisa diadili di negara mereka sendiri karena sistem pengadilan di negara tersebut tidak mampu menyentuh mereka. Namun ada kekhawatiran bahwa ICC hanya akan menjadi versi lain dari mahkamah ideologi di Den Haag yang diagung-agungkan namun menjadi agenda global. Gerakan pendukung pengadilan Internasional (*judicial activism*), yang dimotori para jaksa bukannya para hakim sebagaimana seharusnya, akan memperluas jangkauan mereka ke seluruh dunia, menghukum siapa pun atau pihak mana pun yang tidak sepakat dengan konsensus yang dibuat melalui diplomasi rahasia sejumlah negara dan sekutu mereka, yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹²⁵

Mengingat kondisi dan sistem peradilan Internasional seperti yang digambarkan itu, tidak mengherankan bila mantan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa menyelenggarakan pengadilan Internasional terhadap tersangka pelaku kekerasan di Timor Timur justru merupakan pelanggaran HAM.

Media mempunyai kecenderungan membela yang lemah dan tertindas. Dalam kasus Timor Timur, kelompok anti integrasi diyakini sebagai pihak tertindas, yang haknya dirampas. Terlepas dari

Belanda. ICJ berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum antara Negara anggotanya dan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah hukum.

¹²⁴ Sampai Desember 2001, 47 negara telah meratifikasi perjanjian ICC. Dibutuhkan dukungan 60 negara sebelum pengadilan itu bisa dimulai.

¹²⁵ *An Insider's View of the International War Crimes Tribunal at the Hague*, Samizdat 2000, Christine Stone, *Antiwar.com*, 7 Juli 2000.

kepentingan nasional masing-masing media, keberpihakan media, terutama media asing, terhadap kelompok anti integrasi merupakan sesuatu yang wajar.

Peran dan sifat media inilah yang rupanya kurang dimengerti oleh TNI. TNI tidak hanya gagal memanfaatkan media menjadi alat dalam perang informasi dan perang opini, tetapi juga bertindak reaktif dan baru bertindak hanya setelah suatu peristiwa berkembang ke arah yang kurang menguntungkan institusi itu. Hal ini diperparah oleh kecenderungan yang dilakukan oleh anggotanya. Dalam dunia yang semakin transparan, kebiasaan ini tidak bisa dipertahankan lagi.

Peristiwa Timor Timur membuka mata kita semua akan kenyataan rapuhnya semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di kalangan generasi muda produk era globalisasi pasca Perang Dingin. Ada banyak anak muda yang menunjukkan keheranan bila mereka dihadapkan pada pertanyaan mengenai nasionalisme. Bagi mereka, kemerdekaan bangsa lebih penting dari urusan menjaga kedaulatan negara. Dalam pandangan anak muda generasi globalisasi pasca Perang Dingin, tidak mengapa Indonesia pecah-belah demi demokrasi dan HAM. Itu antara lain sebabnya pemerintah tidak mendapatkan dukungan total dari masyarakat dalam menyelesaikan masalah Timor Timur.

Salah satu penyebab kerapuhan semangat kebangsaan ialah pergeseran atau perubahan nilai sebagai salah satu dampak globalisasi. Nilai seperti demokrasi dan HAM menjadi lebih penting dari kesatuan

dan persatuan Indonesia. Persoalan Timor Timur menjadi contoh jelas dari pergeseran nilai tersebut.

Dalam pandangan pakar sosiologi-politik dari India, Anil Samarth, Indonesia memiliki masalah yang sama dengan semua negara bekas jajahan, yakni secara umum memiliki potensi konflik relatif tinggi sebagai sisa doktrin memecah belah kekuatan yang diterapkan dalam sistem kolonialisme. Lebih-lebih, semua negara penjajah senantiasa memiliki pusat data monografi dari semua wilayah yang pernah dikuasainya. Pusat data semacam itu sesuai dengan perjalanan waktu dapat dimanfaatkan kembali dalam menerapkan konsep diplomasi dan pengembangan sistem kolonialisme baru.

Sementara itu, sosiolog terkemuka dari Universitas Indonesia, Selo Sumardjan, mengatakan bahwa pengertian negara Republik Indonesia dengan sistem pemerintahannya belum sampai pada kebanyakan suku yang kebudayaannya masih bertaraf primordial.

Dalam pidato ilmiah ketika menerima anugerah Hamengku Buwono IX Awards dari Universitas Gajah Mada di Pagelaran Kraton Yogyakarta 19 Januari 2002, beliau mengatakan,

“Dari berbagai penelitian yang saya lakukan, yang dikenal oleh warga suku primordial mengenai negara dan pemerintahannya ialah TNI yang kadang-kadang masuk ke dalam daerah huniannya.”¹²⁶

Kedatangan TNI itu biasanya dalam rangka operasi militer terhadap kelompok penduduk yang dinyatakan sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

¹²⁶ Antara, 19 Januari 2002.

Selo Sumardjan juga menambahkan,

“Padahal, yang menjadi golongan pengacau itu warga suku dan keluarga yang hidup bersama dengan solidaritas yang kuat”.

Akibatnya, masyarakat adat (suku) setempat mendapatkan persepsi bahwa TNI yang diutus atau masyarakat RI itu selalu menimbulkan pertarungan bersenjata dengan masyarakat setempat.

Dengan persepsi negatif tersebut, menurut Selo Sumardjan, sukar sekali dapat diharapkan kesetiaan suku atau masyarakat adat kepada pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisme Indonesia masih jauh dari persepsi masyarakat primordial.

B. PERAN PERADILAN HAM AD HOC DALAM MENANGANI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERJADI PADA PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

Pelanggaran HAM berat merupakan *extra ordinary crimes* yang berdampak secara luas, baik pada tingkat nasional maupun Internasional. Pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman terhadap perorangan dan masyarakat. Atas dasar tersebut, Presiden dengan persetujuan bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Secara garis besar Undang-Undang Pengadilan HAM yang terdiri dari sepuluh bab dan 51 pasal dapat dibagi menjadi empat bagian. **Pertama**, mencakup tempat kedudukan dan lingkup kewenangan

Pengadilan HAM. **Kedua**, berkaitan dengan hukum acara. **Ketiga**, mengenai ketentuan pidana. **Keempat**, tentang Pengadilan HAM Ad Hoc.

Perihal **PERTAMA**, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.¹²⁷ Pengadilan tersebut bertugas dan mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Sementara itu yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Pengadilan HAM, kejahatan genosida didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara : Membunuh kelompok; mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Istilah genosida atau *genocide* ini pertama kali diutarakan oleh **Lemkin** dan diusulkan olehnya dalam tuntutan Amerika terhadap

¹²⁷ Pasal 2 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

sebagian besar penjahat perang tentara Jerman. *Genocide* olehnya diartikan sebagai “...is a crime under International law, includes a number of acts committed with intend to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious groups, as such...”.¹²⁸

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 9 undang-undang tersebut diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Perbuatan tersebut dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa termasuk perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum Internasional.

Masih menurut pasal tersebut, tindakan lain sebagai wujud kejahatan kemanusiaan dapat juga berbentuk penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Demikian pula penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional. Penghilangan orang secara paksa atau *apartheid*.

¹²⁸ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 13.

Bila dikaitkan dengan Statuta Roma (*Rome Statute*),¹²⁹ definisi genosida (*genocide*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM mengadopsi pengertian genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdapat dalam Statuta Roma. Berdasarkan Pasal 6 Statuta Roma perihal kejahatan dalam yurisdiksi mahkamah (*International Criminal Court*) genosida diartikan sebagai, “...any of the following acts committed with intend to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious groups...”. Demikian pula berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan kemanusiaan diartikan sebagai, “...any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population, with knowledge of the attack...”.

Selain *genocide* dan *crimes against humanity* sebagai bentuk *gross violence of human rights* yang terdapat dalam *Rome Statute*, kejahatan lainnya yang dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat adalah *war crimes* (kejahatan perang) dan *the crime of aggression* (kejahatan agresi). Kejahatan perang menurut statuta tersebut berarti pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949. Sementara kejahatan agresi belum didefinisikan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Statuta Roma.

Kembali kepada Undang-Undang Pengadilan HAM, lingkup kewenangannya tidak hanya menganut asas teritorial, namun juga

¹²⁹ Statuta Roma yang disahkan pada tanggal 17 Juli 1998 adalah sebuah statuta untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional guna mengadili Pelanggaran HAM berat. Statuta tersebut disahkan melalui suatu pemungutan suara yang didukung oleh 120 negara, sementara 7 negara menentang dan 21 negara abstain. Menarik untuk dicermati, 3 diantara negara yang menentang statuta tersebut adalah Amerika, China dan Irak.

menggunakan asas nasional aktif atau asas personal. Maksud asas ini adalah bahwa hukum atau perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan baik di dalam maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia. dengan mengambil padanan hukum di Belanda, **Enschede** mengatakan “...*Het personaliteits of actief nationaliteits beginsel : de Nederlandse strafwet toepasselijk op de Nederlander voor sommige feiten, buiten het Nederlandse grondgebied begaan...*”.¹³⁰

Dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, asas tersebut secara implisit tertuang dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Lingkup kewenangan Pengadilan HAM ini hanya dibatasi terhadap seseorang yang telah berusia 18 tahun pada saat kejahatan tersebut dilakukan.¹³¹

Perihal **KEDUA** yang berkaitan dengan hukum acara pada dasarnya mengikuti ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang termaktub dalam KUHAP. Akan tetapi dalam Pengadilan HAM ini terdapat beberapa ketentuan yang menyimpang dari KUHAP. *Pertama*, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses Pengadilan HAM. Penyelidik terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang dalam melakukan

¹³⁰ Enschede, Ch.J., 2002, *Op.cit.*, hlm. 35.

¹³¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

penyelidikan¹³² dapat membentuk tim **Ad Hoc** yang melibatkan unsur masyarakat. Sementara penyidikan¹³³ terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung.

Sama halnya dengan penyelidikan, Jaksa Agung sebagai penyidik dalam pelanggaran HAM berat dapat membentuk tim **Ad Hoc** yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Ketentuan ini jelas menyimpang dari apa yang termaktub dalam KUHAP bahwa yang bertindak sebagai penyidik adalah Polisi Republik Indonesia. Demikian pula yang bertindak sebagai penyidik adalah Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang diberi kewenangan oleh KUHAP.

Penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung yang juga dapat membentuk tim **Ad Hoc** dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat. Sementara pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh majelis Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim **Ad Hoc**. Hakim *ad-hoc* tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Jika dalam proses penyidikan selama jangka waktu yang ditentukan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka Jaksa Agung wajib

¹³² Penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹³³ Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Setelah SP3 ini dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dapat dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan. Apabila SP3 yang dikeluarkan tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban atau keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan pra-peradilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, kewenangan dan jangka waktu penahanan. Tersangka dan atau terdakwa dalam pelanggaran HAM berat selama proses pemeriksaan dapat ditahan oleh Jaksa Agung selama penyidikan dan atau penuntutan dan oleh Ketua Pengadilan dan atau Ketua Mahkamah Agung selama proses pemeriksaan sidang sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Masa penahanan dan penahanan tambahan untuk kepentingan penyidikan adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari. Sedangkan untuk kepentingan penuntutan, penahanan dapat dilakukan maksimal selama 70 (tujuh puluh) hari.

Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan terhadap terdakwa selama pemeriksaan di Pengadilan HAM adalah 120 (seratus dua puluh) hari. Sementara dalam pemeriksaan banding dan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, jangka waktu penahanan dan perpanjangan masing-masing 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian total penahanan terhadap seorang tersangka dan atau

terdakwa mulai dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan tingkat kasasi adalah 610 (enam ratus sepuluh) hari.

Tabel 1: Perbandingan Saksi-Saksi Yang Dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Ke Persidangan

Berkas	Saksi JPU	Saksi Penasehat Hukum	Saksi Ahli JPU	Saksi Ahli PH	Dibacakan
Herman Sedyono dkk	15 orang	8 orang	-	2 orang	4 orang
Abelio Soares	17 orang	8 orang	-	1 orang	-
Hulman Gultom	15 orang	2 orang	1 orang	1 orang	2 orang
Soedjarwo	8 orang	7 orang	1 orang	-	6 orang
Asep Kuswani dkk	10 orang	7 orang	1 orang	-	10 orang
Tono Suratman	18 orang	5 orang	1 orang	2 orang	3 orang
Endar Priyanto	12 orang	8 orang	1 orang	-	10 orang
Yayat Soedrajat	17 orang	3 orang	-	1 orang	9 orang
Eurico Guterres	11 orang	1 orang	-	-	7 orang
Timbul Silaen	16 orang	9 orang		3 orang	4 orang
Adam Damiri	16 orang	8 orang	1 orang	5 orang	4 orang

Ketiga, berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi serta kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Di samping itu setiap korban pelanggaran HAM berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi,

restitusi dan rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.¹³⁴

Perihal **KETIGA** mengenai ketentuan pidana. Hampir semua ancaman pidana dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dirumuskan secara *indeterminate sentence*. Artinya, pembentuk undang-undang memberi batasan minimum dan batasan maksimum pidana yang boleh dijatuhkan. Keuntungan dari sistem ini, orang lalu berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Maksudnya, untuk lebih mengefektifkan *preventie general*, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Selain itu hakim tidak dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan di luar batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi kelemahannya, motivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berbeda, sehingga hukuman yang dijatuhkan pun berbeda-beda pula sebagaimana yang diungkapkan **Lambroso** "*different criminal have different needs*". Adanya batasan hukuman yang harus dijatuhkan oleh hakim menimbulkan kurangnya rasa keadilan.¹³⁵ Terlebih-lebih berdasarkan undang-undang tersebut percobaan, permufakatan jahat atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM berat, dipidana sama dengan pelaku kejahatan.

Hal lain yang berkaitan dengan ketentuan pidana adalah tanggung jawab atasan dari seorang komandan militer atau seorang

¹³⁴ Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

¹³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 64.

atasan baik polisi maupun sipil lainnya. Seorang atasan dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana dalam yurisdiksi Pengadilan HAM yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah dan pengendaliannya yang efektif. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian secara patut oleh atasan yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa bawahan tersebut sedang atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat.

Demikian pula atasan yang tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pertanggungjawaban pidana yang demikian juga dapat dimintakan kepada seorang atasan baik polisi maupun sipil lainnya terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya dan berada di bawah kekuasaan serta pengendaliannya yang efektif.

Tindak pidana tersebut adalah atasan mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat. Demikian pula atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada

pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan.¹³⁶

Ketentuan pidana yang berkaitan dengan tanggung jawab atasan dirumuskan seperti tersebut di atas dalam bentuk delik omisi. Artinya, *tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan*. Delik omisi selalu merupakan delik formal. Menetapkan dapat dipidananya suatu kelalaian, menganggap adanya kewajiban untuk melakukan perbuatan positif tertentu.¹³⁷ **Sampson** merumuskan *crime by omission* sebagai pengambilalihan tanggung jawab atas suatu tugas atau kewajiban yang seharusnya dilakukan namun tidak diperbuat oleh si pelaku.¹³⁸

Perihal **KEEMPAT** mengenai Pengadilan HAM Ad Hoc. berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkan undang-undang tersebut, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan tersebut dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat terhadap peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden. Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut berada di lingkungan peradilan umum. Ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 43 secara implisit memberlakukan undang-undang tersebut untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau.

Ketentuan lain yang juga diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM selain dari apa yang tersebut di atas, menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat sebagaimana yang didefinisikan dalam

¹³⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

¹³⁷ Schaffmeister, D., Keijzer, N., Sutorius, *Op.cit.*, hlm. 32.

¹³⁸ Fraser Sampson, *Blackstone's Police Manual Crime*, Blackstone Press Limited, 2001, hlm. 10.

Undang-Undang Pengadilan HAM tidak mengenal ketentuan mengenai kadaluarsa.¹³⁹ Selain itu pula pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku, tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya melalui **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi**.¹⁴⁰ Demikian juga ketentuan mengenai kewenangan atasan yang berhak menghukum dan perwira penyerah perkara dalam Undang-Undang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Pengadilan HAM.¹⁴¹

Dikatakan adanya kasus pelanggaran HAM berat pada intinya adalah terjadinya pasca jajak pendapat yang melawan pro integrasi dan anti integrasi yang kemudian menimbulkan bentrokan yang mengakibatkan pembunuhan serta penyiksaan yang melibatkan para komandan militer, sipil serta pemerintahan daerah, yang salah satunya adalah mantan Gubernur Timor Timur dari kalangan sipil yaitu Abilio Jose Osario Soares. Dengan latar belakang seperti itu maka menarik untuk dikaji kaitannya dengan tanggung jawab atasan sipil.

Menurut Kaligis, Abilio Osario Soares dituduh telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc yang diketuai oleh I Ketut Murtika, bahwa terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak kejahatan terhadap kemanusiaan, perbuatan mana dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2)a dan b jis Pasal 7 huruf

¹³⁹ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

¹⁴⁰ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

¹⁴¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.¹⁴²

Sedangkan pada bukunya yang lain, Kaligis menekankan analisa hukum sebagai upaya pembelaan terhadap Abilio Osario Soares persidangan HAM berat (*Gross Violation of Human Rights*) ini merupakan ajang awal dimulainya gagasan baru dalam dunia peradilan di Indonesia, bahkan dalam tingkat regional, yang berkaitan dengan HAM.¹⁴³

Terhadap Abilio Osario Soares ini, didakwakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *Crimes Against Humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) sebagaimana tercantum dalam dakwaan ke satu berupa dugaan pelanggaran Pasal 7b jo Pasal 9 huruf (a) (Pembunuhan) dan dakwaan kedua dengan dugaan melanggar Pasal 7b jo Pasal 9 huruf (h) (penganiayaan).

Abilio Jose Osario Soares pada akhirnya dibebaskan dari hukumannya setelah permohonan peninjauan kembali (PK) atas kasus pelanggaran HAM beratnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Seperti yang dilaporkan Detikkom (2004), didampingi oleh pengacaranya Juan Felix Tambubolon dan O.C. Kaligis, Abilio mengatakan bahwa ia tidak akan membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional karena kasusnya dianggap telah selesai dengan adanya putusan PK dari Mahkamah Agung pada tanggal 4 November 2004, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung yang diketuai oleh Iskandar Kamil menilai bahwa Abilio tidak secara sah terbukti bersalah mengeluarkan kebijakan

¹⁴² O.C. Kaligis, *Peradilan (Politik) HAM di Indonesia Jilid I*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2002a.

¹⁴³ O.C. Kaligis, *Peradilan (Politik) HAM di Indonesia Jilid II*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2002b, hlm. 13 – 15.

untuk melakukan serangan meluas dan sistematis sebagaimana dakwaan sebelumnya dalam kasus pelanggaran HAM di Timor Timur.

Sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 2002 Pengadilan HAM Ad Hoc tingkat pertama menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Abilio. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan HAM Jakarta pada 13 Maret 2003. Abilio juga sempat mengajukan kasasi ke MA tetapi ditolak, pada 1 April 2004 dan pada 17 Juli 2004 Abilio masuk LP Cipinang, tetapi dalam masa itu Abilio mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Dalam pengajuan PK-nya, Abilio menyertakan bukti baru berupa surat anggota DPR Timor Timur yang menyatakan dirinya tidak bersalah.

Di tahap kedua, Eurico Guterres (mantan komandan PPI/ Pemimpin Aitarak) telah dinyatakan bersalah dan dituntut 10 tahun hukuman penjara. Dengan meninjau ulang sebagian pertimbangan pengadilan, dimana hanya dua terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, keduanya merupakan warga negara Indonesia (Abilio Soares dan Eurico Guterres). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **pasal 7 huruf b jis pasal 9 huruf a, pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, pasal 37** Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tabel 2 : Perbandingan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dan Putusan Pengadilan HAM

Brks	Berkas Perkara	Tuntutan JPU	Putusan	Majelis Hakim
1	Abilio Jose Osario Soares (Gubernur Tim-Tim)	10 thn 6 bln	Bebas	1. Emmi Marni M 2. Roky panjaitan 3. Rudi M. Rizki 4. Komariah Emong S 5. Winarno Yudho
2	Timbul Silaen (Kapolda Tim-Tim)	10 thn	Bebas	1. Andi Samsan N 2. Ridwan Mansyur 3. Kabul Supriyadi

				4. Amiruddin A 5. Heru Sutanto
3	Herman Sedyono (Bupati Kovalima) Lilieko Koeshadiyanto (Dandim Kovalima) Gatot Subyaktoro (Kapolres Kovalima) Achmad Syamsudin (Kasdim Kovalima) Sugito (Danramil Suai)	10 thn – 10 thn 6 bln	Bebas	1. Cicut Sutiarso 2. Andriani Nurdin 3. M. Guntur Alfie 4. Rachmat Syafei 5. Abdurrachman
4	Endar Prianto (Dandim Dilli)	10 thn	Bebas	1. Amril 2. Eddy Wibisono 3. Amiruddin A 4. Kabul Supriyadi 5. Sulaiman Hamid
5	Soejarwo (Dandim Dilli)	10 thn	Bebas	1. Andi Samsan N 2. Binsar Gultom 3. Kabul Supriyadi 4. Heru Sutanto 5. Amiruddin A
6	Hulman Gultom (Kapolres Dilli)	10 thn	Bebas	1. Andriani Nurdin 2. Sunarjo 3. Rudi M. Rizki 4. Kalelong Bukit 5. Sulaiman Hamid
7	Asep Kuswani (Dandim Liquica) Adios Salova (Kapolres Liquica) Leonito Martens (Bupati Liquica)	10 thn	Bebas	1. Cicut Sutiarso 2. Jalaluddin 3. Rachmat Syafei 4. Abdurrachman 5. Amiruddin A
8	Yayat Sudrajat (Dansatgas Tribuana)	10 thn	Bebas	1. Cicut Sutiarso 2. Jalaluddin 3. Abdurrachman 4. Guntur Alfie 5. Amiruddin A
9	Adam Damiri (Pangdam IX Udayana)	Bebas	Bebas	1. Emmi Marni M 2. Rocky Panjaitan 3. Rudi M. Rizki 4. Komariah Emong S 5. Sulaiman Hamid
10	Tono Suratman (Danrem 164)	10 thn	Bebas	1. Andi Samsan N 2. Binsar Gultom 3. Kabul Supriyadi 4. Heru Sutanto 5. Amiruddin A

11	Nur Moeis (Danrem 164)	10 thn	Bebas	1. Andriani Nurdin 2. Sunarjo 3. Rudi M. Rizki 4. Kalelong Bukit 5. Sulaiman Hamid
12	Eurico Guterres (Wakil Panglima PPI/ Komandan Aitarak)	10 thn	10 thn	1. Herman H Hutapea 2. Rocky Panjaitan 3. Rudi M. Rizki 4. Emong Komariah 5. Winarno Yudho/ Kalelong Bukit

Dengan mencermati putusan Pengadilan HAM Ad Hoc pada kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur maka terdapat delik yang berkaitan dengan tanggung jawab atasan (Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000) yaitu **pertama**, adalah putusan yang menjelaskan tanggung jawab atasan hanya berkaitan dengan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, antara pelaku dan terdakwa, yang telah memenuhi adanya unsur keterlibatan (*involvement*), hubungan (*connection*), pengetahuan (*knowledge*) atau maksud (*intend*) dari seorang atasan dengan suatu tindakan kejahatan.¹⁴⁴ Selain itu juga pertanggungjawaban seorang atasan terhadap kejahatan pada kasus tersebut didasarkan pada terjadinya pelanggaran. Ada dua alasan yang harus menjadi dasar pertimbangan untuk menilai bahwa suatu pelanggaran terhadap tugas telah mengakibatkan terjadinya kejahatan. **Pertama**, pelanggaran terhadap tugas atau dinas tersebut harus mempunyai hubungan langsung atau menjadi penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Dalam hal ini, kejahatan tidak akan terjadi jika tidak terjadi pelanggaran terhadap kewajiban dinas. **Kedua**, atasan harus memiliki kewenangan

¹⁴⁴ William G. Eckhardt, *Command Criminal Responsibility : A plea for a Workable Standard*, 97 *Military Law Review*, 1982, hlm. 5.

dan kekuasaan untuk mencegah terjadinya tindak pidana/ kejahatan tersebut.¹⁴⁵ Jika atasan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghentikan dan menindak kejahatan dan pelakunya sekaligus, maka tentu saja tidak tepat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.

Dengan dilihatnya penafsiran tanggung jawab atasan seperti dalam kasus tersebut maka mengakibatkan tidak ada para terdakwa dibebaskan jika anak buahnya tidak terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini tanggung jawab atasan selalu mensyaratkan adanya anak buah yang melakukan pelanggaran HAM berat ada bawahan dalam pengendalian yang efektif. Jika tidak ada hubungan antara pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dengan para terdakwa secara organisasional maupun pengendalian secara efektif maka terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Penafsiran yang demikian tidak melihat para terdakwa sebagai pihak yang punya otoritas dan kewenangan tertentu untuk mencegah adanya pelanggaran HAM berat.¹⁴⁶ Pengertian seseorang dikatakan mempunyai hirarki garis atasan dengan orang lain apabila ada aturan baku yang menyatakan berdasarkan kedudukan resmi seseorang dengan orang lain tersebut

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁴⁶ Lihat putusan Herman Sedyana dkk dan putusan Asep Kuswani dkk. Dalam dua putusan ini pembuktian untuk pertanggungjawaban para terdakwa dimulai dengan menjawab pertanyaan mengenai adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, siapa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dan apakah para terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang terjadi. Dalam kesimpulannya menjelaskan memang terdapat pelanggaran HAM yang berat dan pelakunya adalah milisi pro integrasi yang tidak ada hubungan organisasional dengan para terdakwa sehingga tidak mempunyai pengendalian yang efektif dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

secara vertikal atasan dengan bawahan atau sebaliknya.¹⁴⁷ Pengendalian atau kontrol yang efektif secara umum ditafsirkan sebagai suatu kondisi dimana atasan secara sungguh-sungguh mampu menggunakan kekuasaannya bilamana ia menginginkannya. Dengan demikian istilah tersebut menunjuk kepada “*material ability*” untuk mencegah dan menahan tindak pidana.¹⁴⁸ Mengenai unsur tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukannya pengendalian pasukan secara patut, menurut pengadilan mengandung arti atasan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah atau menghentikan terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya yang efektif.¹⁴⁹ Mengenai unsur “mengetahui atau berdasarkan keadaan yang berlangsung saat itu, seharusnya mengetahui bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat, pengadilan menyatakan bukan berarti bawahan tersebut harus secara aktif melakukan penyerangan namun dengan sikap pasif pun artinya bawahan tersebut tidak melakukan tindakan pencegahan atau gagal untuk menghentikan terjadinya pelanggaran HAM berat, bawahan tersebut sudah termasuk sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat.¹⁵⁰ Selanjutnya penerapan tanggung jawab atasan yang juga berkenaan kegagalan bertindak atau kegagalan untuk melakukan langkah-langkah

¹⁴⁷ Lihat putusan pengadilan HAM Ad Hoc pada tingkat pertama tanggal 14 Agustus 2002 dalam perkara Herman Sediono dkk. Lihat juga putusan pengadilan HAM Ad Hoc tanggal 27 Desember 2002 dalam perkara Yayat Sudrajat, hlm. 76.

¹⁴⁸ Lihat putusan Pengadilan HAM Ad Hoc tanggal 23 Desember 2002 dalam perkara letkol Soedjarwo, hlm. 42.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 53.

yang selayaknya. Dalam hal ini faktor posisi terdakwa dengan kewenangannya merupakan faktor penting dalam menentukan peranan terdakwa dalam peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi. Pandangan ini menjelaskan bahwa atasan tidak hanya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya dalam pengendalian yang efektif tetapi juga tetap harus bertanggungjawab juga terhadap tindak pidana yang terjadi akibat tidak dilakukannya pengendalian bawahan secara patut, artinya atasan gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah atau menghentikan terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi di dalam wilayah kekuasaannya yang efektif.¹⁵¹

Selanjutnya dengan memahami uraian tersebut di atas maka dalam kasus di Timor Timur dalam Pasal 6 ayat (3) Statuta ICTR serta Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY, yang unsur-unsur kedua statuta tersebut adalah: (i) hubungan atasan-bawahan; (ii) unsur kesengajaan, karena atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa kejahatan sedang dilakukan atau telah dilakukan bawahannya.

1. Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas *Strict Liability* dan *Vicarious Liability*

¹⁵¹ Lihat putusan terhadap terdakwa Letkol Soejarwo yang menjelaskan bahwa kendatipun pasukan yang berada di bawah pengendalian terdakwa bukan termasuk sebagai pelaku aktif tetapi bawahan terdakwa adalah sebagai pasif untuk mencegah, menghentikan, mengendalikan bawahan untuk bertindak secara aktif dan patut, padahal wewenang itu ada padanya.

Seperti diketahui dalam sistem hukum pidana di Indonesia ada pandangan yang menganut pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (aliran dualisme). Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa, unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan.¹⁵² Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini bukan berarti seseorang dapat dihukum dengan tidak adanya tindak pidana. Moeljatno mengatakan, *“orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”*.¹⁵³ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Jadi hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Namun, hal ini bukan berarti sebaliknya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut hal ini dikatakan oleh Moeljatno, dimana meskipun melakukan tindak

¹⁵² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 10.

¹⁵³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 155.

pidana, tidak selalu perbuatannya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan).¹⁵⁴ Lebih jauh lagi hal ini lebih ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi, yang mengatakan bahwa pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat, tapi tidaklah selalu demikian.¹⁵⁵ Hal ini lebih dipertegas lagi oleh Hoenderic yang mengatakan, “*punishment is not always of an offender*”.¹⁵⁶

Dengan berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh guru-guru besar hukum pidana maka bukankah tidak mungkin juga diberlakukannya pertanggungjawaban pidana pada seseorang berdasarkan penyimpangan asas kesalahan (*culpabilitas*) yaitu dikenal dengan istilah *strict liability* dan *vicarious liability*. Sebenarnya kedua asas tersebut tidak dikenal dalam *civil law system* melainkan dalam *common law system*.¹⁵⁷ Dalam *common law system*, memang teori tentang pertanggungjawaban pidana umumnya identik dengan teori tentang pertanggungjawaban perdata. Dalam hal ini Albert menyatakan, “*The general theory of criminal responsibility was identical to general theory of civil liability*”.¹⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut maka penyimpangan asas kesalahan hanya merupakan suatu konsep yang bersifat eksepsional/perkecualian dari konsep umum

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 97.

¹⁵⁶ Ted Honderich, *Punishment : The Supposed Justification*, Penguin Books, London, 1976, hlm. 16 mengutip Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 39.

¹⁵⁷ Kedua hal tersebut merupakan kebiasaan-kebiasaan hukum yang dianut oleh negara-negara dimana dalam *civil law system* oleh negara-negara eropa kontinental sedangkan *common law system* oleh negara-negara liberalism seperti Inggris.

¹⁵⁸ Albert W. Alshuler, *Law Without Value*, The University of Chicago Press, Chicago, 1997, hlm. 110 mengutip Chairul Huda, *op.cit*, hlm. 41.

pertanggungjawaban pidana. Konsep yang bersifat perkecualian ini dianut oleh Rancangan KUHP.

a. Asas *Strict Liability*

Menurut doktrin *strict liability*, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*means rea*).

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat perbedaan pendapat mengenai doktrin ini. Sebagian pendapat menyatakan bahwa prinsip “*Tidak terdapat sama sekali kesalahan*” harus dapat diterapkan, kecuali apabila dijumpai kesalahan besar pada pelaku. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa penerapan doktrin ini harus dibuat persyaratan yang lebih ketat, tergantung pada kasus-kasus bersangkutan.¹⁵⁹

Pendapat lain mengenai doktrin tersebut dalam hukum pidana dikemukakan oleh **Roeslan Saleh** yang menyatakan bahwa :

“...Dalam praktek pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan strict liability.”

Mencermati akan perumusan yang diberikan oleh Roeslan Saleh maka dimungkinkan pertanggungjawaban tersebut dapat diterapkan pada pertanggungjawaban pada seorang atasan, dalam

¹⁵⁹ Hamzah Hatrik, *op.cit*, hlm. 14 mengutip Hulsman dalam “*Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana*”, Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

hal kejahatan atau dalam pelanggaran HAM berat (kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida). Kejahatan tersebut secara otomatis dapat dipersalahkan walaupun ia tidak secara langsung melakukan perbuatan tetapi karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan, perbuatan tersebut berkaitan dengan tugas, seorang atasan harus bertanggung jawab. Sedangkan dalam hal pelanggaran HAM berat walaupun ia bukan militer namun kesalahan dapat juga berlaku pada sipil (Pasal 42 ayat (2) yang dalam hal ini adalah walikota atau bupati atau gubernur.

b. Asas *Vicarious Liability*

Doktrin ini merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Dengan demikian dalam pengertian “*vicarious liability*” ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti biasa, ia masih dapat dipertanggungjawabkan, bahkan dalam hal tertentu ia dipertanggungjawabkan sebagai pelaku (pembuat).

Jika dibandingkan antara “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” nampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaannya bahwa keduanya tidak mensyaratkan adanya “*mens rea*” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya

dimana dalam hal “*strict liability*” pertanggungjawaban pidana bersifat langsung dikenakan pada pelakunya, sedangkan pada “*vicarious liability*” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, unsur tanggung jawab atasan dengan persamaan yang terdapat dalam *strict liability* dan *vicarious liability* dimana keduanya tidak mensyaratkan adanya *mens rea* (kesengajaan) padahal apabila dikaitkan dengan unsur tanggung jawab atasan dalam ICTY maupun ICTR harus ada unsur kesengajaan, dimana atasan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa kejahatan sedang dilakukan atau telah dilakukan oleh bawahannya dan ia tidak mengambil tindakan untuk mencegah/hanya membiarkan. Namun hal ini (tidak adanya *mens rea*) juga dapat diimplementasikan dalam unsur pertanggungjawaban atasan, karena seorang atasan dipertanggungjawabkan bukan karena kesalahan namun karena perbuatan, karena ia membiarkan terjadinya kejahatan, dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terjadi bukan karena pembuatnya melakukan tindakan pidana, tetapi karena ada orang lain yang dalam hal ini (atasan) yang harus bertanggungjawab karena hubungan antara atasan dan bawahan. Mengenai hal ini Reid mengatakan, “*Vicarious liability is dispense with the requirement of actus reus and imputes the criminal act of one person to another person*”.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hlm. 51.

Jadi, pada dasarnya adanya *vicarious* kejadian lain, pertanggungjawaban pidananya timbul karena pelaku bertindak untuknya. Dengan demikian, terdapat persamaan antara *vicarious liability* dan tindak pidana penyuruh lakukan atau penganjur dalam penyertaan. Perbedaannya, jika dalam penyertaan dipersyaratkan adanya kesengajaan (kesalahan) pada para peserta, sedangkan dalam *vicarious liability* justru hal ini tampaknya dikecualikan. Namun bukan berarti dalam hal pertanggungjawaban *vicarious liability* tidak berdasar kesalahan. Dalam hal ini Fletcher mengatakan, *vicarious liability* sebagai “*form of liability relates to complicity as strict liability relates to principle of culpability*”.¹⁶¹ Berdasarkan hal tersebut maka lebih lanjut ia mengatakan juga bahwa dalam *vicarious liability* dapat dipandang sebagai bentuk hubungan baru dari penyertaan, “*vicarious liability as categories of complicity*”.¹⁶²

¹⁶¹ Fletcher, George P, *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford, 2000, hlm. 647 mengutip Chairul Huda, hlm. 45.

¹⁶² *Ibid*, hlm. 649.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) pokok permasalahan yaitu; Bagaimana terjadinya pelanggaran HAM berat pada Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur serta Peran Peradilan HAM Ad Hoc terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur, maka penulis berkesimpulan :

Dari permasalahan ***pertama***, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pada awalnya muncul Opsi 1, ketika presiden punya usul untuk memberikan otonomi khusus kepada Timor Timur yaitu pada akhir 1998, kemudian awal Januari 1999 muncul opsi 2 yang dua-duanya dibicarakan dalam *tripartit agreement*. Setelah ada opsi 1 dan 2

tersebut, situasi Timor Timur berubah dengan sangat cepat dimana ada kebijakan baru yang sangat berbeda dimana kelompok-kelompok yang tadinya bertentangan (pro dan anti integrasi) harus dianggap sebagai pihak yang harus dihormati.

Yang bertanggungjawab terhadap keamanan dalam proses jajak pendapat adalah Kepolisian karena pihak Internasional tidak menghendaki campur tangan TNI dalam masalah pengamanan jajak pendapat.

Pada tanggal 4 September terjadi *chaos*, 5 September malam keadaan semakin memburuk dan muncul tindakan anarkis dan sporadis yang mengganggu KAMTIBMAS yang terjadi di Dili dan 4 kabupaten lainnya. Penyebabnya adalah pengumuman hasil jajak pendapat yang dipercepat, yang seharusnya tanggal 7 September 1999 dimajukan menjadi tanggal 4 September 1999. Diduga telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh panitia jajak pendapat dan UNTAET, namun komplain yang diajukan tidak mendapat tanggapan yang memuaskan. Pada dasarnya penyerangan tersebut merupakan rangkaian dari dendam yang sudah lama dan berkepanjangan dari masyarakat pro integrasi akibat tekanan teror dan pembunuhan yang dilakukan oleh anti integrasi kepada pro integrasi. Yang terlibat konflik adalah antara Kelompok Pro Integrasi dan Kelompok Anti Integrasi.

Dari permasalahan yang **kedua**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Sidang tingkat pertama Pengadilan HAM Ad Hoc untuk pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) di Timor Timur April – September 1999 yang berlangsung sejak 21 Februari 2001 telah berakhir. Melalui pengadilan ini Indonesia ingin menunjukkan kepada masyarakat Internasional, bahwa Indonesia memiliki tekad dan *willingness* yang kuat untuk menunaikan kewajiban mengadili mereka yang diduga kuat melakukan kejahatan *jus cogens* dalam hukum Internasional.

Dakwaan untuk kedua belas berkas perkara dibagi menjadi dakwaan kumulatif dan alternatif serta campuran. Berkas dengan dakwaan kumulatif ini terdiri dari dakwaan kesatu yang biasanya berupa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan dakwaan kedua yang juga berupa kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan. Dakwaan yang berupa dakwaan alternatif/campuran terdiri dari dakwaan primer, subsider dan lebih subsider. Sama halnya dengan dakwaan kumulatif, kejahatan alternatif/campuran juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa pembunuhan dan penganiayaan.

Konstruksi dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pengadilan HAM Ad Hoc. Pertama, di dalam ke-12 Dakwaan tersebut, JPU menetapkan 5 (lima) *locus delicti* yaitu peristiwa di kompleks gereja Liquisa, rumah Manuel Carascalao di Dili, Diosis Dili, rumah Uskup Bello di Dili dan kompleks gereja Ave Maria Suai, Kovalima. Sedangkan untuk tempus delictinya JPU menetapkan peristiwa yang terjadi pada April 1999 dan September 1999.

Perspektif yang digunakan dalam dakwaan menggeser konteks peristiwa *crime against humanity* menjadi konflik horizontal antara kelompok sipil. Kehadiran milisi dalam dakwaan dipaparkan sebagai sesuatu yang terpisah dari institusi militer. Kelompok ini hanya diidentifikasi sebagai salah satu pihak dari pertentangan horizontal antara kelompok pro dan anti integrasi.

Rumusan yang dimaksud oleh penjelasan pasal 9 maka dakwaan dirumuskan pada pelanggaran secara *omission*, yaitu pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan bawahannya dengan tidak diambilnya tindakan yang seharusnya dilakukan, yaitu mencegah, menghentikan, dan menghukum bawahannya yang telah melakukan pelanggaran pidana. Jangka waktu pemeriksaan untuk persidangan adalah 180 hari sesuai dengan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000.

Proses pemeriksaan melalui *teleconference* dilakukan setelah saksi korban enggan menghadiri persidangan dengan alasan keamanan. Alasan yuridis *teleconference* ini adalah untuk mencari kebenaran materiil yang diperlukan dalam setiap perkara pidana. Hakim dalam konteks ini sangat memahami bahwa keberadaan saksi korban untuk memberikan kesaksian sangat penting guna pencarian kebenaran materiil dan proses pembuktian sebelumnya dianggap tidak cukup tanpa adanya keterangan dari saksi korban.

Dengan terbukti adanya kejahatan terhadap kemanusiaan ini, maka pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut juga telah dapat ditetapkan. Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan tuntutan minimal semuanya yakni 10 tahun, kecuali terhadap

3 orang terdakwa yang dituntut 10 tahun lebih (10 tahun 3 bulan dan 10 tahun 6 bulan).

Dari 12 berkas perkara, semuanya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Semua keputusan majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan sesuai dengan pasal 9 a dan pasal 9 b UU No. 26 Tahun 2000.

Secara garis besar pelaku pelanggaran HAM berat adalah milisi pro integrasi. Putusan yang menjelaskan tanggung jawab atasan hanya berkaitan dengan adanya hubungan atasan dan bawahan antara pelaku dengan terdakwa. Putusan yang berkaitan dengan penafsiran mengenai tanggung jawab atasan yang seperti ini mengakibatkan tidak ada terdakwa dibebaskan jika anak buahnya tidak terbukti melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini tanggung jawab atasan selalu mensyaratkan adanya anak buah yang melakukan pelanggaran HAM berat dan ada bawahan dalam pengendalian efektif yang melakukan pelanggaran HAM berat. Jika tidak ada hubungan antara pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dengan para terdakwa secara organisasional maupun pengendalian efektif maka terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Penafsiran yang demikian tidak melihat para terdakwa sebagai pihak yang punya otoritas dan

kewenangan tertentu untuk mencegah adanya pelanggaran HAM berat.¹⁶³

Sedangkan pandangan yang kedua adalah putusan yang menafsirkan delik tanggung jawab atasan yang juga berkenaan dengan adanya kegagalan bertindak atau kegagalan untuk melakukan langkah-langkah yang selayaknya. Dalam pandangan ini faktor posisi terdakwa dengan kewenangannya merupakan faktor penting dalam menentukan peranan terdakwa dalam peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi.

Terhadap hukuman minimal dimana untuk kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan ini hukuman minimalnya adalah 10 tahun, untuk terdakwa Eurico Guterres dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdakwa lainnya yang dinyatakan bersalah dijatuhi pidana di bawah 10 tahun dan paling tinggi 5 tahun.

Alasan mengenai hukuman di bawah minimal ini adalah secara umum merupakan alasan yang berkenaan dengan prinsip keadilan. Para terdakwa yang dinyatakan bersalah ini meskipun bertanggung jawab terhadap terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan tetap para terdakwa ini bukan merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara sendirian tetapi terdapat pihak lainnya

¹⁶³ Lihat putusan Herman Sedyono dkk dan putusan Asep Kuswani dkk. Dalam dua putusan ini pembuktian untuk pertanggungjawaban para terdakwa dimulai dengan menjawab pertanyaan mengenai adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, siapa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut dan apakah para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat yang terjadi. Dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa memang terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pelakunya adalah milisi pro integrasi yang tidak ada hubungan organisasional dengan para terdakwa sehingga terdakwa tidak mempunyai atasan atau pengendalian yang efektif dan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

yang juga harus bertanggung jawab. Disamping itu bahwa para terdakwa bukan merupakan pelaku langsung dan dinyatakan bersalah karena kelalaiannya dalam mengambil tindakan.

Secara yuridis, majelis hakim yang memutus bersalah dengan pidana di bawah 10 tahun sesuai dengan peraturan adalah dengan alasan bahwa dalam praktek peradilan Internasional tidak ada ketentuan yang berkenaan dengan pidana minimal dan dalam Statuta Roma sendiri yang merupakan landasan berdirinya *International Criminal Court* juga tidak mengatur adanya hukuman minimal.¹⁶⁴ Alasan yang secara yuridis dikemukakan adalah bahwa sebelum adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 telah ada Perpu No. 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang mengatur tentang pidana minimal 5 tahun dan jika dipertentangkan dengan UU No. 26 Tahun 2000 yang mengatur pidana minimal 10 tahun maka majelis hakim menggunakan kaidah pasal 1 ayat 2 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut dimana ada dua pemidaan yang berbeda dan mengatur hal yang sama maka digunakan peraturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.¹⁶⁵

B. SARAN – SARAN

¹⁶⁴ Alasan ini hampir semua dipakai dalam menjelaskan tentang alasan penjatuhan pidana dibawah 10 tahun.

¹⁶⁵ Alasan ini dikemukakan oleh majelis hakim yang diketuai oleh Andi Samsan Nganro dengan terdakwa Letkol. Soejarwo yang dijatuhi pidana 5 tahun.

1. Memandang dan menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM dan Kemanusiaan yang universal sebagai fundamen utama dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur.
2. Meletakkan HAM sebagai salah satu bidang yang berprioritas utama dalam pembangunan nasional, salah satu contoh manifestasinya yang dimaksud misalnya : memasukkan pendidikan HAM ke dalam kurikulum seluruh pendidikan formal dari jenjang terendah hingga tertinggi, baik pendidikan sipil maupun militer.
3. Turut berpartisipasi aktif dalam usaha Internasional/global untuk melindungi, mengembangkan, memajukan dan menegakkan HAM.
4. Sehubungan dengan kekurangan-kekurangan dalam perundang-undangan peralihan HAM di Indonesia, sudah seyogyanya apabila dalam waktu dekat ini diupayakan undang-undang hukum acara peradilan HAM beserta “Pedoman Pelaksanaan” nya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia (PECIRINDO) , Jakarta, 2006.
- A. Gunawan Setiardja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- A. M Fatwa, *Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok*, Dharmapena Publishing, Jakarta, 2005.
- A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Al Araf, M. Ali Syafaat, dan Pongky Indarti, *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia*, Imparsial, Jakarta, 2005.
- Ali Alatas, *The Pebble in the Shoe : The Diplomatic Struggle for East Timor*, Aksara Karunia, Jakarta, 2006.
- Antonio Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM : Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Bagir Manan Dkk, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, YHDS, Jakarta, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.

-----, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

-----, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Bilver Singh, *Timor Timur Indonesia dan Dunia (rev)*, PT Citra Kharisma Bunda, Jakarta, 1998.

Bill Nicol, *Timor A Nation Reborn*, Equinox Publishing, Jakarta, 2002.

Bismar Siregar, *Catatan Bijak Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

C. de Rover, *To Serve and To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Chairul Huda, *“Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

D.Shobirin Nadj, dan Naning Mardinia, *Diseminasi Hak Asasi Manusia Perspektif dan Aksi*, CESDA-LP3ES, Yogyakarta, 2000.

Daniel D Bradlow, *Bank Dunia, IMF dan Hak Asasi Manusia*, ELSAM, Jakarta, 1999.

Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

Djaali, Pudji Muljono, M. Said Saile dan Ramly, *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis dan Aplikasi)*, CV Restu Agung, Jakarta, 2003.

Domingos M. Dores Soares, *Kejahatan Sempurna The Perfect Crime*, Yayasan FUTURO, Jakarta, 2000.

-----, *Penyelesaian Sejati : The Timoris Solution*, Yayasan FUTURO, Jakarta, 2000.

-----, *Timor Timur Kasus Paling Memalukan PBB*, Setiahati Press, Jakarta, 2002.

Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Hak Asasi Manusia (Dilengkapi dengan Rangkuman)*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006.

-----, *Tanggung Jawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat dan Penerapannya Oleh Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2006.

Eddy O. S. Hiariej (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

ELSAM, *Kegagalan Leipzig Terulang di Jakarta : Catatan Akhir Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur*, ELSAM, Jakarta, 2003.

-----, *Ketika Prinsip Kepastian Hukum Menghakimi Konstitusionalitas Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu : Pandangan Kritis Atas Putusan MK dan Implikasinya Bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, ELSAM, Jakarta.

-----, *Kondisi dan Proyeksi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia : Catatan HAM Awal Tahun 2007* , ELSAM, Jakarta, 2007.

-----, *Pengadilan HAM Ad Hoc di bawah Standar : Preliminary Conclusive Report Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares dan Herman Sedyono dkk*, ELSAM, Jakarta.

-----, *Progress Report #1 Monitoring Pengadilan HAM Ad Hoc Terhadap Pelanggaran Berat HAM di Timor Timur April – September 1999*, ELSAM, Jakarta.

-----, *Tutup Buku dengan “Transitional Justice” : Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999 – 2004 dan Membuka Lembaran Baru 2005*, ELSAM, Jakarta, 2005.

Erikson Hasiholan Gultom, *Kompetensi Mahkamah Pidana Internasional dan Peradilan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Timor Timur*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006.

Eriyanto, *Metodologi Polling : Memberdayakan Suara Rakyat*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

F.X. Lopes Da Cruz, *Kesaksian Aku dan Timor Timur*, Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, Jakarta, 1999.

Geoffrey C Gunn, *500 Tahun Timor Loro Sae*, Insist Press, Yogyakarta, 2005.

George Clack, dan Kathleen Hug, *Hak Asasi Manusia : Sebuah Pengantar (diterjemahkan oleh A. Hermaya)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.

Hadi Setia Tunggal, *Deklarasi Universal Tentang Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) cet ke-2*, Harvarindo, Jakarta, 2000.

-----, *Tanya Jawab Perserikatan Bangsa-bangsa dan Hak-hak Asasi Manusia*, Harvarindo, Jakarta, 2000.

- Helen Mary Hill, *Gerakan Pembebasan Nasional Timor Lorosae*, Yayasan HAK & Sahe Institute for Liberation, Dili, 2000.
- Hendro Subroto, *Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Herbert F. Spirer dan Louise Spirer, *Analisis Data untuk Memantau HAM*, ITB, Bandung, 1997.
- Idi Subandi Ibrahim (ed), *Selamat Jalan Timor Timur, Pergulatan Mengungkap Kebenaran*, IDE Indonesia, Jakarta, 2002.
- Iip D Yahya, *Mengadili Menteri Memeriksa Perwira*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, Utama, 2004.
- Jose Ramos Horta, *Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*, Solidamor, Jakarta, 1998.
- Khairul Jasmi, *Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Komite Bersama untuk Masyarakat Timor Timur, *Timor Timur di Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa*, Komite Bersama untuk Masyarakat Timor Timur, Jakarta, 1997.
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung, -----.
- Lela E Madjiah, *Timor Timur Perginya Si Anak Hilang*, Antara Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (cet. ke-7)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Machmuddin Noor, Slamet Moeljono, Sujamto, dan Soemarno, *Lahirnya Propinsi Timor Timur*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, Jakarta, 1977.

- Mansour Fakih, Antonius M. Indrianto, dan Eko Prasetyo, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan : Pegangan Untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*, Insist Press, Yogyakarta, 2003.
- Martinho G. da Silva Gusmao, *Timor Lorosae Perjalanan Menuju Dekolonisasi Hati-Diri*, Dioma, Malang, 2003.
- Michele Turner, *Cerita Tentang Timor Timur : Kesaksian Pribadi 1942-1992*, Pijar Indonesia, -----, 1995.
- Mohammad Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi(ed), *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Otje C. Kaligis, *Peradilan (Politik) HAM di Indonesia Jilid I*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2000a.
- , *Peradilan (Politik) HAM di Indonesia Jilid II*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2000b.
- Peter Baehr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution dan Leo Zwaak, *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- Peter Beilharz, *Teori-teori Sosial Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Peter Tukan, *Rekonsiliasi yang Tidak Tuntas Duri Kemerdekaan Timor Timur*, Verbum Publishing, Jakarta, 2007.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Ridha Saleh, *Ecocide : Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, WALHI, Jakarta, 2005.

Romli Atmasasmita, *Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Roy Pakpahan, *Mengenai Timor Timur Dulu dan Sekarang*, Solidamor, Jakarta, 1998.

Ruswati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, PTIK Press, Jakarta, 2006.

Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia : Analisis KOMNAS HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, IKIP Malang, Malang, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

-----, *Sosiologi Hukum : Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002.

Sindhunata (ed), *Jembatan Air Mata : Tragedi Manusia Pengungsi Timor Timur*, Galang Press, Yogyakarta, 2003.

St. Harum Pudjiarto, *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, -----.

Suhadi Somomoeljono, *Menguak Konspirasi Internasional di Timor Timur Sebuah Analisis Yuridis*, Lembaga Studi Advokasi Independensi Peradilan Indonesia, Jakarta, 2001.

Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Catatan Atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc : Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor Timur*, ELSAM, Jakarta, 2005.

Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, Rori Permadi U., Nurul Rochayati, Supriyanto, Suzanne Maria A., dan Wahyu Addinata, *Disintegrasi Pasca Orde Baru : Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Centre for International Studies (CIReS) FISIP UI bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Tim Penulis, *Bersaksi di Tengah Badai Dari Catatan Wiranto Jenderal Purnawirawan*, Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta, 2003.

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Tono Suratman, *Untuk Negaraku : Sebuah Potret Perjuangan di Timor Timur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Tri Agus S Siswowiharjo (ed), *Xanana Gusmao : Timor Leste Merdeka Indonesia Bebas*, Solidamor, Jakarta, 1999.

Wiranto, *Bersaksi di Tengah Badai : Dari Catatan Wiranto*, IDe Indonesia, 2003.

-----, *Witness in the Storm : Truth Revealed by Wiranto*, IDe Indonesia, Jakarta, 2003.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Y. Argo Twikromo, P. Didit Krisnadewara, dan R. Maryatmo, *Persepsi dan Perilaku Kesejahteraan Hidup Rakyat Timor Timur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Yohanes Sukandar, Sigit Wijayanto dan Martinus Manggo (ed.), *Selamat Tinggal Timor Timur*, Insist Press, Yogyakarta, 2000.

Zacky Anwar Makarim, Glenney Kairupan, Andreas Sugiyanto dan Ibnu Fatah, *Hari-hari Terakhir Timor Timur : Sebuah Kesaksian*, PT. Sportif Media Informasindo, Jakarta, 2003.

Lampiran 1

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGADILAN
HAK ASASI MANUSIA AD HOC
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dilakukan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor 44/DPR-RI/III/2000 – 2001 tanggal 21 Maret 2001 telah menyetujui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan di Tanjung Priok pada tahun 1984, yang kemudian diusulkan kepada Presiden dengan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor KD.02/1733/DPR-RI/2001 tanggal 30 Maret 2001;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengingat :

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN
HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT.

Pasal 1

Membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 2

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984.

Pasal 3

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembentukan dan pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 38

Lampiran 2

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disempurnakan dengan lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (locus dan tempus delicti) pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA AD HOC PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi di Timor Timur dalam wilayah hukum Liquica, Dilli, dan Soae pada bulan April 1999 dan bulan September 1999, dan yang terjadi di Tanjung Priok pada bulan September 1984.”

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2001
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 111
Lampiran 3

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT.

Penjelasan :

I. UMUM

Dalam proses peradilan pidana, salah satu bukti yang penting adalah kesaksian orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi sebagai alat bukti yang utama terlihat dengan ditempatkannya saksi dalam deretan pertama alat bukti dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam proses peradilan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kepada korban dan saksi perlu diberikan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Dengan jaminan pemberian perlindungan tersebut diharapkan baik korban maupun saksi dapat memberikan keterangan yang benar, sehingga proses peradilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat dilaksanakan dengan baik.

Agar perlindungan tersebut dapat diberikan sesuai dengan hukum dan keadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, perlindungan tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini perlindungan yang diberikan kepada korban dan atau saksi meliputi perlindungan baik fisik maupun mental, perahasiaan identitas, dan pemberian keterangan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban dan saksi kepada aparat penegak hukum dan atau aparat keamanan, dan perlindungan diberikan secara cuma-cuma.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
3. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang is dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

4. Ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- (1). Setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- (2). Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penjelasan :

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “pemeriksaan di sidang pengadilan” adalah proses pemeriksaan pada sidang di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung.

Pasal 3

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

Penjelasan :

Pasal 3

Cukup jelas.

BAB II

BENTUK-BENTUK PERLINDUNGAN

Pasal 4

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. perahasiaan identitas korban atau saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Penjelasan :

Pasal 4

Cukup jelas.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 5

- (1) Perlindungan terhadap korban dan saksi dilakukan berdasarkan :
 - a. inisiatif aparat penegak hukum dan aparat keamanan; dan atau
 - b. permohonan yang disampaikan oleh korban atau saksi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dilakukan.
 - a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahap penyelidikan;
 - b. Kejaksaan, pada tahap penyidikan dan penuntutan;
 - c. Pengadilan, pada tahap pemeriksaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan lebih lanjut kepada aparat keamanan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Permohonan perlindungan dapat disampaikan secara langsung kepada aparat keamanan.

Penjelasan :

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud inisiatif aparat penegak hukum atau aparat keamanan adalah tindakan perlindungan yang langsung diberikan berdasarkan pertimbangan aparat bahwa korban dan saksi perlu segera dilindungi. Inisiatif tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Permohonan perlindungan yang diajukan pada tahap tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sekaligus merupakan permohonan untuk tahap berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 6

Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, aparat penegak hukum atau aparat keamanan melakukan :

- a. klarifikasi atas kebenaran permohonan; dan
- b. identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan.

Penjelasan :

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi dihentikan apabila :
 - a. atas permohonan yang bersangkutan;
 - b. korban dan atau saksi meninggal dunia; atau
 - c. berdasarkan pertimbangan aparat penegak hukum atau aparat keamanan, perlindungan tidak diperlukan lagi.
- (2) Penghentian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum perlindungan dihentikan.

Penjelasan :

Pasal 6
Cukup jelas.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Korban dan saksi tidak dikenakan biaya apapun atas perlindungan yang diberikan kepada dirinya.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap korban dan saksi dibebankan pada anggaran masing-masing instansi aparat penegak hukum atau aparat keamanan.

Penjelasan :

Pasal 8

Cukup jelas.

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan :

Pasal 9

Cukup jelas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 6
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4171

Lampiran 4

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI
TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA YANG BERAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOMPENSASI, RESTITUSI,
DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA YANG BERAT.

Penjelasan :

I. UMUM

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Dalam hal terjadi pengabaian, pengurangan dan perampasan hak asasi manusia, terutama terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi, maka pihak korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya berhak memperoleh kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi secara tepat, cepat, dan layak dalam arti bahwa pihak korban atau ahli warisnya berhak memperoleh ganti kerugian atau pengembalian hak-hak dasarnya yang dilakukan sesuai dengan sasaran yakni korban dan penggantian kerugiannya, pelaksanaannya segera diwujudkan, dan pengembalian haknya harus patut sesuai dengan rasa keadilan.

Ganti kerugian atau pengembalian hak, misalnya pengembalian kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik, yang masuk dalam lingkup kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diputus oleh Pengadilan HAM di setiap tingkatan pengadilan. Mengenai besarnya ganti kerugian atau pemulihan kebutuhan dasar tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara yang dicantumkan dalam amar putusannya. Jadi, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya secara adil, layak dan cepat mengenai besarnya ganti kerugian tersebut berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan beserta bukti-bukti yang mendukungnya.

Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai pelaksanaan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berbunyi :

1. Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
2. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

3. Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Kompensasi dan rehabilitasi yang menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara dilaksanakan oleh Departemen Keuangan. Sedangkan mengenai kompensasi, dan rehabilitasi di luar pembiayaan dan perhitungan keuangan negara dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Terkait.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada Instansi Pemerintah Terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM meliputi Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
3. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian

harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

6. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.
7. Instansi Pemerintah Terkait adalah instansi Pemerintah termasuk Departemen Keuangan yang secara tegas disebut dalam amar putusan.

Penjelasan :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

1. Kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
2. Pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak.

Penjelasan :

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ahli waris” adalah ahli waris sesuai dengan penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tepat” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban.

Yang dimaksud dengan “layak” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

1. Instansi Pemerintah Terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal kompensasi dan atau rehabilitasi menyangkut pembiayaan dan perhitungan keuangan negara, pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Penjelasan :

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Penjelasan :

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pelaksanaan putusan Pengadilan HAM oleh Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pengadilan HAM yang mengadili perkara yang bersangkutan dan Jaksa Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dilaksanakan.

Penjelasan :

Pasal 5

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap Instansi Pemerintah Terkait dalam melaksanakan putusan Pengadilan HAM.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 6

1. Pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung.
2. Jaksa Agung melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi.

Penjelasan :

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Instansi Pemerintah Terkait melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi serta pelaku atau pihak ketiga melaksanakan pemberian restitusi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima.

Penjelasan :

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

1. Pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi, dilaporkan oleh Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan HAM yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi.
2. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
3. Setelah Ketua Pengadilan HAM menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan HAM mengumumkan

pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Penjelasan :

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar tercipta adanya keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada pihak korban.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung.
- (2) Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Penjelasan :

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Penjelasan :

Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan kepada pelaku atau Pemerintah dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi untuk dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kemampuan bila dilaksanakan sekaligus.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penjelasan :

Pasal 11
Cukup jelas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

KAMUS ISTILAH PENTING HAM

Affirmative Action : Tindakan yang diambil oleh suatu pemerintahan atau lembaga swasta untuk memperbaiki tindakan diskriminatif di bidang pendidikan, pekerjaan, atau promosi yang didasarkan pada gender, ras, suku, agama, atau ketidakmampuan tertentu, yang pernah dilakukannya di masa lampau.

Associacao Popular Democratica de Timorese (APODETI) : Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor, terbentuk 27 Mei 1974 – dulunya bernama Associacao para a Integracao de Timor Indonesia (AITI)/ Perhimpunan untuk integrasi di Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain Jose Fernando Osario Soares dan Arnaldo dos Reis Araujo.

Australian Council for Overseas Aid (ACFOA) : salah satu LSM Australia yang sering keluar masuk ke Timor Timur dengan menyalahgunakan visa kunjungan wisata.

Barisan Rakyat Timor Timur (BRTT) : atau *United Front of the East Timorese People*, dibentuk oleh FX Lopes da Cruz dan kawan-kawan pada 29 April 1999.

Civil and Political Rights (Hak-Hak Sipil dan Politik) : Hak-hak warga negara untuk bebas dan setara; kadang-kadang merujuk sebagai generasi pertama Hak Asasi. Hak-hak sipil yang di dalamnya termasuk kebebasan untuk beribadah, berpikir dan mengungkapkan diri sendiri, untuk memilih, untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik, dan untuk memiliki akses terhadap informasi.

Codification, Codify : Proses penyusunan kelaziman hukum Internasional ke dalam bentuk tulisan.

Collective Rights : Hak asasi kelompok untuk mempertahankan kepentingan dan identitas mereka.

Commission on Human Rights (Komisi Hak Asasi Manusia) : Badan yang dibentuk oleh Economic and Social Council (ECOSOC) dari PBB untuk membidangi masalah Hak Asasi Manusia; yang merupakan salah satu dari sejumlah badan HAM Internasional yang pertama dan terpenting.

Conselho Nacional Resistencia Timorese (CNRT) : Dewan Perlawanan Rakyat Timor Timur, organisasi yang memayungi kelompok perlawanan rakyat Timor Timur. Presiden CNRT adalah Xanana Gusmao sekaligus Panglima Perang front bersenjata Falintil. Sebelum menjadi CNRT, dulunya bernama CNRM (*Conselho Nacional da Revolucionario Maubere*).

Convention (Konvensi) : Perjanjian yang mengikat antar negara dan digunakan bersamaan dengan *treaty* dan *covenant*. Konvensi lebih kuat keabsahannya daripada deklarasi karena konvensi memiliki ikatan hukum bagi negara-negara yang menandatangani. Ketika UN General Assembly mengadopsi sebuah konvensi, maka itu menciptakan norma dan standard. Sekali sebuah konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB, negara-negara anggota PBB yang meratifikasi konvensi itu berjanji untuk menegakkannya. Pemerintah yang melanggar standar yang telah ditentukan dalam konvensi kemudian dapat digugat oleh PBB.

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (Women's Convention) (diadopsi 1979; berlaku pada tahun 1981) : Dokumen Internasional pertama yang mengikat secara hukum, yang melarang diskriminasi terhadap perempuan dan mewajibkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk mendorong kesetaraan bagi perempuan.

Convention on the Rights of the Child (Children's Convention) (diadopsi 1989; berlaku pada tahun 1990) : Konvensi ini menentukan ranah cakupan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, sosial dan politik bagi anak-anak secara penuh.

Covenant (Konvenan) : Konvenan Hak Asasi Manusia yang utama keduanya disetujui pada tahun 1966, adalah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights = ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights = ICESCR).

Customary International Law : Hukum yang mengikat negara-negara sekalipun tidak secara tertulis, tetapi lebih sebagai kebiasaan; Jika sejumlah negara beranggapan seolah-olah sesuatu itu adalah hukum, sesuatu yang berlaku sebagai hukum karena penggunaannya; Hal ini merupakan salah satu sumber utama hukum Internasional.

Declaration (Deklarasi) : Dokumen pernyataan persetujuan terhadap sejumlah standard yang tidak memiliki ikatan hukum. Konferensi PBB, seperti konferensi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1993 di Wina dan Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing pada tahun 1995, biasanya menghasilkan dua set deklarasi: satu ditulis oleh perwakilan pemerintah dan satu oleh ORNOP (Non Governmental Organizations = NGOs) Majelis Umum PBB sering mengeluarkan deklarasi yang berpengaruh tetapi tidak memiliki ikatan hukum (*non binding*).

Dewan Solidaritas Mahasiswa, Pelajar Pemuda Timor Timur : diketuai oleh Antero Bendito da Silva, mahasiswa FISIP Untim Dili.

Economic and Social Council (ECOSOC) : Dewan PBB yang terdiri dari 54 anggota, terutama memperhatikan masalah populasi, perkembangan ekonomi, HAM dan kriminal. Badan yang berkedudukan tinggi ini menerima dan menerbitkan laporan HAM dalam berbagai situasi.

Economic and Social Cultural Rights (Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya) : Hak yang memperhatikan masalah produksi, perkembangan dan pengelolaan bahan-bahan kebutuhan hidup. Hak untuk mempertahankan dan mengembangkan identitas budaya seseorang. Hak untuk memberikan keamanan sosial dan ekonomi kepada masyarakat, kadangkala menunjuk pada hak yang berorientasi pada keamanan atau hak generasi kedua. Contohnya adalah hak terhadap makanan, tempat tinggal, dan pemeliharaan kesehatan.

Environmental, Cultural, and Developmental Rights : Kadang-kadang dianggap sebagai hak generasi ketiga, hak-hak ini mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat dan kelompok masyarakat itu memiliki hak dalam pengembangan budaya, politik dan ekonomi.

Forcal Armadas de Libertacao Nacional de Timor Leste (FALINTIL) : Angkatan Bersenjata Nasional Pembebasan Timor Timur. Falintil awalnya bernama CRRM (*Commando Revolucionario de Resistencia Maubere*), dan merupakan bagian dari Partai Fretilin bersama Komite Sentral. Pada tahun 1989 Fretilin menjadi bagian dari CNRM.

Forum Persatuan Demokrasi dan Keadilan (FPDK) : atau *Forum for Unity, Democracy and Justice*, dideklarasikan tanggal 27 Januari 1999.

Forum Sarjana Pro Referendum dan Pengembangan Timor Leste (FORSA REPETIL) : dibentuk tanggal 27 September 1998 di Dili Timor Timur dengan Ketua Umum Domingos F.J. de Sousa, dan Sekjen Benjamin de Araujo Corta Real.

Frente Revolucionario da Timor Leste Independence : Front untuk Kemerdekaan Timor Timur, terbentuk 20 Mei 1974 – dulunya bernama ASDT – *Associacao Social Democratica Timorese*/Perkumpulan Sosial Demokratik Timor. ASDT berubah menjadi Fretilin setelah dimasuki mahasiswa radikal Timor Timur yang belajar di Portugal. Di bawah pengaruh mereka, ASDT berubah menjadi Fretilin yang lebih beraliran Marxis Sosialis meniru pola perjuangan Frelimo di Mozambik Afrika. Tokoh-tokohnya antara lain FX do Amaral, Nicolao Lobato, Marie Alkatiri, Alarico Fernandez dan Jose Ramos Horta.

Genocide : Pembunuhan tersistematisasi terhadap sekelompok orang disebabkan oleh ras atau suku.

Generalized System of Preferences (GSP) : adalah aturan pemerintah Amerika Serikat tentang perdagangan mereka dengan negara lain. Aturan itu menyediakan berbagai kemudahan dagang (yang memberi keuntungan) bagi negara lain, yang sewaktu-waktu bisa dicabut jika pemerintah negara lain tidak memenuhi tuntutan pemerintah Amerika Serikat.

Gerakan Rekonsiliasi dan Persatuan Rakyat Timor Timur (GRPRTT) : Dibentuk 13 Oktober 1998 dengan tokoh utamanya Manuel Carrascalao dan Fransisco Lopez de Carvalho. Pengurus dan anggotanya datang dari kelompok politik yang berbeda dan beberapa diantaranya mantan Pejabat Pemerintah Timor Timur.

Human Rights (Hak Asasi Manusia) : Hak yang dimiliki oleh orang-orang karena mereka adalah manusia, tanpa memperdulikan kewarganegaraan, kebangsaan, ras, suku bangsa, bahasa, jenis kelamin atau kemampuan; HAM dapat dilaksanakan manakala telah dikodifikasikan sebagai *Conventions*, *Convenants* atau *Treaties*, atau setelah diakui sebagai Customary International Law.

Human Rights Community : Sebuah komunitas yang berdasarkan Hak Asasi Manusia, dimana penghormatan terhadap martabat dasar dari tiap orang diakui sebagai hal yang penting terhadap berfungsinya serta berkembangnya sebuah kelompok masyarakat. Sebuah komunitas yang bekerja untuk menegakkan tiap pasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur (IMPETTU) : atau *Association of Secondary and Tertiary East Timor Students*. Pimpinannya Mariano Sabino Lopes dan Sekjennya dipegang Nino Soares Pereira. Awalnya dibentuk oleh Pemda Timor Timur untuk mewadahi pelajar dan mahasiswa Timor Timur yang dikirim ke luar Timor Timur dalam rangka tugas belajar dengan beasiswa Pemda.

Inalienable : Menunjuk pada hak yang dimiliki oleh setiap orang, yang dalam situasi dan kondisi apapun tidak dapat diganggu gugat.

Indigenous People (Masyarakat Adat) : Masyarakat yang merupakan penduduk asli atau alamiah dari sebuah negara. Penduduk asli Amerika, misalnya, adalah masyarakat adat (indigenous peoples) Amerika Serikat.

Indivisible : Menunjuk pada masalah kesetaraan setiap produk hukum HAM. Seseorang tidak dapat diingkari haknya hanya karena seseorang memutuskan bahwa hak tersebut 'kurang penting' atau 'tidak penting'.

Interdependent : Menunjuk pada kerangka kerja hukum HAM yang saling melengkapi. Sebagai contoh, kemampuan anda untuk berpartisipasi pada bidang pemerintahan secara langsung dipengaruhi oleh hak anda untuk mengungkapkan diri anda sendiri untuk memperoleh pendidikan, dan bahkan untuk memperoleh kebutuhan hidup.

Intergovernmental Organizations (IGOs) : Organisasi yang disponsori oleh sejumlah pemerintah untuk mengkoordinasikan usaha-usaha mereka; beberapa bersifat regional seperti Dewan Eropa (Council of Europe), Organisasi Persatuan Afrika (Organization of African Unity), beberapa merupakan sekutu seperti NATO dan beberapa dimaksudkan untuk tujuan tertentu seperti Pusat Hak Asasi Manusia PBB (UN Centre for Human Rights) dan The United Nations Education, Scientific and Cultural Organizations (UNESCO).

International Bill of Human Rights : Merupakan kombinasi antara Universal Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Protocol optionalnya, dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

International Committee of The Red Cross (ICRC) : atau Organisasi Palang Merah Internasional. Ketika proses jajak pendapat di Timor Timur berlangsung, pimpinan ICRC di Indonesia adalah Tony Pafner, sedangkan perwakilan ICRC di Dili diketuai oleh Symeon Antoulas.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) : Diadopsi pada 1966, dan diberlakukan pada 1976. ICCPR menyatakan bahwa manusia memiliki suatu keluasan jalur hak sipil dan salah satu komponen itu adalah International Bill of Human Rights.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) : Diadopsi pada tahun 1966, dan diberlakukan pada 1967. ICESCR mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini merupakan salah satu komponen Deklarasi Internasional Hak-hak Asasi Manusia (International Bill of Human Rights).

International Forces for East Timor (INTERFET) : Pasukan bersenjata Internasional untuk Timor Timur yang dikirim PBB masuk ke Timor Timur pasca jajak pendapat, dipimpin Australia.

International Labor Organization (ILO) : Didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Perdamaian Versailles untuk meningkatkan kondisi kerja dan mendorong keadilan sosial; ILO menjadi Perwakilan Khusus PBB pada tahun 1946.

Klibur Oan Timor Aswain (KOTA) : atau *The Sons of The Mountain Warriors*, dulunya bernama *Associacao Popular Monarquica de Timor/ The Popular Association of Monarchists of Timor* dengan tokohnya Jose Martins, terbentuk 10 Nopember 1974.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) : atau *Commission of Truth and Friendship*.

Legal Rights : Hak yang diletakkan di bawah hukum dan dapat dipertahankan dan dibawa sebelum dilaksanakan pengadilan hukum.

Member States : Negara-negara yang menjadi anggota PBB.

Moral Rights : Hak yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum kewajaran dan keadilan; hak yang sering tetapi tidak selalu didasarkan pada kepercayaan-kepercayaan agama. Masyarakat kadang-kadang merasa bahwa mereka memiliki satu hak moral bahkan ketika mereka tidak memiliki satu hak legal. Contohnya, selama gerakan hak-hak sipil di Amerika, para demonstran memprotes hukum yang melarang Orang Hitam dan Orang Putih bersekolah di sekolah yang sama karena mereka menganggap hal tersebut melawan hak-hak moral mereka.

Natural Rights : Hak yang sungguh-sungguh dimiliki oleh seseorang karena mereka merupakan manusia.

Non binding : Suatu dokumen, seperti halnya deklarasi yang tidak disertai kekuatan legal formal. Oleh karena itu, membawa kekuatan moral atau mendapatkan kekuatan hukum seperti Customary International Law.

Non Governmental Organizations (NGOs)/Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) : Organisasi-organisasi yang didirikan oleh masyarakat di luar pemerintah. NGOs memonitor cara kerja badan HAM seperti Commission on Human Rights dan 'pengawas' HAM yang diterima sebagai mandatnya. Beberapa diantaranya adalah organisasi besar dan bersifat Internasional (misal : Palang Merah, Amnesty International, Kepanduan Putri); beberapa diantaranya kecil dan bersifat lokal (misal: organisasi untuk advokasi orang-orang cacat di kota tertentu, koalisi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di suatu kamp pengungsi). Ornop berperan penting dalam mempengaruhi kebijakan PBB, dan banyak diantaranya memiliki status konsultan resmi di PBB.

Organisaciao da Juventude de Estudantes Timor Leste (OJETIL) : Organisasi Pemuda dan Pelajar Timor Leste, Sekjenya Gregorio da Cunha Saldanha.

Political Rights atau hak-hak politik : Hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di dalam masyarakat dan komunitas mereka. Contohnya, hak untuk memilih pemerintah atau mengelola pemerintahan. Lihat Civil and Political Rights.

Protocol : Kesepakatan yang menerangkan sebuah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (misalnya prosedur-prosedur atau pasal-pasal tambahan yang bersifat substantif).

Ratification, Ratify : Suatu proses yang menempatkan badan legislatif suatu negara mengakui keputusan pemerintahannya sebagai penandatanganan suatu keputusan; prosedur formal yang mengikat suatu negara dalam sebuah kesepakatan setelah badan legislatif menerimanya.

Reservation : Pengecualian oleh negara penandatanganan butir-butir kesepakatan (misal : pasal-pasal tambahan yang tidak bisa mereka ikuti). Namun demikian reservasi tidak boleh mengurangi arti penting dari kesepakatan tersebut.

Resistencia Nacional Dos Estudantes de Timor Leste (RENETIL) : didirikan di Bali 20 Juni 1988 dengan Sekjen Fernando de Araujo.

Self-Determination : Hak orang-orang dalam sebuah wilayah untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri tanpa paksaan dari kekuatan-kekuatan di luar wilayah tersebut.

Signing, Sign : Dalam HAM, adalah langkah pertama dalam meratifikasi suatu kesepakatan (*Treaty*); menandatangani deklarasi, konvensi, atau satu dari duakonvenan yang ada merupakan sebuah janji untuk menegakkan prinsip-prinsip, serta menghormati semangat yang dikandung oleh dokumen yang ditandatangani.

States Party(ies) : Negara-negara yang telah meratifikasi sebuah *Covenant* atau *Convention* terikat untuk menjalankan aturan-aturannya.

TRABALHISTA : disebut juga *Labour Party*/Partai Buruh, terbentuk sekitar Oktober 1974 dengan tokohnya Domingos da Conceicao Pereira dan Paulo Freitas.

Treaty : Kesepakatan resmi antar negara yang menjelaskan dan memperbaiki tugas dan kewajiban bersama negara tersebut; merupakan padanan dari *Covenant* atau *Convention*. Jika konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB, maka konvensi itu menciptakan kewajiban Internasional yang bersifat mengikat secara hukum untuk negara-negara anggota PBB yang telah menandatangani. Jika pemerintah suatu negara meratifikasi sebuah *Treaty*, maka pasal-pasal yang ada di dalam *Treaty* itu menjadi bagian dari kewajiban hukum domestik.

Uniao Democratica Timorese (UDT) : Uni Demokratik Timor, terbentuk 11 Mei 1974 dengan tokohnya antara lain Cesar Augusto, FX Lopes da Cruz dan Mario Carrascalao. Ketiganya dikenal sebagai mantan tokoh PNU (*Portuguese National Union*), satu-satunya partai legal semasa kolonialisme Portugal. Setelah Revolusi Bunga di Portugal 25 April 1974, UDT menjadi partai pertama yang dibentuk di Timor Timur dan pernah berkoalisi dengan Partai Fretilin.

United Front for East Timor Autonomy (UNIF) : Front Bersatu Pendukung Otonomi Timor Timur, wadah organisasi kelompok-kelompok pendukung Pro Integrasi.

United Nations Charter (Piagam PBB) : Dokumen awal PBB yang menentukan mengenai tujuan, fungsi dan tanggung jawab PBB; diadopsi di San Fransisco pada tahun 1945.

United Nations General Assembly (Majelis Umum PBB) : Salah satu organ utama PBB terdiri dari perwakilan negara-negara anggota PBB. Majelis Umum mengeluarkan deklarasi dan mengadopsi konvensi tentang isu-isu Hak Asasi Manusia, berdebat mengenai isu-isu yang relevan, dan menggugat negara-negara yang melanggar Hak Asasi Manusia. Tindakan Majelis Umum diarahkan oleh United Nations Charter.

United Nations High Commissioner on Refugees (UNHCR) : Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi.

United Nations Transitional Authority in East Timor (UNTAET) : Pemerintahan Sementara PBB di Timor Timur pasca jajak pendapat dipimpin Sergio Vieira de Mello.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) : Diadopsi oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948. Dokumen utama PBB dalam membangun standard dan norma Hak-hak Asasi Manusia. Seluruh negara anggota PBB sudah setuju untuk menegakkan UDHR. Walaupun deklarasi tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk tidak mengikat (*non binding*), dengan berjalannya waktu maka berbagai aturannya telah menjadi sangat dihormati oleh negara-negara sehingga sekarang dapat disebut sebagai Customary International Law.

Sumber : Diadaptasi dari Julie Mertus, et al., *Local Action/Global Change*, O'Brien, et al (ed), *Human Rights for All*, dan Frank Newman and David Weissbrodt, *International Human Rights: Law, Policy and Process*. [Behae L – Wehay E].